

*Laporan
Pelaksanaan*

**Penerapan
Tata Kelola
Perusahaan**



**Together, Building
Sustainable Growth**



PaninBank | 2021

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TUJUAN PENERAPAN GCG

Meski masa keadaan darurat bencana non alam pandemi Covid-19 belum berakhir, namun seluruh industri tetap terus berinovasi dalam upaya mereka untuk tetap bisa bertahan bahkan berusaha untuk mulai bangkit kembali dengan senantiasa memperhatikan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Oleh karena itu, PaninBank saat ini terus mengembangkan layanan perbankan digital yang tidak hanya untuk mendukung bisnis perseroan, tetapi juga untuk mendukung kebutuhan inovasi para pelaku usaha.

PaninBank terus mempersiapkan, mengembangkan dan berinovasi memperkuat lini layanan dan produk perbankan digital untuk meningkatkan pemanfaatan dan membudayakan kebiasaan bertransaksi secara online di masyarakat, terutama di masa pandemi Covid-19. Inisiatif digitalisasi layanan perbankan ini juga sejalan dengan visi PaninBank untuk menjadi salah satu mitra finansial masyarakat Indonesia dengan bertransformasi menjadi modern digital bank terbaik yang dapat menghadirkan solusi perbankan digital yang handal dan simpel untuk berbagai kebutuhan nasabah.

Selain itu PaninBank didalam menjalankan perannya sebagai intermediasi keuangan, saat ini terus fokus pada perbaikan (*recovery*) dunia usaha melalui penyaluran pembiayaan usaha Korporasi, UMKM dan Konsumer agar pertumbuhan dunia usaha dapat bergairah kembali yang berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi sesuai dengan harapan pemerintah dan pelaku usaha serta seluruh rakyat Indonesia.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan/perseroan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Prinsip Tata Kelola Terintegrasi dan Prinsip Tata Kelola PaninBank yang menjadi panduan dan rujukan praktis dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di setiap aktivitas dan jenjang organisasi di PaninBank dan perusahaan anak.

PaninBank memiliki visi untuk menjadi Bank pilihan utama bagi Nasabah individu dan bisnis dengan kearifan lokal, sehingga senantiasa menjaga dan meningkatkan kinerja keuangannya secara sehat. Kedepan dalam rangka mewujudkan layanan digital banking melalui inovasi berkelanjutan tentunya PaninBank menyadari perlu adanya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* dalam setiap aspek pengelolaan kegiatan usaha Bank sesuai dengan peraturan dan perundang undangan serta standar yang berlaku umum di industri perbankan. Dengan mengedepankan penerapan *Good Corporate Governance*, PaninBank diharapkan dapat menghadapi tantangan dunia perbankan di tengah pemulihan pandemi Covid-19 serta mampu meningkatkan efisiensi bank, kepercayaan dan keyakinan seluruh *stakeholder*.

Kunci keberhasilan dan kesinambungan penerapan Tata Kelola Perusahaan atau GCG di Perusahaan adalah berfungsinya organ-organ Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-komite secara efektif. Selanjutnya organ-organ ini yang merupakan organ utama tata kelola, akan sangat terbantu bilamana terdapat organ-organ pendukung tata kelola yang juga berfungsi secara efektif. Untuk mendukung penerapan tata kelola tersebut, maka diperlukan suatu Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang telah digunakan oleh PaninBank sebagai arahan pelaksanaan GCG di PaninBank.

Implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola yang dilakukan secara konsisten akan memberikan manfaat bagi PaninBank baik secara langsung maupun tidak langsung baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek untuk :

1. Menciptakan landasan bagi PaninBank guna bertumbuh dan berkembang untuk jangka panjang,
2. Meningkatkan daya saing PaninBank,
3. Mengangkat citra baik PaninBank dimata para konsumennya,
4. Meningkatkan kepercayaan investor kepada PaninBank,

PaninBank memiliki pandangan bahwa peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja PaninBank secara keseluruhan. Hal ini ditunjukkan antara lain dari berbagai kinerja PaninBank yang dicapai pada periode 2021 dimana kinerja keuangan PaninBank pada periode Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Laba Perseroan secara konsolidasi mencapai Rp 1,817 Triliun.
2. Aset Perseroan mencapai Rp. 204,463 Triliun.
3. Kredit yang disalurkan mencapai Rp. 124,845 Triliun.
4. Dana Pihak Ketiga sebesar Rp. 134,069 Triliun.
5. Total Ekuitas sebesar Rp. 45,446 Triliun.
6. Non Performing Loan (NPL) Netto 0.81 %.

PaninBank menyadari perlu adanya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG dalam setiap jenjang organisasi dan aspek pengelolaan kegiatan usaha PaninBank sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta standar praktik yang berlaku umum di industri perbankan. Dengan mengedepankan penerapan tata kelola yang baik, PaninBank diharapkan dapat terhindar dari dampak negatif krisis perekonomian global, meningkatkan efisiensi Perusahaan, kepercayaan dan keyakinan seluruh *stakeholder*.

Selain itu, penerapan GCG di PaninBank juga merujuk pada beberapa regulasi yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan standar internasional berdasarkan prinsip OECD dan *ASEAN Corporate Governance Scorecard*, antara lain meliputi:

1. Beberapa Undang-undang Republik Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal, Perbankan dan Perseroan Terbatas;
2. Berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), khususnya mengenai Penerapan dan

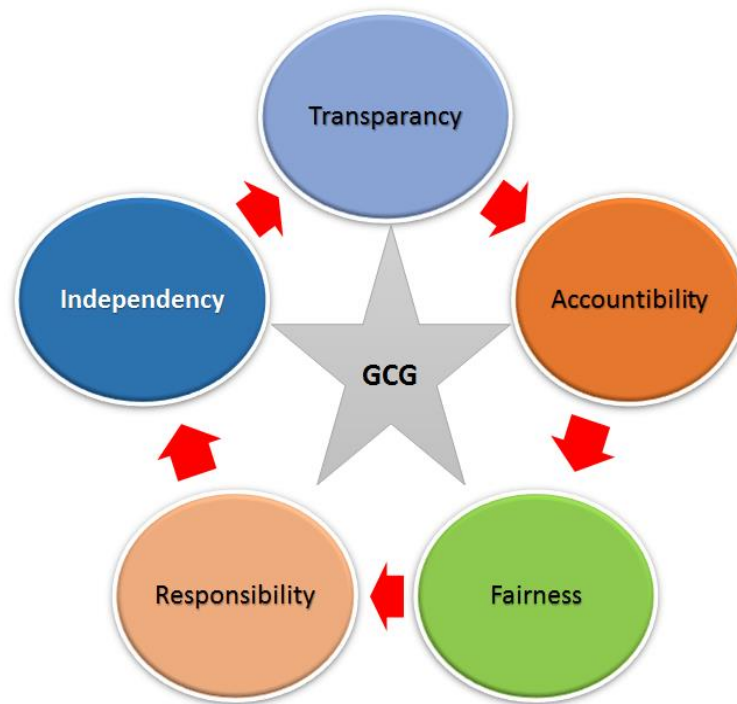
- Pedoman Tata Kelola, Laporan Tahunan, dan lain-lain;
3. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang disampaikan melalui siaran pers OJK tanggal 4 Februari 2014;
 4. *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang dikeluarkan oleh *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF);
 5. Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 6. Kebijakan Bank (Kebijakan Pokok Perusahaan, Kode Etik & Perilaku Kepegawaian, Kebijakan, dan Standar Prosedur Operasional).

PaninBank secara konsisten terus mendorong pengembangan individu-individu di dalamnya. Dengan sistem karir dan penilaian performa kerja yang komprehensif, PaninBank memastikan bahwa karyawan mendapatkan *reward* yang sesuai. Selain itu sistem pengembangan yang disusun secara berjenjang mengikuti pengembangan tanggung jawab dan kemajuan karir setiap individu turut menopang terbentuknya SDM unggul. Hal ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam I-CARE (*Integrity, Collaboration, Accountability, Respect* dan *Excellence*). Penerapan I-CARE dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi PaninBank untuk terus maju.

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Secara umum, PaninBank telah menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yang mencakup transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), dengan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya peningkatan kualitas pelaksanaan GCG yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia.

Adapun penerapan prinsip-prinsip GCG di PaninBank dapat diuraikan sebagai berikut :



TRANSPARANCY

Transparansi ini diwujudkan oleh PaninBank dengan selalu berusaha untuk memelopori pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan *Public Expose* untuk memenuhi ketentuan pasar modal dalam rangka memaparkan kinerja Perseroan kepada Pemegang Saham, Investor, Analis, dan Media. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan PaninBank dengan tetap mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku dan disarankan oleh praktik *Good Corporate Governance*.

ACCOUNTIBILITY

PaninBank menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu solusi mengatasi perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan bank maupun kepentingan PaninBank dengan pihak yang berkepentingan.

Dalam mencapai akuntabilitas ini, maka PaninBank secara formal menyusun rincian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing posisi dengan mempertimbangkan pemisahan fungsi/ tugas (*segregation of duties*) dan mekanisme *check and balance*. Tidak hanya itu, PaninBank berusaha untuk menyediakan sumber daya yang memadai sehingga tidak terdapat tumpang tindih tugas dan tanggung jawab.

RESPONSIBILITY

PaninBank bertanggungjawab untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan, dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Seluruh karyawan PaninBank juga bertanggungjawab untuk mematuhi kebijakan, prosedur kerja, serta peraturan

internal lainnya dalam setiap aktivitas kerja.

INDEPENDENCY

Independensi ini diimplementasikan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggungjawab serta kewenangan masing-masing organ bank. PaninBank meyakini bahwa dengan implementasi prinsip kemandirian secara optimal, seluruh organ PaninBank dapat bertugas dengan baik dan maksimal dalam membuat keputusan dan pengelolaan yang terbaik bagi PaninBank.

FAIRNESS

PaninBank menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil, wajar, dan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Di samping itu, PaninBank akan menerima dan memperlakukan setiap karyawan secara adil dan bebas dari bias karena adanya perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau karena hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.

Deklarasi Anti Fraud

PaninBank menyatakan komitmennya “*Zero Tolerance to Fraud*” untuk melakukan bisnis yang sesuai dengan kode etik dan standar hukum yang tinggi juga untuk tidak melakukan tindakan *fraud* dan tindakan tidak sesuai lainnya.

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*)

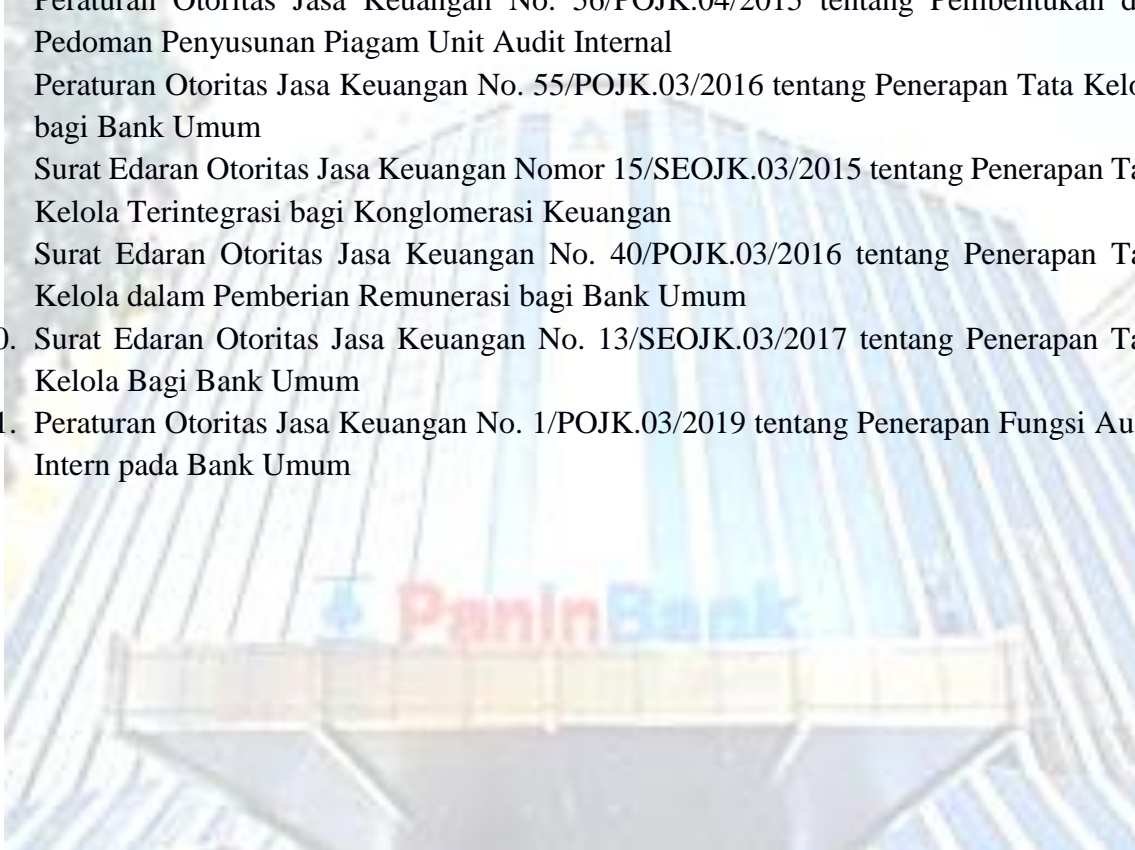
PaninBank dalam pelaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku menerapkan standar etika yang merupakan suatu kerangka ekspektasi dimana semua karyawan dan manajemen PaninBank diharapkan untuk bertindak sesuai kerangka ekspektasi tersebut. Pedoman Etika dan Perilaku tersebut harus berfungsi sebagai pedoman dasar yang berlaku bagi seluruh karyawan PaninBank. Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku dilakukan sesuai dengan Kebijakan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku di PaninBank serta dikaji secara berkala agar sesuai dengan lingkungan PaninBank yang dinamis dan menyesuaikan dengan Kebijakan Anti *Fraud* ini.

Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku di PaninBank mengatur antara lain tentang Penerimaan Hadiah atau Imbalan, dimana setiap karyawan PaninBank dilarang menerima sesuatu, baik dana tunai maupun non-tunai lainnya, dari pihak di luar PaninBank sebagai balas jasa untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan PaninBank ataupun pemberian informasi yang sifatnya rahasia atau sebagai balas jasa atas fasilitas yang diterima nasabah.

Hal lain yang diatur pada Pedoman Etika dan Perilaku adalah tentang Anti Penyuapan, dimana PaninBank dan Karyawan PaninBank tidak menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non-tunai lainnya, yang mengatasnamakan PaninBank atau pribadi kepada Pihak di luar PaninBank seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi apapun ataupun Nasabah dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun. PaninBank dan Karyawan

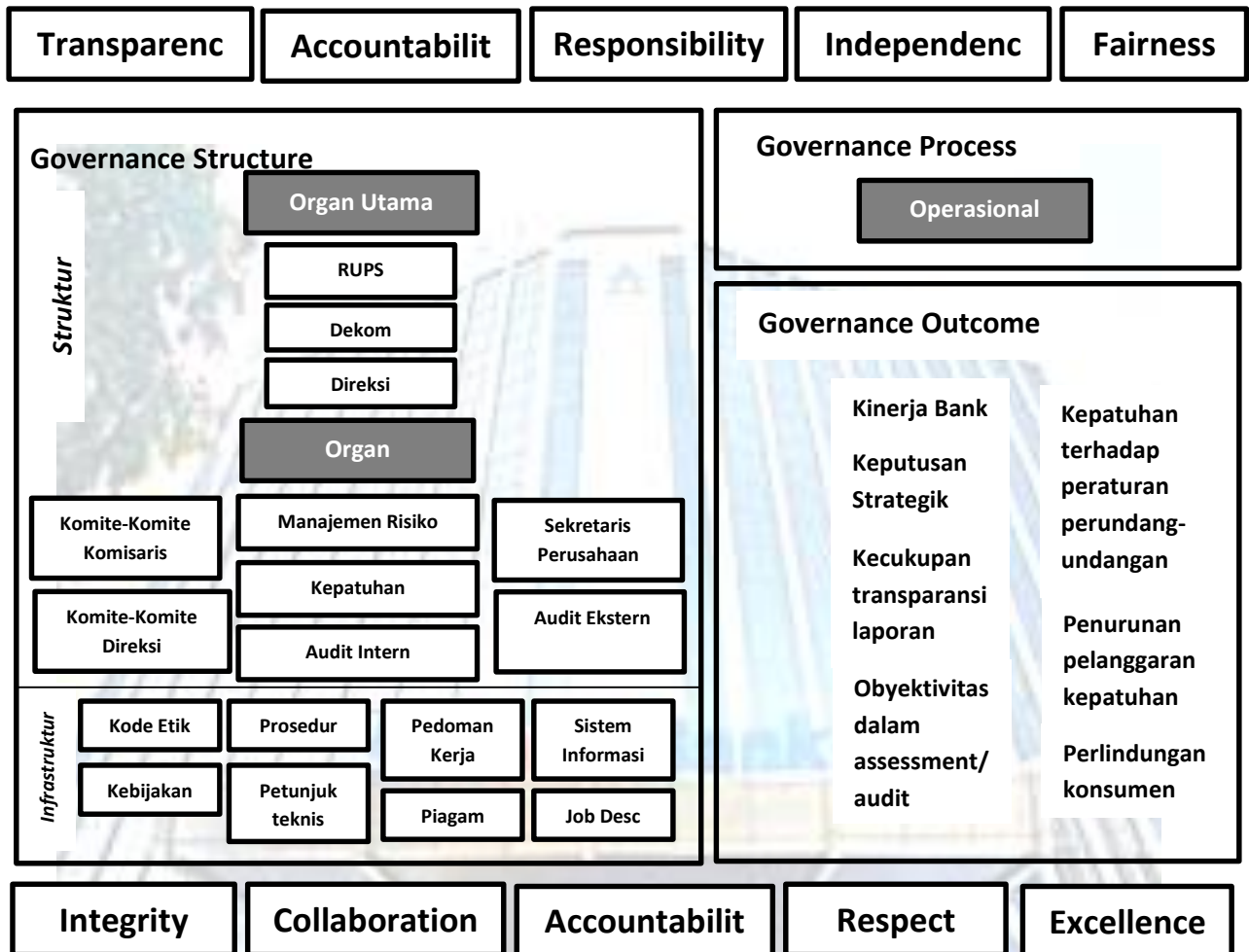
Penerapan Tata Kelola di PaninBank telah mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum



KERANGKA KERJA IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam rangka mendukung implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif, maka diperlukan kerangka kerja (*framework*) implementasi GCG yang memberikan gambaran umum mengenai keterkaitan organ-organ GCG. Kerangka kerja implementasi GCG disusun dengan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi, budaya, dan nilai-nilai Perseroan. Berikut adalah kerangka kerja implementasi GCG di PaninBank:



Governance Structure PaninBank terdiri atas struktur dan infrastruktur GCG. Struktur GCG PaninBank terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung. Organ Utama terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, sedangkan Organ Pendukung terdiri dari Komite Dewan Komisaris, Komite Direksi, *Corporate Secretary*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), dan Auditor Ekstern. Infrastruktur GCG PaninBank mencakup kebijakan, pedoman, atau prosedur kerja dan manajemen sistem informasi yang mendukung operasional unit kerja. Organ Utama dan Organ Pendukung GCG wajib meyakini ketersediaan dan kesiapan infrastruktur untuk mencapai rencana korporasi dan rencana bisnis yang telah ditetapkan. Keberhasilan Organ Utama dan Organ Pendukung dalam menerapkan GCG di PaninBank (*Governance Process*) akan diukur dari hasil operasional Perseroan (*Governance Outcome*).

Beberapa hasil operasional yang perlu mendapatkan perhatian adalah kecukupan transparansi laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, perlindungan konsumen, obyektivitas dalam melakukan *assessment/* audit, kinerja Perseroan seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan, penurunan pelanggaran serta pelaksanaan kebijakan strategis yang diambil dalam rangka memenuhi rencana korporasi dan bisnis.

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kebijakan tata kelola merupakan seperangkat aturan dalam mengimplementasikan GCG di PaninBank. Kebijakan tersebut mengatur hubungan antar organ sehingga terdapat pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG, dan etika bisnis yang sehat. Adapun kebijakan pokok terkait GCG yang terdapat di PaninBank antara lain:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris revisi tanggal 1 Oktober.
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang disahkan dengan Keputusan Dewan Komisaris revisi tanggal 20 Desember 2021.
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disahkan dengan Keputusan Direksi revisi tanggal 1 November 2021.
4. Pedoman *Self Assessment Corporate Governance* yang disahkan dengan Keputusan Direksi revisi tanggal 1 Oktober 2021.
5. Pedoman Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan yang disahkan dengan Ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris revisi tanggal 1 November 2021.
6. Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 3 Desember 2021.
7. Pedoman Pemberian Sanksi yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 7 Juli 2014 beserta perubahannya.
8. Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 5 Juni 2013 beserta perubahannya.
9. Kebijakan Strategi Anti Fraud yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 20 April 2020 beserta perubahannya.
10. Pedoman *Whistle Blowing* yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 14 Juni 2013 beserta perubahannya.
11. Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Bank yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 30 Juni 2021.
12. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Good Corporate Governance* yang disahkan dengan ketetapan Direksi tanggal 1 Oktober 2021.
13. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 1 November 2021.
14. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 2 November 2021.
15. Pedoman Kebijakan Komunikasi dengan Pihak Eksternal yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 2 November 2021.

16. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko yang disahkan dengan Keputusan Direksi bulan Maret 2021.
17. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Aset dan Kewajiban (*Asset and Liability Committee - ALCO*) yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 11 Oktober 2021.

PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berdasarkan POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, terdapat 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi tata kelola yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PaninBank saat ini telah menerapkan sebagian aspek, prinsip, dan rekomendasi tersebut berdasarkan pendekatan “*comply or explain*”. Beberapa rekomendasi yang telah dilakukan oleh PaninBank adalah sebagai berikut:

1. PaninBank telah memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.
2. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
3. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.
4. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.
5. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.
6. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.
7. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagai dasar regulasi tentang pelaksanaan GCG, pelaksanaan GCG yang dianut PaninBank terdiri dari 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Untuk memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG dimaksud, PaninBank telah melakukan *self assessment* secara berkala sesuai ketentuan regulasi yaitu per semester, dengan aspek penilaian adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan penyediaan dana besar (*Large Exposure*);
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan Internal; dan
11. Rencana Strategis Perseroan;

Self Assessment Penerapan Tata Kelola

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG Tahun 2021

Nama **Bank** : PT. Bank Panin, Tbk.

Posisi : Semester I 2021 (Individual)

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2 (berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri dengan nilai komposit 1.95)	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
Analisis		
<p>Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja <i>self assessment Good Corporate Governance</i>, penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di PT Bank Panin, Tbk. untuk priode Semester I tahun 2021 secara umum adalah baik, yang tercermin pada pemenuhan yang memadai atas prinsip – prinsip <i>Good Corporate Governance</i>.</p> <p>Governance Structure</p> <p>Struktur dan infrastruktur tata kelola di Perusahaan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. <i>Governance Structure</i> memiliki keterkaitan dengan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang cukup memadai agar proses penerapan prinsip GCG menghasilkan pencapaian yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>). PT Bank Panin, Tbk memiliki struktur Tata Kelola yang terdiri dari organ utama, organ pendukung, dan infrastruktur GCG yang lengkap seperti yang menjadi arahan Regulator.</p>		

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi PaninBank telah mempertimbangkan skala dan kompleksitas usaha PaninBank. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilengkapi dengan kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang jelas.

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris PaninBank telah mempertimbangkan skala dan kompleksitas usaha PaninBank. Separuh atau 50% anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang dilengkapi dengan kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang jelas.

Governance Process

Struktur dan infrastruktur tata kelola PT Bank Panin, Tbk. berjalan sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan proses tata kelola yang efektif berdasarkan prinsip GCG, prinsip kehati-hatian dan pilar-pilar penerapan manajemen risiko.

Kecukupan transparansi kondisi Keuangan dan non keuangan serta laporan pelaksanaan tata kelola yang memadai. PaninBank memiliki kebijakan mengenai informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah. PaninBank senantiasa mengumumkan laporan Keuangan dan non keuangan secara berkala melalui media cetak maupun melalui situs web PaninBank serta menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Governance Outcome

Efektivitas penerapan GCG tercermin dari *governance outcome* yang telah diperoleh. PT Bank Panin, Tbk. Memiliki capaian yang **baik** di 2021 baik untuk kinerja operasional maupun kinerja keuangan.

PaninBank juga telah memiliki Rencana Bisnis yang disusun sesuai visi dan misi PaninBank dengan mempertimbangkan kondisi makro dan mikro, *risk appetite*, infrastruktur, strategi dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Rencana Bisnis dan realisasinya telah disampaikan kepada pihak regulator secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG Tahun 2021

Nama **Bank** : PT. Bank Panin, Tbk.

Posisi : Semester II 2021 (Individual)

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2 (berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri dengan nilai komposit 1,95)	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
Analisis		
<p>Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja <i>self assessment Good Corporate Governance</i>, penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di PT Bank Panin, Tbk. untuk priode Semester II tahun 2021 secara umum adalah baik, yang tercermin pada pemenuhan yang memadai atas prinsip – prinsip <i>Good Corporate Governance</i>.</p> <p><i>Governance Structure</i></p> <p>Struktur dan infrastruktur tata kelola di Perusahaan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. <i>Governance Structure</i> memiliki keterkaitan dengan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang cukup memadai agar proses penerapan prinsip GCG menghasilkan pencapaian yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>). PT Bank Panin, Tbk. memiliki struktur Tata Kelola yang terdiri dari organ utama, organ pendukung, dan infrastruktur GCG yang lengkap seperti yang menjadi arahan Regulator.</p> <p>Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi PaninBank telah mempertimbangkan skala dan kompleksitas usaha PaninBank. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilengkapi dengan kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang jelas.</p> <p>Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris PaninBank telah mempertimbangkan skala dan kompleksitas usaha PaninBank. Separuh atau 50% anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung</p>		

jawab Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang dilengkapi dengan kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang jelas.

Governance Process

Struktur dan infrastruktur tata kelola PT Bank Panin, Tbk. berjalan sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan proses tata kelola yang efektif berdasarkan prinsip GCG, prinsip kehati-hatian dan pilar-pilar penerapan manajemen risiko.

Kecukupan transparansi kondisi Keuangan dan non keuangan serta laporan pelaksanaan tata kelola yang memadai. PaninBank memiliki kebijakan mengenai informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah. PaninBank senantiasa mengumumkan laporan Keuangan dan non keuangan secara berkala melalui media cetak maupun melalui situs web PaninBank serta menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Governance Outcome

Efektivitas penerapan GCG tercermin dari *governance outcome* yang telah diperoleh. PT Bank Panin, Tbk. memiliki capaian yang baik di 2021 baik untuk kinerja operasional maupun kinerja keuangan.

PaninBank juga telah memiliki Rencana Bisnis yang disusun sesuai visi dan misi PaninBank dengan mempertimbangkan kondisi makro dan mikro, *risk appetite*, infrastruktur, strategi dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Rencana Bisnis dan realisasinya telah disampaikan kepada pihak regulator secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*) yang telah dilakukan PaninBank untuk periode pelaporan *self assessment* Tahun 2021, yang dikelompokkan kedalam 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* maka diperoleh angka peringkat yang mencerminkan kondisi penerapan GCG PaninBank, yaitu peringkat 2 (dua), baik pada semester I maupun pada semester II tahun 2021.

Definisi atas perolehan peringkat 2 (dua) tersebut adalah mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Penilaian Eksternal/ Regulator/ Pengawas PaninBank atas hasil *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola (GCG)

Selain melakukan penilaian sendiri *Self Assessment* atas penilaian penerapan GCG yang telah dilakukan PaninBank untuk periode pelaporan *self assessment* 2021, pihak Eksternal/ Regulator/ Pengawas juga melakukan penilaian berdasarkan pemeriksaan umum dan atau pemeriksaan khusus pada periode dimaksud yang dalam hal ini yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan surat OJK No. S 85/PB.33/2021, OJK memberikan penilaian bahwa Penerapan Tata Kelola yang dilakukan oleh PaninBank berada pada peringkat 2 untuk periode Semester II-2020.

RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2022

PaninBank menyadari perlu adanya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang **Baik** dalam setiap jenjang organisasi dan aspek pengelolaan kegiatan usaha PaninBank sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, serta standar praktik yang berlaku umum di industri perbankan. PaninBank memiliki pandangan bahwa peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja PaninBank secara keseluruhan.

Sejalan dengan rencana strategis Bank, dimana salah satu targetnya adalah melanjutkan komitmen penguatan Tata Kelola dan peningkatan implementasi Tata Kelola di seluruh jenjang organisasi.

Pada dasarnya penguatan Penerapan Tata Kelola selain mengacu kepada regulasi yang ditetapkan oleh regulator seperti Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa keuangan (OJK), dan juga berpedoman pada standar internasional berdasarkan prinsip OECD dan ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS adalah organ utama Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak dapat didelegasikan atau diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ utama Perseroan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang Undangan.

Selain itu RUPS juga berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban kepengurusan Direksi dan Komisaris atas hasil kinerjanya dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam batas-batas yang diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan penting secara setara.

Hak dan Kewenangan RUPS

Hak dan Kewenangan yang sepenuhnya dimiliki oleh RUPS diantaranya adalah:

1. Menyetujui perubahan AD/ART;
2. Memutuskan struktur permodalan Perseroan;
3. Memutuskan penggunaan laba bersih;
4. Menunjuk dan memberhentikan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Mengevaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2021

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2014 dan perubahannya yaitu POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Pada tahun 2021, PaninBank melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan.

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

A. Penyelenggaraan RUPS Tahunan

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Juni 2021

Waktu : Pukul 11.00 s.d Selesai

Tempat : Gedung Bank Panin Lantai 4 (Empat)
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan
Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
6. Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Pra Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan RUPS Tahunan

No	Tentang	Tanggal	Keterangan
1	Pemberitahuan RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan	26 April 2021	Melalui Surat No : 046/DIR/OJK2021
<p>POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 8 Ayat 1-3 Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</p>			
2	Pemberitahuan Rencana RUPS ke BEI dan KSEI	3 Mei 2021	Disampaikan melalui E-Reporting terintegrasi OJK dan BEI dan KSEI melalui Surat
<p>AD/ART PT Bank Panin Tbk. Pasal 12.6 PaninBank telah melakukan pengumuman RUPS dengan Iklan dalam surat kabar harian “Bisnis Indonesia” serta melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Situs web Bursa Efek Indonesia • Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) • Situs web PaninBank 			
3	Iklan Pemberitahuan RUPS	3 Mei 2021	Pengumuman melalui Iklan dalam surat kabar Harian Bisnis Indonesia , terbit pada tanggal 3 Mei 2021,
<p>POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 10 Ayat 2 dan 4 Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan melalui:</p> <p>a 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;</p> <p>b situs web Bursa Efek;</p> <p>c situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.</p>			
<p>POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 10 Ayat 3 Wajib memuat informasi bahwa Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham jika RUPS terselenggara karena permintaan pemegang saham.</p>			
4	Pengiriman Bukti Iklan Pemberitahuan ke OJK dan BEI	3 Mei 2021	Dikirim melalui e-reporting terintegrasi OJK dan BEI
<p>POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 10 Ayat 8 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.</p>			
<p>POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 10 Ayat 9 Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS.</p>			
5	Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS	17 Mei 2021	Diungkapkan didalam Iklan Pemberitahuan RUPS
<p>POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 19 Ayat 2 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.</p>			
6	Iklan Penggilan RUPS	18 Mei 2021	Harian Bisnis Indonesia serta melalui ; <ul style="list-style-type: none"> • Situs Web Bursa Efek Indonesia

			<ul style="list-style-type: none"> • Situs Web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) • Situs Web PaninBank
<p>POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 13 Ayat 1 dan 3 Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS melalui:</p> <p>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.</p> <p>Daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:</p> <p>a di situs web Perusahaan Terbuka paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau b pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf “a” namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang undangan.</p>			
7	Pengiriman Bukti Iklan Penggilan ke OJK dan BEI	18 Mei 2021	Dikirim melalui E-Reporting terintegrasi OJK dan BEI
<p>POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 13 Ayat 7 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.</p>			
8	Pelaksanaan RUPS Rabu, 9 Juni 2021 Pkl. 11.00 WIB Bertempat di Gedung PaninBank Pusat Lantai Dasar Jalan Jend. Sudirman – Senayan Jakarta	9 Juni 2021	
<p>POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 26 Ayat 1.a RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar</p>			
9	Pengiriman Hasil RUPS ke OJK & BEI	11 Juni 2021	Dikirim melalui E-Reporting terintegrasi OJK dan BEI
<p>POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 34 Ayat 2 dan 6 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui:</p> <p>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing</p>			
10	Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham	11 Juni 2021	Surat kabar Harian Bisnis Indonesia
<p>POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 34 Ayat 2 dan 6 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui:</p> <p>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing</p>			

11	Pengiriman Bukti Hasil RUPS ke OJK dan BEI	11 Juni 2021	Dikirim melalui E-Reporting terintegrasi OJK dan BEI
POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 34 Ayat 7 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.			
12	Risalah RUPS	7 Juli 2021	Dikirim melalui surat ke OJK
POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 33 (1) Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. (2) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.			

C. Tabel Kehadiran RUPS Tahunan

RUPS Tahunan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pemegang Saham sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris / Komisaris Independen/ Ketua Komite Audit	Drs. Herwidayatmo	Presiden Direktur
		Antonius Ketut Dwirianto	Direktur
Pemegang Saham			
Priskila Gabriela Ciahaya	PT Panin Financial	Kuasa	
Aster F Lumban Gaol	Votrant	Kuasa	
Aster F Lumban Gaol	Masyarakat	Reperesentatif e-Proxy KSEI	

D. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit

Pemegang Saham yang berhak hadir adalah Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PaninBank. RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Komite Audit. Selain itu, RUPS Tahunan juga dihadiri oleh Notaris Kristanti Suryani, SH, perwakilan Biro Administratif Efek dan Akuntan Publik

Rapat tersebut dihadiri oleh 21.808.088.854 (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 90,559% (Sembilan Puluh koma Lima Lima Sembilan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh PaninBank.

E. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, dan/atau pendapat secara tertulis dengan cara mengangkat tangan dan Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk

menyampaikan pertanyaannya dan/atau pendapat diawali dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya atau dengan cara mengisi lembar pertanyaan yang akan dibagikan, selanjutnya lembar pertanyaan akan diambil oleh Petugas, untuk kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan kemudian akan menjawab atau menanggapi. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat.

F. Mekanisme Pemungutan, Perhitungan Suara dan Perhitungan Suara dalam Pengambilan Keputusan RUPS

Mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara pemungutan dan perhitungan suara diatur dalam tata tertib RUPS yang diungkapkan dalam Situs Web PaninBank dan dibacakan oleh Pimpinan Rapat pada awal pelaksanaan RUPS. Setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat yang di ajukan secara tertulis kepada Pemimpin rapat sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda rapat. Pada Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab selesai dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak terdapat Pemegang Saham/ Kuasanya yang tidak setuju, abstain/blanko yang mengangkat tangan dalam tahap ini, maka keputusan dapat disimpulkan disetujui secara musyawarah mufakat dan jika ada Pemegang Saham/ Kuasanya yang tidak setuju, abstain/blanko mengangkat tangan pada tahap tersebut, maka keputusan rapat akan diambil dengan pemungutan suara dan Notaris akan melaporkan mengenai jumlah suara yang tidak setuju dan abstain/blanko. Notaris akan melaksanakan perhitungan dan melaporkan hasil pemungutan suara tersebut, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PaninBank dan menyampaikan kepada Pimpinan Rapat.

G. Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama			
Persetujuan atas Laporan Tahunan PaninBank mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PaninBank untuk tahun buku 2020			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya		Nihil	
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	99,966%	0.034%	
Keputusan Rapat	<p>1. Menyetujui Laporan Tahunan PaninBank mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha PaninBank, yang antara lain memuat Laporan Keuangan PaninBank untuk tahun buku yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (<i>member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited</i>) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: 00084/2.1265/AU.1/07/0849-2/1/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, dimana didalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama PaninBank (“Laporan Keuangan”) serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan.</p> <p>2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi PaninBank untuk tahun buku 2020, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PaninBank atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dan/atau dalam Laporan Tahunan.</p>		
Realisasi	2021		

Mata Acara Ke-dua			
Persetujuan atas penggunaan laba PaninBank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya		Nihil	
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%		
Keputusan Rapat	Menyetujui dari keuntungan tahun buku 2020 berupa laba bersih sebesar Rp. 3.075.192.315.380. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar PaninBank, Rapat Direksi PaninBank yang diadakan pada tanggal 27 Mei 2021 antara lain telah mengambil keputusan untuk menyetujui Menetapkan penggunaan laba bersih PaninBank untuk tahun buku 2020 seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat modal inti PaninBank dalam rangka pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat sebagai Laba yang Ditahan.		
Realisasi	2021		
Mata Acara Ke-tiga			
Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya		Nihil	
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

	100%		
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 sebesar Rp.4.576.252.500,-. 2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris PaninBank untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi PaninBank untuk tahun buku 2021. 3. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian. 		
Realisasi	2021		
Mata Acara Ke-empat		Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk Tahun 2021	
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya		Nihil	
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	99,965%		0,035%
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pendelegasian kewenangan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan PaninBank untuk tahun buku 2021 kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Pendelegasian ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini, sedang dilakukan negosiasi dan evaluasi pemilihan Akuntan Publik. Kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah sebagai berikut ; <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan b. Memiliki reputasi sebagai Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Terbuka c. Independen 2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris PaninBank untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit. 3. Dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di OJK. 		
Realisasi	2021		
Mata Acara Ke-lima		Perubahan Pengurus Perseroan	
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya		Nihil	
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	99,965%		0,035%
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pembatalan keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2020 terkait pengangkatan Nyonya Marlina Gunawan selaku Direktur Perseroan, Tuan Chandra Rahardja Gunawan selaku Wakil Presiden Komisaris dan Tuan Johnny selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan sesuai dengan Surat OJK Nomor: S-I/PB.33/2021 tanggal 8 Januari 2021 2. a. Menyetujui mengangkat anggota Direksi Perseroan sebagai berikut ; <ol style="list-style-type: none"> - Tuan Herwidayatmo selaku Presiden Direktur - Tuan Hendrawan Danusaputra selaku Wakil Presiden 		

Direktur

- Tuan Edy Heryanto selaku Direktur
- Tuan Januar Hardy selaku Direktur
- Tuan Haryono Wongsonegoro selaku Direktur
- Tuan Gunawan Santoso selaku Direktur
- Tuan Ng Kean Yik selaku Direktur
- Tuan Lionto Gunawan selaku Direktur
- Tuan Suwito Tjokrorahardjo selaku Direktur
- Tuan Antonius Ketut Dwirianto selaku Direktur

Terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada Tahun 2024

b. Mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut;

- Tuan Johnny selaku Komisaris
 - Tuan Chandra Rahardja Gunawan selaku Komisaris
- Terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada Tahun 2022

Pengangkatan Tuan Johnny selaku Komisaris telah memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor 88/KDK.03/2020 tanggal 15 Desember 2020 dan pengangkatan Tuan Chandra Rahardja Gunawan selaku Komisaris telah memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/DK.03/2019 tanggal 31 Oktober 2019.

Dengan demikian;

Susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut ;

- Tuan Herwidayatmo selaku Presiden Direktur
- Tuan Hendrawan Danusaputra selaku Wakil Presiden Direktur
- Tuan Edy Heryanto selaku Direktur
- Tuan Januar Hardy selaku Direktur
- Tuan Haryono Wongsonegoro selaku Direktur
- Tuan Gunawan Santoso selaku Direktur
- Tuan Ng Kean Yik selaku Direktur
- Tuan Lionto Gunawan selaku Direktur
- Tuan Suwito Tjokrorahardjo selaku Direktur
- Tuan Antonius Ketut Dwirianto selaku Direktur

Susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut ;

- Tuan nelson Tampubolon selaku Presiden Komisaris/ Komisaris Independen
- Tuan Lintang Nugroho selaku Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen
- Tuan Johnny selaku Komisaris
- Tuan Chandra Rahardja Gunawan selaku Komisaris

	<ul style="list-style-type: none"> - Tuan Gregory James Terry selaku Komisaris - Tuan Doctorandus Haji Riyanto selaku Komisaris Independen <p>3. Memberikan kewenangan dan kuasa penuh dengan hal substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam mata acara rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas</p>						
Realisasi	2021						
Mata Acara Ke-enam Pengkinian Rencana Aksi (Action Plan) Perseroan							
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Nihil							
Hasil Pemungutan Suara	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Setuju</td> <td>Abstain</td> <td>Tidak Setuju</td> </tr> <tr> <td>99,518%</td> <td>0,482%</td> <td></td> </tr> </table>	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	99,518%	0,482%	
Setuju	Abstain	Tidak Setuju					
99,518%	0,482%						
Keputusan Rapat	Direksi Perseroan meminta persetujuan untuk melakukan atas treshold Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan sehubungan dengan adanya krisis ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19, dan selanjutnya rapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk mengesahkan perubahan treshold recovery plan dimaksud.						
Realisasi	2021						
Mata Acara Ketujuh Perubahan Anggaran Dasar Perseroan							
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya Nihil							
Hasil Pemungutan Suara	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Setuju</td> <td>Abstain</td> <td>Tidak Setuju</td> </tr> <tr> <td>98,739%</td> <td></td> <td>1,261%</td> </tr> </table>	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	98,739%		1,261%
Setuju	Abstain	Tidak Setuju					
98,739%		1,261%					
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya untuk disesuaikan dengan POJK 15/20 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK 16/20 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik sebagaimana terlampir dalam minuta Rapat dan dengan demikian merubah pasal 4 ayat 3 sampai pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan 2. Memberikan kuasa kepada Direksi perseroan untuk ; <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan diantaranya untuk disesuaikan dengan POJK 15/20 dan POJK 16/20; serta b. Menyatakan keputusan mata acara ke tujuh rapat ini dan rumusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan notaris, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan 						
Realisasi	2021						

RUPS yang dilaksanakan setelah akhir tahun buku 2021

Setelah berakhirnya tahun buku 2021, dan dalam proses penyusunan Laporan ini, PaninBank belum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham kembali. PaninBank tetap akan memperhatikan ketentuan terkait pengadaaan Rapat Umum Pemegang Saham, dimana pelaksanaan RUPS tahunan selambat lambatnya akan dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Resolusi Tertunda Dalam RUPS

Pada tahun 2020 PaninBank mengadakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 26 Juni 2020. Seluruh agenda pada RUPS Tahunan tersebut telah terealisasi sehingga tidak ada resolusi tertunda dalam RUPS Tahunan 2021.

Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya dan Realisasinya

I. RUPS Tahunan Tanggal 26 Juni 2020

Mata Acara	Hasil Keputusan RUPS 2019	Status	
		Terealisasi	Belum Terealisasi (Alasan)
Pertama	<p>1. Menyetujui Laporan Tahunan PaninBank mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha PaninBank, yang antara lain memuat Laporan Keuangan PaninBank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (<i>member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited</i>) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: 00036/2.1265/AU.1/07/0849-1/1/II/2020 tanggal 25 Februari 2020, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, dimana di dalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama PaninBank (“Laporan Keuangan”) serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan.</p> <p>2. Menyetujui Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi PaninBank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PaninBank atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dan/atau dalam Laporan Tahunan PaninBank..</p>	Ya	
Ke dua	Menyetujui dari keuntungan tahun buku 2019 berupa laba bersih sebesar Rp. 3.065.171.250.711,14 seluruhnya akan	Ya	

	dihgunakan untuk memperkuat modal inti PaninBank dalam rangka pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat sebagai Laba yang Ditahan		
Ke tiga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 sebesar Rp.3.769.000.000,-. 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris PaninBank untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi PaninBank untuk tahun buku 2020. 3. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian. 	Ya	
Ke empat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi PaninBank untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi PaninBank 2. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian 	Ya	
Ke lima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Elisabeth Imelda & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan ijin yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2020 dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Adapun Kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha PaninBank. - Memiliki reputasi sebagai Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Terbuka. - Independen. 2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris PaninBank untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. 3. Dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di OJK. 	Ya	

Ke enam	<p>1. Menerima Pengunduran Diri :</p> <p>a Wanita Roosniati Salihin selaku Wakil Presiden Direktur dengan surat tertanggal 23 Juni 2020</p> <p>b Tuan H Ahmad Hidayat selaku Direktur dengan surat tertanggal 23 Juni 2020</p> <p>Terhitung sejak ditutupnya Rapat</p> <p>2. Mengangkat Tuan Haryono Wongsonegoro* dan Nyonya Marlina Gunawan* selaku Direktur Perseroan.</p> <p>3. Mengangkat :</p> <p>a Tuan Nelson Tampubolon selaku Presiden Komisaris/ Komisaris Independen*</p> <p>b Tuan Lintang Nugroho selaku Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen</p> <p>c Tuan Johnny selaku Wakil Presiden Komisaris*</p> <p>d Tuan Chandra Rahardja Gunawan selaku Wakil Presiden Komisaris*</p> <p>e Tuan Gregory James Terry selaku Komisaris*</p> <p>f Tuan Drs.H. Riyanto selaku Komisaris Independen</p> <p>*) efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK</p> <p>Susunan pengurus Direksi sesuai dengan Surat OJK No S-I/PB.33/2021 tanggal 8 Januari 2021 perihal Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT BankPanin Tbk. menjadi sebagai berikut :</p> <p><u>Direksi :</u></p> <p>Presiden Direktur : Herwidayatmo</p> <p>Wakil Presiden Direktur : Hendrawan Danusaputra</p> <p>Direktur : Edy Haryanto</p> <p>Direktur : Januar Hardi</p> <p>Direktur : Haryono Wongsonegoro</p> <p>Direktur : Gunawan Santoso</p> <p>Direktur : Ng Kean Yik</p> <p>Direktur : Suwito Tjokrorahardjo</p> <p>Direktur : Lionto Gunawan</p> <p>Direktur : Antonius Ketut Dwirianto</p> <p><u>Komisaris :</u></p> <p>Presiden Komisaris (Independen): Nelson Tampubolon</p> <p>Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Lintang Nugroho</p> <p>Komisaris (Independen) : Drs.H.Riyanto</p> <p>Komisaris : Chandra Rahardja Gunawan</p> <p>Komisaris : Johnny</p> <p>Komisaris : Gregory James Terry</p> <p>4. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi PaninBank baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama</p>	Ya	
----------------	---	----	--

	untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi PaninBank tersebut dalam akta notaris, dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas		
Ke tujuh	Sehubungan dengan penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disampaikan melalui surat No. SR-32/D.03/2016 tanggal 11 Februari 2016 juncto SR-33/PB.33/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Penetapan Status Systematical Importan Bank (SIB) dan Kewajiban Pemenuhan <i>Capital Surcharge</i> kepada Panin Bank dan adanya kewajiban untuk melakukan pengkinian <i>Recovery Plan</i> minimal 1 (satu) kali dalam setahun, ; Mnyetujui Pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i> Panin Bank sesuai dengan Lampiran akta Beritas Acara Rapat ini	Ya	

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ utama Perseroan yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan lain yang dimiliki oleh Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan Anggaran Dasar PaninBank.

Dewan Komisaris juga bertanggung jawab dalam hal mengawasi beberapa kebijakan Bank terhadap operasional Bank secara umum yang mengacu kepada penerapan strategi dan rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris, dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Dewan Komisaris PaninBank mengacu kepada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Edaran OJK, Peraturan Bank Indonesia (BI) dan Surat Edaran BI terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan;
3. Anggaran Dasar Bank;

Tugas dan Tanggung Jawab Kolektif oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris

1. Meyakini bahwa Bank telah mempertimbangkan kepentingan dari Pemegang Saham, Nasabah, dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan;
2. Memastikan bahwa Komite-komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif;
3. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan perundangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.;
4. Mengkaji usulan Direksi atas Rencana Korporasi, Rencana Bisnis, dan Anggaran Tahunan Bank;
5. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank, dan segera melaporkan kepada RUPS apabila Bank menunjukkan gejala kemunduran yang signifikan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
6. Turut serta dalam rapat atau pembahasan terkait dengan kesehatan Bank dan pengelolaan aset dan liabilitasnya tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan maupun mempengaruhi keputusan Manajemen;
7. Memberikan persetujuan atas pengelolaan dana cadangan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar;
8. Memberikan persetujuan tertulis atau surat-surat persetujuan terkait untuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Direksi yang melampaui wewenang;
9. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan secara berkesinambungan termasuk mengikuti *training*;
10. Menetapkan kriteria *Self Assessment* dan *Key Performance Indicator* (KPI) bagi Komite-komite Dewan Komisaris dan Direksi;
11. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Direksi dan Komite-komite Dewan Komisaris secara berkala;
12. Menelaah laporan pertanggungjawaban dari masing-masing Komite Dewan Komisaris;
13. Menelaah Laporan Tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut, sebelum diserahkan kepada RUPS terutama pengungkapan-pengungkapan yang diwajibkan;
14. Melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku sebagai berikut ;
 - a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor di PaninBank dan perusahaan lain yang berkedudukan di Republik Indonesia maupun di luar negeri;
 - b. Hubungan keuangan, pengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham;
 - c. Ada atau tidak ada benturan kepentingan serta intervensi Pemilik Bank dalam pelaksanaan pengawasan;
 - d. Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima dari bank;
 - e. Kepemilikan *Share Option* yang mencakup informasi sebagai berikut ;
 - i. Kebijakan pengalokasian *Share Option*;

- ii. Jumlah saham yang sebelumnya telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris sebelum menerima *Share Option*;
 - iii. Jumlah *Share Option* yang diberikan;
 - iv. Jumlah *Share Option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir periode pelaporan;
 - v. Harga *Share Option* yang diberikan, dan
 - vi. Jangka waktu atau masa berlaku eksekusi *Share Option*.
15. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
16. Mengevaluasi permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan pengawasan Dewan Komisaris;
17. Meyakini Direksi telah berupaya menumbuhkan budaya manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian intern dan anti fraud.

Tugas dan Wewenang Anggota Dewan Komisaris

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar PaninBank berikut perubahan perubahannya, wewenang yang diberikan oleh RUPS, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan-ketentuan lain adalah sebagai berikut ;

1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan wewenang utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta penerapan wewenang Direksi dalam menjalankan bank tanpa harus terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank;
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Bank. pengawasan dan penyusunan rekomendasi bagi Direksi dapat dilakukan dengan cara rapat Dewan Komisaris maupun dalam rapat gabungan dengan Direksi;
3. Dewan Komisaris wajib melaporkan hasil pengawasannya tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penemuan apabila dalam pelaksanaan pengawasan dijumpai ;
 - b. Pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang keuangan perbankan dan/atau;
 - c. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

Pelaporan sebagaimana maksud diatas dilakukan apabila temuan tersebut belum dan atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/atau Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
4. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali ;
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum;
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan

perundangan yang berlaku.

5. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat serta mengambil keputusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Uraian Tanggungjawab Dewan Komisaris

1. Mengawasi dan memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, serta memberikan nasehat/ arahan kepada seluruh Direksi;
3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank;
4. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas jumlah yang ditentukan serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau perundang undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan;
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pengungkapan mengenai *Board Charter* (Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris)

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (revisi terakhir 20 Desember 2021). Berikut adalah Tujuan dan Ruang Lingkup Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris:

1. Tujuan
Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman ini juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Dewan Komisaris.
2. Ruang Lingkup
Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris (revisi 20 Desember 2021) mencakup mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, dan masa jabatan), Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang, Penyelenggaraan Rapat, Penilaian Kinerja dan Standar Etika.

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

1. Posisi akhir Desember 2021, anggota Dewan Komisaris berjumlah 6 (enam) orang yaitu yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris (Independen), 1 (satu) orang Wakil Presiden Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris.
2. Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi GCG yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta paling kurang 50% (lima puluh persen) merupakan Komisaris Independen.

3. Enam Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus *Fit & Proper Test*.

Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari OJK, mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Susunan Anggota Dewan Komisaris PaninBank Awal Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Jabatan	Domisili
1	Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris (Independen)	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Juni 2020.	2020 sampai dengan saat ini	Indonesia
2	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 2 September 2014.	2014 sampai dengan saat ini	Indonesia
3	Chandra Rahardja Gunawan	Komisaris	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Mei 2018.	2019 sampai dengan saat ini	Indonesia
4	Drs. H.Riyanto	Komisaris (Independen)	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Juni 2004	2004 sampai dengan saat ini	Indonesia
5	Johnny	Komisaris	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Juni 2021.	2021 sampai dengan saat ini	Indonesia
6	Gregory James Terry	Komisaris	Rapat Umum Pemegang Saham 26 Juni 2020	2020 sampai dengan saat ini	Australi

Susunan Anggota Dewan Komisaris PaninBank akhir Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Jabatan	Domisili
1	Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris (Independen)	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Juni 2020.	2020 sampai dengan saat ini	Indonesia
2	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 2 September 2014.	2014 sampai dengan saat ini	Indonesia
3	Chandra Rahardja Gunawan	Komisaris	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Mei 2018.	2019 sampai dengan saat ini	Indonesia
4	Drs. H.Riyanto	Komisaris (Independen)	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Juni 2004	2004 sampai dengan saat ini	Indonesia

5	Johnny	Komisaris	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Juni 2021.	2021 sampai dengan saat ini	Indonesia
6	Gregory James Terry	Komisaris	Rapat Umum Pemegang Saham 26 Juni 2020	2020 sampai dengan saat ini	Australi

Profil Anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Pengalaman Kerja
<p>Nelson Tampubolon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan : WNI • Domisili : Jakarta • Balige, 12 Januari 1954 (68 Tahun) • Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> ○ Fakultas Ekonomi, Universitas Parahyangan ○ Arthur D. Little Management Institute, Boston 	<p>Presiden Komisaris Independen sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Panin tanggal 26 Juni 2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT MNC Capital Indonesia • Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan • Anggota Dewan Komisiner ex officio OJK pada Lembaga Penjamin Simpanan • Direktur Direktorat International Bank Indonesia
<p>Chandra Rahardja Gunawan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan: WNI • Domisili : Jakarta • Jember, 05 Februari 1959 (63 Tahun) • Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> Business Administration, University of San Francisco, Amerika Serikat 	<p>Komisaris sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Panin tanggal. 21 Mei 2018.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PaninBank. • Wakil Presiden Direktur PaninBank. • Vice President Chase Manhattan Bank
<p>Lintang Nugroho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan: WNI • Domisili : Jakarta • Yogyakarta, 23 Juli 1956 (65 Tahun) • Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> ○ International Trade & Business di UCLA – LA, CA, USA ○ Executive Management Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA, USA ○ Manajemen Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA, USA 	<p>Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen, sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Panin tanggal 2 September 2014.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Komisaris PaninBank • Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah • Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero. • Direktur Operasi & IT • Komisaris PT Bank Shinta Indonesia • Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi • Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia. • Kepala Divisi Operasi PT Bank Niaga
<p>Johnny</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan : WNI • Domisili : Jakarta 	<p>Komisaris sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin tgl. 9 Juni 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Komisaris PaninBank. • Direktur Tresuri PaninBank • Asisten Manajer PaninBank

<ul style="list-style-type: none"> • Tanjung Pinang, 20 Agustus 1953 (69 Tahun) • Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> ○ Akademi Bank Nasional Jurusan Ilmu Keuangan Perbankan ○ Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia 		
<p>Drs. H. Riyanto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan: WNI • Domisili : Jakarta • Pemalang, 11 Nopember 1945 (76 Tahun) • Pendidikan : Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada 	<p>Komisaris Independen, sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Panin tanggal 22 Juni 2004.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PaninBank • Komisaris di PT Bank Mitra Niaga • Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia • Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik • Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan
<p>Gregory James Terry</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan: Australia • Domisili : Jakarta Melbourne, 09 Desember 1944 (77 Tahun) • Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> ○ Fakultas Hukum, University of Melbourne ○ Master of Arts, Tuft University Boston 	<p>Komisaris , sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Panin tanggal 26 Juni 2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penasehat (Advisor) Aquila Healthcare Ltd. Hongkong. • Wakil Ketua Eksekutif (Executive Vice Chairman) JM Financial Limited. • General Counsel, Chief – Operating Officer and Chairman, South East Asia at Morgan Stanley Asia. • Managing Director at Brierley Investments Limited • Country Manager Credit Suisse Bank, Australia. • Director & Vice Chairman, Pacific Region, CSFB of Jardine Fleming Investment Bank. • Diplomat in the Department of Foreign Affair – Australia.

Pembagian tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris (Independen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meyakini Kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang undangan yang berlaku; 2. Melakukan tindakan untuk kepentingan Bank sesuai dengan cakupan tugas Komisaris berdasarkan aturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada RUPS.; 3. Meyakini penetapan batas tanggung jawab dan wewenang Direksi dan seluruh fungsi kontrol yang ada dalam struktur organisasi Bank telah sesuai dengan tata kelola perusahaan yang efektif; 4. Memastikan bahwa usulan para Pemegang Saham yang dianggap berkaitan dengan kepentingan Bank telah

			<p>diangkat sebagai mata agenda RUPS.;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Memastikan bahwa semua hasil temuan pemeriksaan baik oleh Auditor Eksternal, Auditor Internal maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas lainnya telah ditindaklanjuti oleh Direksi sesuai dengan komitmen yang telah disepakati; 6. Memimpin Komite Audit; 7. Memimpin Komite Tata Kelola Terintegrasi; 8. Anggota Komite Numerasi dan Nominasi; 9. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh anggota Dewan Komisaris; 10. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Presiden Direktur, Direktur yang membawahkan SDM dan Direktur yang membawahi Kepatuhan
2	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Meyakini kepatuhan atas keterbukaan informasi yang perlu diungkapkan pada Laporan Pelaksanaan GCG.; 3. Memastikan Bank telah menyampaikan laporan-laporan sebagaimana diwajibkan oleh Otoritas Jsa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia serta Regulator lainnya; 4. Memastikan program dan pelaksanaan pengembangan pengetahuan dan keahlian bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi; 5. Memimpin Komite Pemantau Risiko; 6. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi; 7. Anggota Komite Audit; 8. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Wakil Presiden Direktur, Direktur yang membawahkan Digital Banking dan Direktur yang membawahkan Operasional dan Teknologi Informasi;
3	Chandra Rahardja Gunawan	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meyakini bahwa Manajemen telah secara berkesinambungan mengkomunikasikan pentingnya manajemen risiko, pengendalian internal, nilai-nilai perusahaan serta penerapan nilai-nilai etika dan integritas; 2. Memantau efektivitas pengelolaan manajemen risiko dan pengendalian internal serta pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) yang diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 3. Mengevaluasi serta memantau seluruh risiko yang material dan memastikan bahwa telah terdapat langkah-langkah perbaikan yang diambil sehubungan dengan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud; 4. Mengevaluasi dan memonitor penanganan hal-hal yang terkait dengan masalah hukum dan kepatuhan yang dihadapi bank; 5. Anggota Komite Pemantau Risiko; 6. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Direktur yang membawahkan kegiatan perkreditan.

4	Drs H. Riyanto	Komisaris (Independen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi implementasi dan pencapaian Rencana Korporasi, Rencana Bisnis serta Penyerapan Anggaran Tahunan Bank; 2. Mengusulkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan kepada RUPS.; 3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit laporan keuangan dan audit internal Bank; 4. Meyakini bahwa desain dan pelaksanaan system remunerasi dan kompensasi bank telah mempertimbangkan manajemen risiko serta sesuai dengan tujuan bank; 5. Memimpin Komite Nominasi dan Remunerasi; 6. Anggota Komite Audit 7. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Direktur yang membawahkan kegiatan jaringan dan distribusi serta Direktur yang membawahkan kegiatan administrasi keuangan.
5	Johnny	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan manajemen risiko yang diterapkan; 2. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan; 3. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko serta memberikan arahan mengenai langkah-langkah perbaikan atas penerapan kebijakan manajemen risiko secara berkala guna memastikan bahwa Direksi telah menjalankan pengelolaan yang efektif atas kegiatan dan risiko-risiko bank; 4. Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan tugas manajemen yang terkait dengan menjaga reputasi bank; 5. Anggota Komite Pemantau Risiko; 6. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi; 7. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan kegiatan Treasury.
6	Gregory James Terry	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan tugas Komisaris pada umumnya, mewakili kepentingan Pemegang Saham Pengendali Votrant; 2. Anggota Komite Pemantau Risiko; 3. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Direktur yang membawahkan kegiatan manajemen risiko

- **Fungsi pengawasan kepada Direksi dilakukan dengan membagi tugas masing-masing anggota Komisaris per Bidang Direksi yang dilakukan secara berkala**

Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, komposisi Komisaris Independen minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan komisaris. Per 31 Desember 2021, PaninBank memiliki 3 (tiga) Komisaris Independen dari total 6 (enam) anggota Dewan Komisaris atau setara dengan 50%

(lima puluh persen). Seluruh Komisaris Independen PaninBank telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Komisaris Independen serta diangkat berdasarkan persetujuan RUPS. Dengan demikian, komposisi Komisaris Independen PaninBank telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pernyataan Independensi masing-masing Komisaris Independen

Sesuai ketentuan POJK Nomor 33/POJK.04/2014, Lintang Nugroho serta Riyanto telah menyampaikan pernyataan independensi beliau pada RUPST 26 Juni 2020. Pernyataan independensi tersebut sehubungan dengan pengangkatan beliau sebagai Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode, terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2022.

Independensi atau Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas sesuai dengan yang ditetapkan Anggaran Dasar dan ketentuan/ peraturan yang berlaku serta tidak ikut dalam kegiatan operasional. Untuk Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode, telah membuat pernyataan independensi.

Tiga Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan/ kepemilikan/ kepengurusan/ keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau PSP, Lintang Nugroho dengan Drs. H. Riyanto telah membuat surat pernyataan independen terkait dengan masa jabatan lebih dari 2 (dua) periode dan 1 (satu) anggota Komisaris, Chandra Rahardja Gunawan mempunyai hubungan keluarga dengan PSP dan 1 (satu) anggota Direksi.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Nelson Tampubolon		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Lintang Nugroho		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Chandra R. Gunawan		✓		✓		✓		✓	✓		✓	
Johnny		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Drs. H. Riyanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Gregory James Terry		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Pada Posisi 31 Desember 2021, 5 anggota Komisaris yang telah efektif tidak memiliki saham pada perusahaan lain, sedangkan hanya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham pada perusahaan lain.

Rincian kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Nama	Kepemilikan Saham Yang Mencapai 5% Atau Lebih			
		Bank Panin	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lainnya
1.	Nelson Tampubolon	-	-	-	-
2	Lintang Nugroho	-	-	-	-
3	Chandra R. Gunawan	-	-	-	-
4	Johnny	-	9.35%	86%	10%
5	Drs. H. Riyanto	-	-	-	-
6	Gregory James Terry	-	-	-	-

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan bukan Bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diperkenankan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan PaninBank dengan kepentingan perorangan, anggota Dewan Komisaris, Direksi

maupun karyawan PaninBank yang menyebabkannya tidak dapat bertindak secara independen dan obyektif.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tiap individu di PaninBank harus senantiasa mendahulukan kepentingan PaninBank di atas kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lainnya. Di samping itu, setiap individu yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan harus membuat pernyataan bahwa individu yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya.

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan PaninBank atau mengurangi keuntungan PaninBank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan;
2. Dewan Komisaris wajib untuk membuat pernyataan, secara tahunan, mengenai ada atau tidak adanya benturan kepentingan dan tidak terdapat intervensi Pemilik Bank pada setiap keputusan yang telah diambil dan seluruh proses telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan PaninBank. Apabila Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan, Dewan Komisaris wajib menyatakan bahwa seluruh keputusan yang pernah diambilnya tetap obyektif, independen, dan tidak merugikan PaninBank. Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat benturan kepentingan oleh anggota Dewan Komisaris.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat Kepada Anggota Direksi

Pemberian saran/masukan/nasehat kepada Direksi disampaikan pada saat rapat gabungan yang dilakukan setiap triwulan dan melalui memorandum.

Pengungkapan Kebijakan Perusahaan dan Pelaksanaannya

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bank Panin Tbk. dan Undang-undang Perseroan Terbatas, diantaranya sebagai berikut :

1. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai Perusahaan.
2. Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi.
3. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
4. Menyetujui beberapa kebijakan perusahaan mengacu pada ketetapan otoritas yang berwenang.
5. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya.
7. Meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas.

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan dengan Direksi

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar PaninBank, rapat diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dalam rapat tersebut dapat mengundang Direksi. Rapat dikatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

Semua keputusan dalam rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak. Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Selama tahun 2021 telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali. Adapun pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris yaitu mengenai **Pengawasan Rencana Bisnis, Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Audit, Kegiatan Komite, Penerapan *Good Corporate Governance*, dan hal lainnya/current issue**, sedangkan dalam Rapat Gabungan dengan Direksi sebanyak 4 (empat) kali membahas mengenai **evaluasi/review pencapaian rencana bisnis, Branch Oversight dan hal-hal lain/current issue**.

Nama	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Gabungan	
	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Nelson Tampubolon	4 kali	100%	4 kali	100%
Drs. H. Riyanto	4 kali	100%	4 kali	100%
Johnny	2 kali	50%	4 kali	100%
Lintang Nugroho	4 kali	100%	4 kali	100%
Chandra R. Gunawan	4 kali	100%	4 kali	100%
Gregory James Terry	4 kali	100%	4 kali	100%

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2021 Agenda Rapat Dewan Komisaris membahas hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan Rencana Bisnis
2. Pengawasan Tindak Lanjut Audit
3. Kegiatan Komite
4. Penerapan GCG
5. APU PPT
6. Hal-hal lain/ *current issue*

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Tanggal	Agenda
1	20 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none">- Update Progress Digital Banking Roadmap- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya- <i>Branch Oversight</i>
2	19 April 2021	<ul style="list-style-type: none">- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya- <i>Branch Oversight</i>- Lain-lain
3	23 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none">- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya- <i>Branch Oversight</i>- Issue-issue Strategis - Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan OJK- Lain-lain
4	15 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none">- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya- Kinerja Anak Perusahaan- Pemantauan Recovery Plan- Update Progress Digital Banking (E-Cash Panin)- Rencana Tindak Lanjut Kantor Cabang Rugi (Network & Distribution)- Lain-lain

Keputusan rapat tahun sebelumnya dan realisasinya tahun ini

Keputusan rapat Dewan Komisaris selalu dipantau dan secara umum telah ditindaklanjuti.

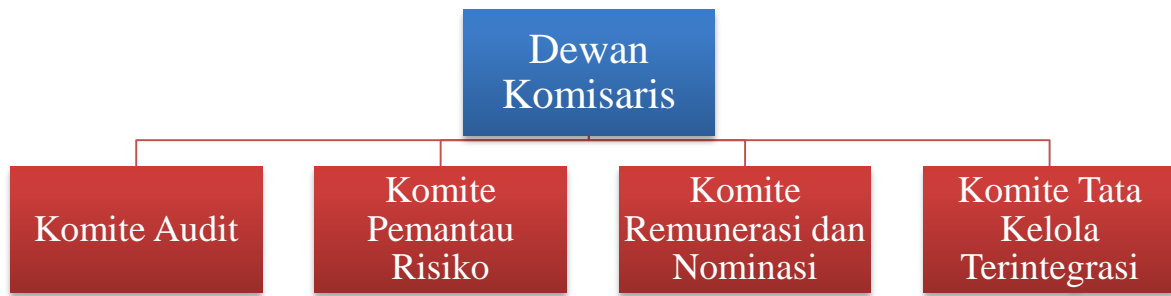
Pelatihan Dewan Komisaris

Program pelatihan Dewan Komisaris diperlukan agar Anggota Dewan Komisaris dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah mengikuti *training* sebagai berikut:

- Bank Risk Management Refreshment,*
- Efektivitas Pengawasan Dekom Dalam Menjaga Kepatuhan Bank
- Masa Depan Bank Digital di Indonesia
- Enhanced Auditor's Report and Key Audit Matters*

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Komite-komite dibawah Dewan Komisaris merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Sampai dengan Tahun 2021, PaninBank memiliki Komite-komite dibawah Dewan Komisaris sebagai berikut:



Penilaian terhadap kinerja Komite dibawah Dewan Komisaris

Adapun penilaian terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, meliputi ;

1. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite sudah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank dan anak perusahaan, serta telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh regulator.
2. Komite telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan pedoman internal Bank dan telah terlaksana secara efektif dan efisien.
3. Komite-komite telah berjalan efektif untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris pembentukannya sesuai dengan tujuan dan dasar pedoman, sebagai berikut :

KOMITE AUDIT

Komite Audit sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Dalam hal ini Komite Audit membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris berkaitan dengan pengawasan atas pengelolaan Bank oleh Direksi, melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan fungsi audit intern dan ekstern, kecukupan pengendalian intern pada proses pelaporan keuangan dan memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Tujuan Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk dengan SK Dewan Komisaris No.002/SK-DK/007 tanggal 21 Juni 2007 dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan tujuan untuk :

1. Membantu/mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Bank oleh Direksi;
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan fungsi audit intern dan ekstern,

- kecukupan pengendalian intern pada proses pelaporan keuangan;
3. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK, terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, Komite Audit, Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Strategi Anti-Fraud Bank Umum, Akuntan Publik, serta Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
2. Kebijakan Perusahaan Bank

Pedoman Komite Audit

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit terakhir dilakukan perubahan pada tanggal 15 Maret 2019, perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi adanya perubahan pada peraturan regulator terkait. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit antara lain mengatur mengenai organisasi, tugas dan tanggung jawab, etika kerja, waktu kerja, mekanisme rapat, dan Sistem Informasi Manajemen.

Kriteria Anggota Komite Audit

Mengacu kepada ketentuan regulator yang telah dipenuhi oleh PaninBank, anggota Komite Audit memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
2. Anggota Komite dari Pihak Independen memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan/atau akuntansi paling kurang 5 (lima) tahun, dan di bidang hukum dan/atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun.
3. Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite.
4. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.
5. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Kualifikasi dan Sertifikasi Anggota Komite Audit

Anggota Komite Audit wajib memenuhi kualifikasi dan sertifikasi yang terdiri dari :

1. Anggota Komite wajib memiliki integrasi yang tinggi, akhlak, dan moral yang baik.
2. Anggota Komite memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) serta Undang-undang Republik Indonesia maupun peraturan lainnya yang terkait.
3. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian keuangan atau akuntansi memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi dari

hasil evaluasi sekurang-kurangnya pada area; pekerjaan audit intern dan ekstern; Laporan Keuangan; Pengendalian Intern; dan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

4. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan atau hukum, memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi sekurang-kurangnya pada area: Operasional Bank, Rencana Bisnis dan Pengembangan Bank.

Independensi Anggota Komite Audit

Mayoritas anggota Komite Audit berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Komite Audit dalam melaksanakan tugas tidak mencampuri dalam operasional.

Uraian Tugas dan Tanggungjawab

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap ;
 - a) Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Satuan Kerja Audit Internal;

Kewenangan Komite Audit

Adapun kewenangan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Mem peroleh akses secara penuh terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya,
2. Mem peroleh akses untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan Karyawan Bank, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntansi maupun pihak-pihak intern dan ekstern lainnya terkait tugas dan tanggung jawab Komite PaninBank,
3. Menugaskan tenaga profesional untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik, bilamana dipandang perlu, dengan beban Bank. Penugasan tenaga profesional ini wajib

- dilaksanakan sesuai dengan peraturan internal Bank dan dengan dasar penugasan yang jelas dalam hal jangka waktu, kompensasi maupun tugas dan tanggung jawabnya,
4. Memiliki waktu untuk mendiskusikan pelaksanaan tugas audit intern dan ekstern tanpa kehadiran manajemen. Hal ini termasuk memantau pelaksanaan pengendalian intern, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Manajemen Risiko,
 5. Memiliki garis fungsional dengan SKAI sehingga dapat berkomunikasi langsung dengan SKAI.

Pelaksanaan Program Kerja Komite Audit

Program Kerja Komite Audit selama Tahun 2021 yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1. Memantau hasil sementara pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Bank Panin, Tbk posisi 31 Desember 2020 oleh Imelda & Rekan (Delloite).
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Panin tahun buku 2020 oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
3. Review atas Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit
4. Review atas Pengkinian Piagam Audit Internal
5. Melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baik dari Satuan Kerja Audit Internal tahun 2021 sebanyak 65 LHP, yaitu ;
 - a. LHP- Umum : 57 LHP
 - b. LHP Khusus (Investigasi) : 8 LHP
6. Monitoring tindak lanjut hasil temuan SKAI.
7. Memantau tindak lanjut hasil temuan KAP dan BI/OJK dan PPATK tahun 2020/2021
8. Monitoring *Management Action* (MA) selama tahun 2021
9. Evaluasi laporan kegiatan SKAI Cabang tahun 2021 (Triwulan IV 2020, Triwulan I, II dan III tahun 2021).
10. Evaluasi Laporan Pelaksanaan Penerapan Kebijakan Strategi Anti Fraud tahun 2021 (semester II-2020 dan semester I-2021)
11. Evaluasi Laporan Pengaduan Nasabah tahun 2021 (Triwulan IV-2020, Triwulan I, II dan III tahun 2021).
12. Memantau Laporan *Wistle Blowing System* (WBS) tahun 2021 (Triwulan IV-2020, Triwulan I, II dan III 2021).
13. Evaluasi atas Kinerja BPP tahun 2020
14. Merekomendasikan atas penunjukan AP dan KAP untuk audit posisi 31 Desember 2021 kepada Dewan Komisaris
15. Atas permintaan OJK, Komite Audit bekerja sama dengan BPP dan BMR melakukan review terhdap rencana pengembalian dana oleh Panin Financial Tbk. (PNLF) sehubungan dengan talangan pembayaran pengembalian dana Bancassurance yang dilakukan oleh Bank Panin kepada PT Asuransi Multi Artha Guna (AMAG)

Komposisi Anggota Komite Audit

Komite Audit terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:

Ketua : Nelson Tampubolon (Komisaris Independen)

Anggota :

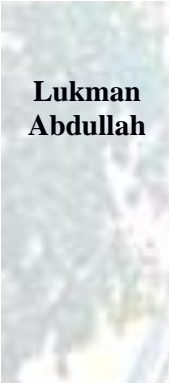

1. Drs. H. Riyanto (Komisaris Independen)
2. Lintang Nugroho (Komisaris Independen)
3. Lukman Abdullah (Pihak independen)
4. Bambang Setyoko (Pihak Independen)

Tabel Komposisi Anggota Komite Audit

Nama	Jabatan	Periode	Dasar Penunjukan	Warga Negara	Domisili
Nelson Tampubolon	Ketua Komite	2020 s/d saat ini	SK No. 010/SK-DIR/20 14-09-2020	WNI	Jakarta
Drs. H. Riyanto	Anggota Komite	2020 s/d saat ini	SK No. 010/SK-DIR/20 14-09-2020	WNI	Jakarta
Lintang Nugroho	Anggota Komite	2020 s/d saat ini	SK No. 010/SK-DIR/20 14-09-2020	WNI	Jakarta
Lukman Abdullah	Anggota Komite	2020 s/d saat ini	SK No. 010/SK-DIR/20 14-09-2020	WNI	Jakarta
Bambang Setyoko	Anggota Komite	2020 s/d saat ini	SK No. 010/SK-DIR/20 14-09-2020	WNI	Jakarta

Profil Anggota Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Nelson Tampubolon	Ketua Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Fakultas Ekonomi, Universitas Parahyangan • Arthur D. Little Management Institute, Boston 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT MNC Capital Indonesia • Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan • Anggota Dewan Komisiner ex officio OJK pada Lembaga Penjamin Simpanan • Direktur Direktorat International Bank Indonesia
Drs. H. Riyanto	Anggota Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PaninBank • Komisaris di PT Bank Mitra Niaga • Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia • Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik • Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan
Lintang Nugroho	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • International Trade & Business di UCLA – LA, CA, USA • Executive Management Development Program, University 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Komisaris PaninBank • Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah • Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero • Direktur Operasi & IT

		<p>of Southern California Los Angeles, CA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PT Bank Shinta Indonesia • Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi • Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia • Kepala Divisi Operasi PT Bank Niaga
 <p>Lukman Abdullah</p>	<p>Anggota Komite</p>	<p>Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Bank Panin Anggota Komite Audit & Anggota Komite Pemantau Risiko • PT. Multi Artha Guna, Komisaris Independen. • PT. Panin Insurance, Komisaris Independen • PT. Clipan Finance Indonesia, Komisaris Independen • PT. Asuransi Ramayana, Anggota Komite Audit • KAP Drs. Hans Tuannakotta & Mustofa, Partner • KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Manager • KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Supervisor
 <p>Bambang Setyoko</p>	<p>Anggota Komite</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Akademi Uang dan Bank Yogyakarta thn.1978. • Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK Jakarta thn.2005. <p>Jurusan : Ekonomi Manajemen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2020 – sekarang PT. Bank Panin Tbk. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. • 2019 – sekarang PT. Bank JTrust Indonesia Tbk., anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko. • 2018 – PT. Panin Dubai Syariah Bank Tbk. • 2014 – 2018 PT. Resona Bank Perdania, anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko. • Bank Indonesia selama 34 thn. diberbagai satuan kerja dalam negeri dan luar negeri. Pensiun tahun 2013 dengan posisi Asisten Direktur.

Temuan Komite Audit dan Penindaklanjutannya

Hasil temuan pemeriksaan Audit Intern, KAP, OJK dan otoritas lainnya dipantau tindak lanjutnya dan dituangkan dalam risalah rapat Komite

Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit dengan Komisaris 2 (dua) kali, dengan Presiden Direktur dan SPI sebanyak 2 (dua) kali, dan rapat dengan SPI sebanyak 5 (lima) kali. :

No.	Nama	Rapat Komite Audit	
		Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
1.	Nelson Tampubolon*	5	100%
2	Drs. H. Riyanto	5	100%
3.	Lintang Nugroho	5	100%
4.	Lukman Abdullah	5	100%
5	Bambang Setyoko	3	60%

Tabel Rapat Komite Audit

No	Tanggal	Pembahasan
1	19/02/2021	Periode Triwulan IV – 2020, meliputi ; 1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP 2. Perkembangan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan 3. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), Pengaduan Nasabah, Strategi Anti Fraud dan lain-lain
2	19/05/2021	Periode Triwulan I-2021, meliputi ; 1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP 2. Perkembangan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan 3. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), Pengaduan Nasabah, Strategi Anti Fraud dan lain-lain
3	16/08/2021	Periode Triwulan II-2021, meliputi ; 1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP 2. Perkembangan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan 3. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), Pengaduan Nasabah, Strategi Anti Fraud dan lain-lain
4	22/09/2021	Pembahasan rekomendasi penunjukan AP dan KAP untuk Audit Laporan Keuangan Tahun posisi 31 Desember 2021 untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris
5	15/11/2021	Periode Triwulan III -2021, meliputi ; 1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP 2. Perkembangan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan 3. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), Pengaduan Nasabah, Strategi Anti Fraud dan lain-lain

Tabel Rapat Koordinasi Komite Audit

No	Tanggal	Pihak Ketiga	Pembahasan
1	18/01/2021	BPP & BCO	Hasil join Audit BI-PPATK terkait APU PPT
2	10/02/2021	KAP Imelda & Rekan (Deloitte), virtual meeting	Pengunduran jadwal Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan (general Audit) per 31 Desember 2020
3	19/02/2021	KAP Imelda & Rekan (Deloitte), virtual meeting	Draft final Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 PT Bank Panin Tbk.
4	12/03/2021	KAP Imelda & Rekan	Final Laporan Keuangan per 31

		(Deloitte), virtual meeting	Desember 2020 PT Bank Panin Tbk.
5	12/03/2021	SKAI/BPP	Temuan Delloit Audit 31 Desember 2020, antara lain ; Fraud di KCU Sumedang, Aset Panin di atas tanah milik DKI
6	19/05/2021	SKAI/BPP	Progress aktivitas fungsi Pengawasan dan rencana pengajuan Revisi RKAT 2021
7	1/11/2021	KAP Imelda & Rekan (Deloitte), virtual meeting	Rencana Pemeriksaan Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 PT Bank Panin
8	8/11/2021	BPP & BMR	Review atas rencana pengembalian dana oleh PNLF ke Bank Panin atas permintaan OJK
9	16/12/2021	KAP Imelda & Rekan (Deloitte), virtual meeting	Fraud Inquir
10	23/12/2021	BPP	Rencana Kerja Audit Tahunan Tahun 2022

Pelatihan Anggota Komite Audit

Program pelatihan Anggota Komite Audit diperlukan agar Anggota Komite Audit dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Komite Audit. Sepanjang tahun 2021, kegiatan pelatihan sebagai berikut :

Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Nama Peserta
Bank Risk Management Refreshment	<i>Rahardja Duta Solusindo</i>	21/02/2021	Indonesia	Seluruh Anggota
<i>Efektifitas Pengawasan Dewan Komisaris Dalam Menjaga Kepatuhan Bank untuk menuju Era Pengaturan Principle</i>	<i>Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan</i>	25/03/2021	Indonesia	Seluruh Anggota
<i>Masa Depan Bank Digital di Indonesia</i>	<i>Otoritas Jasa Keuangan</i>	14/10/2021	Indonesia	Seluruh Anggota
<i>Enhancer Auditor's Report and Key Audit Matters</i>	<i>Delloite Indonesia</i>	22/11/2021	Indonesia	Seluruh Anggota

Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja Tahun 2021

Pada 2021, Komite Audit telah menetapkan rencana kerja dengan memberikan prioritas strategis.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK, terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum, Strategi Anti-Fraud Bank Umum, serta Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
2. Kebijakan Perusahaan Bank

Tujuan Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Panin dibentuk berdasarkan Memorandum Dewan Komisaris No. 004/KOM/DIR/21 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko dalam rangka memenuhi ketentuan regulator, untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi.

Pedoman Komite Pemantau Risiko

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko terakhir dilakukan perubahan pada tanggal 22 Desember 2017, perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi adanya perubahan pada peraturan regulator terkait. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko antara lain mengatur mengenai organisasi, tugas dan tanggung jawab, etika kerja, waktu kerja, mekanisme rapat, dan Sistem Informasi Manajemen.

Kriteria Anggota Komite Pemantau Risiko

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai sehubungan dengan operasional perbankan, pengawasan dan manajemen risiko.
3. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian keuangan memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi atas penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya pada area risiko kredit, pasar dan likuiditas.
4. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi atas penerapan manajemen risiko bank sekurang-kurangnya pada area penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, risiko operasional, hukum, reputasi, *strategic* dan kepatuhan.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Ketua dan anggota Komite berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya,

Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Uraian Tugas dan Tanggungjawab

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko (MR) dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu:

Ketua : Lintang Nugroho

Anggota :

1. Chandra R Gunawan
2. Johnny
3. Gregory James Terry
4. Lukman Abdullah
5. Usep Ekadaya
6. Bambang Setyoko

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Lintang Nugroho	Ketua Komite	<ul style="list-style-type: none"> • International Trade & Business di UCLA – LA, CA, USA • Executive Management Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA • Manajemen Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Komisaris PaninBank • Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah • Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero. • Direktur Operasi & IT • Komisaris PT Bank Shinta Indonesia • Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi • Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia. • Kepala Divisi Operasi PT Bank Niaga
Chandra R Gunawan	Anggota Komite	Business Administration, University of San Francisco, Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PaninBank. • Wakil Presiden Direktur PaninBank. • Vice President Chase Manhattan Bank.
Johnny	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Akademi Bank Nasional Jurusan 	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Komisaris PaninBank. • Direktur Tresuri PaninBank

		<p>Ilmu Keuangan Perbankan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Asisten Manajer PaninBank
Gregory James Terry	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Fakultas Hukum, University of Melbourne • Master of Arts, Tuft University Chicago 	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Hukum Oentoeng Suria and Partners • Pejabat Eksekutif JM Financial Limited • General Counsel di Morgan Stanley untuk Asia • Direktur Operasional di Brierley Investments Limited • Country Manager Credit Suisse Bank, Austria • Jardine Fleming Investment Bank
Lukman Abdullah	Anggota Komite	<p>Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Bank Panin Anggota Komite Audit & Anggota Komite Pemantau Risiko. • PT. Multi Artha Guna, Komisaris Independen. • PT. Panin Insurance, Komisaris Independen • PT. Clipan Finance Indonesia, Komisaris Independen • PT. Asuransi Ramayana, Anggota Komite Audit • KAP Drs. Hans Tuannakotta & Mustofa, Partner • KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Manager • KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Supervisor
			<ul style="list-style-type: none"> • PT Bank Panin Tbk Staff Dewan Komisaris. • PT Bank Panin Tbk Biro Manajemen Risiko (BMR) Departemen Operational Risk & Others Risk (Manager/ Ka.Bag).
Usep Ekadaya	Anggota Komite	<p>Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PT Bank Panin Tbk, Biro Administrasi Keuangan (BAK)–Departemen Analisa Keuangan. • PT Bank Panin Tbk Biro Pengawasan dan Pemeriksaan (BPP)/ (internal Audit) – (Manager / Group Head Kantor Pusat & Jabodetabek). • Kantor Akuntan Publik–KPMG Indonesia (Klynveld Peat Marwick Goerdeler).

			<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).
Bambang Setyoko	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Akademi Uang dan Bank Yogyakarta thn.1978. • Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK Jakarta thn.2005. • Jurusan : Ekonomi Manajemen. 	<ul style="list-style-type: none"> • 2020 – sekarang PT. Bank Panin Tbk. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. • 2019 – sekarang PT. Bank Jtrust Indonesia Tbk., anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko. • 2018 – PT. Panin Dubai Syariah Bank Tbk. • 2014 – 2018 PT. Resona Bank Perdania, anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko. • Bank Indonesia selama 34 thn. Diberbagai satuan kerja dalam negeri dan luar negeri. Pensiun tahun 2013 dengan posisi Asisten Direktur.

Tabel Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Periode	Dasar Penunjukan	Kewarga negaraan	Domisili
Lintang Nugroho	Ketua Komite	Periode 2020 sd saat ini	003/SK-DIR/21, 25/02/2021	WNI	Jakarta
Chandra R Gunawan	Anggota Komite	Periode 2020 sd saat ini	003/SK-DIR/21, 25/02/2021	WNI	Jakarta
Johnny	Anggota Komite	Periode 2020 sd saat ini	003/SK-DIR/21, 25/02/2021	WNI	Jakarta
Gregory James Terry	Anggota Komite	Periode 2020 sd saat ini	003/SK-DIR/21, 25/02/2021	WNA	Jakarta
Lukman Abdullah	Anggota Komite	Periode 2020 sd saat ini	003/SK-DIR/21, 25/02/2021	WNI	Jakarta
Usep Ekadaya	Anggota Komite	Periode 2020 sd saat ini	003/SK-DIR/21, 25/02/2021	WNI	Jakarta
Bambang Setyoko	Anggota Komite	Periode 2020 sd saat ini	003/SK-DIR/21, 25/02/2021	WNI	Jakarta

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Ketua dan anggota Komite berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Pelaksanaan Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Program Kerja Komite Pemantau Risiko selama Tahun 2021 yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat dan Menyusun Laporan
 2. Melakukan evaluasi terhadap:
 - a. Laporan realisasi RBB Manajemen Risiko (MR) triwulan IV /2020 sampai dengan Triwulan triwulan III/2021 mengenai :
 - i. Tata Kelola Risiko
 - Sasaran strategi bisnis dan;
 - Penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*.
 - ii. Kerangka Manajemen Risiko:
 - Strategi Manajemen Risiko;
 - Kecukupan/pengembangan perangkat organisasi dan;
 - Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko.
 - iii. Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi Manajemen dan SDM
 - iv. Sistem pengendalian risiko
 - b. Penerapan/Kegiatan Manajemen Risiko setiap triwulan :
 - Biro Manajemen Risiko;
 - Komite Manajemen Risiko;
 - Laporan Profil Risiko;
 - Lain-lain (Produk Bank dan Implementasi/Pengembangan IT, Evaluasi Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah);
 - Evaluasi APU PPT (Bagian dari Risiko Kepatuhan).
Pengembangan SDM
- Anggota Dewan Komisaris dan atau Komite Pemantau Risiko mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh berbagai Institusi dengan berbagai topik, antara lain;

Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Nama Peserta
Bank Risk Management Refreshment	<i>Rahardja Duta Solusindo</i>	21/02/2021	Indonesia	Seluruh Anggota
<i>Efektifitas Pengawasan Dewan Komisaris Dalam Menjaga Kepatuhan Bank untuk menuju Era Pengaturan Principle</i>	<i>Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan</i>	25/03/2021	Indonesia	Seluruh Anggota
<i>Masa Depan Bank Digital di Indonesia</i>	<i>Otoritas Jasa Keuangan</i>	14/10/2021	Indonesia	Seluruh Anggota

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko dalam tahun 2021 sebanyak 4 (empat) kali dengan membahas Hasil Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas BMR, aktivitas KMR, profil risiko dan tingkat kesehatan bank.

Adapun frekuensi kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komite Pemantau Risiko	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Lintang Nugroho	4	100%
2.	Chandra R Gunawan	4	100%
3.	Johnny	3	75%
4.	Gregory James Terry	3	75%
5.	Lukman Abdullah	3	75%
6.	Usep Ekadaya	4	100%
7.	Bambang Setyoko	3	75%

Tabel Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Tanggal	Pembahasan
1	22 Februari 2021	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap : 1. Tindaklanjut rekomendasi Komite Pemantau Risiko 2. Kebijakan Manajemen Risiko 3. Kegiatan Manajemen Risiko 4. Profil Risiko 5. Lain-lain (Produk/Aktivitas Baru (PAB) & APU PPT)
2	21 Mei 2021	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap : 1. Tindaklanjut rekomendasi Komite Pemantau Risiko 2. Kebijakan Manajemen Risiko 3. Kegiatan Manajemen Risiko 4. Profil Risiko 5. Lain-lain (Produk/Aktivitas Baru (PAB) & APU PPT)
3	19 Agustus 2021	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap : 1. Tindaklanjut rekomendasi Komite Manajemen Risiko 2. Realisasi Rencana Bisnis Bank terkait dengan penerapan Manajemen Risiko 3. Profil Risiko 4. Lain-lain
4	19 November 2021	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap : 1. Tindaklanjut rekomendasi Komite Manajemen Risiko 2. Realisasi Rencana Bisnis Bank terkait dengan penerapan Manajemen Risiko 3. Profil Risiko 4. Lain-lain

Komite Pemantau Risiko juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi yaitu rapat dengan Biro Manajemen Risiko (BMR) dan Biro Compliance (BCO) sebanyak 2 (dua) kali dengan agenda pembahasan berupa perubahan risk appetite dan risk tolerance (5 April 2021) dan Profil risiko (*Inherent Risk*, *KPMR* dan *Composite Risk*) posisi triwulan I, II dan III tahun 2021 (1 September 2021)

Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko

Program pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko diperlukan agar anggota dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Pemantau Risiko. Sepanjang tahun 2021, pelatihan yang diikuti adalah sebagai berikut :

Workshop/Training/ Seminar	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Nama Peserta
Bank Risk Management Refreshment	<i>Rahardja Duta Solusindo</i>	21/02/2021	Indonesia	Seluruh Anggota
<i>Efektifitas Pengawasan Dewan Komisaris Dalam Menjaga Kepatuhan Bank untuk menuju Era Pengaturan Principle</i>	<i>Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan</i>	25/03/2021	Indonesia	Seluruh Anggota
<i>Masa Depan Bank Digital di Indonesia</i>	<i>Otoritas Jasa Keuangan</i>	14/10/2021	Indonesia	Seluruh Anggota

Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap implementasi kebijakan remunerasi dan nominasi serta kepegawaian oleh Direksi.

Tujuan Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Memenuhi ketentuan regulator yaitu POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Pasal 34 ayat 1.c dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dasar Hukum

PaninBank telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK, terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, Komite Remunerasi dan Nominasi, Tata Kelola Pemberian Remunerasi dan Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan kepada Pihak lain;
2. Kebijakan Pokok Perusahaan.

Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi terakhir dilakukan perubahan pada tanggal 22 Desember 2017, perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi adanya perubahan pada peraturan regulator terkait. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi mengatur antara lain mengenai Kewenangan, Kedudukan, Rapat, Kehadiran, serta Tugas dan Tanggung Jawab.

Kriteria Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik;
2. Memiliki pengetahuan yang memadai dalam melakukan analisis atas sistem remunerasi;
3. Memiliki pengetahuan mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia yang cukup serta mempunyai pengetahuan tentang peraturan-peraturan ketenagakerjaan;
4. Pihak internal Bank yang menjadi anggota Komite, yaitu Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia atau Perwakilan Karyawan, wajib memiliki pengetahuan terkait proses penghitungan remunerasi dan proses nominasi dan *succession plan* Bank.
5. Apabila Bank mengangkat anggota Komite dari Perwakilan Karyawan, maka perlu diyakini keterwakilan karyawan Bank oleh yang bersangkutan.

Uraian Tugas dan Tanggungjawab

1. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi :
 - a Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 - b Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, paling kurang wajib memperhatikan:
 - a Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - b Prestasi kerja individual.
 - c Kewajaran dengan *peer group*.
 - d Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

3. Terkait dengan kebijakan Nominasi:
 - a Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:

Ketua : Drs. H. Riyanto

- Anggota** :
1. Nelson Tampubolon
 2. Johnny
 3. Yusak Zefanya
 4. Akijat Lukito

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Drs. H. Riyanto	Ketua Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PaninBank • Komisaris di PT Bank Mitra Niaga • Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia • Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik • Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan
Nelson Tampubolon	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Fakultas Ekonomi, Universitas Parahyangan • Arthur D. Little Management Institute, Boston 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT MNC Capital Indonesia • Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

			<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Dewan Komisiner ex officio OJK pada Lembaga Penjamin Simpanan • Direktur Direktorat International Bank Indonesia
Johnny	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Akademi Bank Nasional Jurusan Ilmu Keuangan Perbankan. • Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Komisaris PaninBank. • Direktur Tresuri PaninBank • Asisten Manajer PaninBank
Yusak Zefanya	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Lulusan Harvest Leadership Institute Karawaci • Master of Arts bidang Leadership dari STT International Harvest, Karawaci, Tangerang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Remunerasi & Nominasi • Kepala Biro Umum dan Personalia • Kepala Bagian Personalia • Bagian Personalia • Bagian Umum
Akijat Lukito	Anggota Komite		<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Remunerasi & Nominasi • PT. Bank Panin KCU Cirebon, Pemimpin Cabang • PT. Bank Panin Kantor Pusat, Koordinator Pengawasan & Pemeriksaan • PT. Panin Insurance, Komisaris

Tabel Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Periode	Dasar Penunjukan	Warga Negara	Domisili
Drs. H. Riyanto	Ketua Komite	Periode 2020 s/d saat ini	06/SK-DIR/20, 15/07/20	WNI	Jakarta
Nelson Tampubolon	Anggota Komite	Periode 2020 s/d saat ini	06/SK-DIR/20, 15/07/20	WNI	Jakarta
Johnny	Anggota Komite	Periode 2020 s/d saat ini	06/SK-DIR/20, 15/07/20	WNI	Jakarta
Yusak Zefanya	Anggota Komite	Periode 2020 s/d saat ini	06/SK-DIR/20, 15/07/20	WNI	Jakarta
Akijat Lukito	Anggota Komite	Periode 2020 s/d saat ini	06/SK-DIR/20, 15/07/20	WNI	Jakarta

Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketua dan anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Kegiatan pelaksanaan komite dilaporkan setiap semester kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi selama Tahun 2021 dan gratifikasi yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Remunerasi

Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dalam rangka melaksanakan penyesuaian gaji Tahun 2021 dan gratifikasi tahun buku 2020, antara lain:

- a Prestasi Kerja Individual.
- b Kinerja keuangan (kondisi keuangan Perseroan 3 tahun terakhir) dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
- c Industri Perbankan dan UMR.
- d Sasaran dan Strategi Jangka Panjang Perseroan.
- e Faktor inflasi.

2. Berkaitan dengan Nominasi

Penilaian (*Assesment*) terhadap Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Perseroan.

3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang diselenggarakan selama tahun 2021 adalah sebanyak 2 (dua) kali dengan agenda rapat yaitu membahas Kebijakan Remunerasi tahun 2021, Review Peraturan SDM, Ketentuan SDM terkait Covid 19 dan lain-lain, sesuai tabel di bawah ini ;

No	Tanggal	Pembahasan
1	14/04/2021	Kebijakan Remunerasi 2021.
2	18/08/2021	1. Informasi atas penetapan Bpk. Johnny sebagai anggota Komisaris 2. Review Peraturan SDM 3. Ketentuan SDM terkait Covid-19 4. Lain-lain

Adapun frekuensi kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Rapat Komite Audit	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Drs. H . Riyanto	2 kali	100%
2.	Nelson Tampubolon	2 kali	100%
3.	Johnny	1 kali	50%
4.	Yusak Zefanya	2 kali	100%
5.	Akijat Lukito	2 kali	100%

Pelatihan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Program pelatihan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diperlukan agar anggota dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Sepanjang tahun 2021, pelatihan yang diikuti adalah sebagai berikut:

Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Nama Peserta
Webinar Strategi Bank di Era Digital	<i>Indonesian Banking School</i>	Tahun 2021	Indonesia	Seluruh Anggota DeKom
<i>Intro to Crypto</i>	<i>Institute Banking Indonesia</i>	Tahun 2021	Indonesia	Seluruh Anggota DeKom

Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota yang merupakan Pejabat Eksekutif SDM/Pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian Perseroan.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dalam memastikan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan Pengendalian Intern, dan pelaksanaan fungsi Kepatuhan Terintegrasi serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Dasar Hukum

PaninBank telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK, terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, Tata Kelola Terintegrasi dan Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan kepada Pihak Lain;
2. Kebijakan Pokok Perusahaan

Tujuan Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Memenuhi ketentuan regulator yaitu POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Pasl 14 ayat 1, Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah disahkan oleh Direksi dan Komisaris Entitas Utama pada tanggal 27 Januari 2017 yang mengatur antara lain mengenai Kewenangan, Kedudukan, Rapat, Kehadiran, serta Tugas dan Tanggung Jawab. Pedoman tersebut terakhir di kinikan tanggal 29 Oktober 2021.

Kriteria Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut di atas, anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari ;

- a. Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu Komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap Anggota;

- b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam konglomerasi keuangan, sebagai anggota;
- c. Seorang Pihak Independen sebagai Anggota;
- d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai Anggota
- e. Keanggotaan Komisaris Independen pada KTKT dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Grup Panin

Independensi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Ketua dan anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen, Pihak Independen dan Pengawas Syariah yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Tugas dan Tanggungjawab

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling setidaknya melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui *video conference*, hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi selama Tahun 2021 telah dilangsungkan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 29 Januari 2021 dan 16 Agustus 2021 dengan membahas antara lain : Pemaparan dan diskusi Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang dipresentasikan oleh ;

- a. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
- b. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
- c. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
- d. Lain-lain

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi ;

No	Nama	Jabatan	Jabatan di Komite Tata Kelola Terintegrasi
1	Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris Independen dari PT Bank Panin Tbk	Ketua
2	Lintang Nugroho	Wakil Komisaris Independen dari PT Bank Panin Tbk.	Anggota
3	Omar Baginda Pane	Komisaris Independen dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Anggota
4	Aminudin Yakub	Dewan Pengawas Syariah dari PT Panin Dai-Ichi Life	Anggota
5	Hasan Anggono	Komisaris Independen dari PT Panin Dai-Ichi Life	Anggota
6	Muhammad Syakir Sula	Ketua Dewan Pengawas Syariah dari PT Panin Dai-Ichi Life	Anggota
5	Lukman Abdullah	Komisaris Independen dari PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Anggota
6	Peter Setiono	Komisaris Independen dari PT Panin Sekuritas Tbk	Anggota
7	Li Kwong Wing	Komisaris dari PT Panin Asset Management	Anggota
9	Usep Ekadaya	Pihak Independen PT Bank Panin Tbk	Anggota
10	Bambang Setyoko	Pihak Independen PT Bank Panin Tbk.	Anggota

DIREKSI

Direksi adalah organ utama Perseroan yang memiliki tanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan lain yang dimiliki oleh Direksi adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan Anggaran Dasar Perseroan. Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi berhak mewakili PaninBank, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Direksi PaninBank mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-undang RI tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan
2. Anggaran Dasar Bank.
3. Peraturan OJK, Peraturan BI, Surat Edaran OJK dan Surat Edaran BI terkait Penerapan dan Organ Tata Kelola Perusahaan.

Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Menunjuk Anggaran Dasar PaninBank Pasal 16. 14. a, pembagian Tugas dan Wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS Bank tanggal 09 Juni 2021 memberi kuasa kepada Direksi untuk menetapkan pembagian Tugas dan Wewenang setiap anggota Direksi. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 008/DIR-SK/21 tertanggal 28 April 2021 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT. Bank Panin, Tbk, Tugas Direksi terdiri dari:

1. Melaksanakan pengurusan Bank dengan mengatur, memonitor dan memastikan terselenggaranya kegiatan usaha Bank sesuai dengan visi dan misi Bank.
2. Menetapkan strategi usaha dan memantau serta memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip penerapan Manajemen Risiko dan prinsip *Good Corporate Governance* dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, tugas dan tanggung jawab dalam Sistem Pengendalian Umum serta kepatuhan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
3. Menyusun Rencana Bisnis Bank dan/atau revisinya, melakukan supervisi dan sosialisasi kepada pejabat-pejabat unit kerja terkait, dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
Selanjutnya bertanggungjawab memantau implementasinya dari waktu ke waktu.
4. Menyelenggarakan Rapat Kerja Tahunan untuk mengevaluasi dan menetapkan Program Kerja tahun berikutnya.
5. Menetapkan struktur organisasi Bank beserta uraian tugas dan wewenang pembedangan masing-masing.
6. Mengelola Sumber Daya Perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja Perusahaan, meneliti setiap hal terkait dengan efisiensi usaha, mengambil keputusan, membuat kebijakan, melaksanakan pengawasan serta verifikasi yang diperlukan.
7. Melakukan supervisi kepada seluruh jajaran manajemen untuk memastikan ketepatan dan kualitas laporan serta menyetujui data keuangan yang disajikan kepada publik, pihak otoritas dan pemegang saham.
8. Menyelenggarakan Rapat Direksi sekurang kurangnya sekali dalam sebulan untuk membahas perkembangan usaha, pencapaian Rencana Bisnis Bank, dan masalah yang dihadapi.
9. Menyelenggarakan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun untuk membahas perkembangan usaha, pencapaian Rencana Bisnis Bank, dan masalah yang dihadapi.
10. Menjaga Tingkat Kesehatan Bank sekurang-kurangnya tergolong “Sehat”.

11. Melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap anggota entitas konglomerasi (Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi).

Kewenangan Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi memiliki kewenangan untuk:

1. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan yang diperlukan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan persetujuan tertulis dari dan atau ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris, dimana satu di antara mereka harus Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris.
2. Direksi harus mendapatkan persetujuan dari RUPS untuk menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) aset perusahaan sebagai jaminan untuk satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
3. Melakukan transaksi dimana terdapat benturan kepentingan ekonomi pribadi anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham pengendali, dengan kepentingan ekonomi PaninBank, harus mendapatkan persetujuan RUPS.
4. Direksi berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya secara tertulis dan memberikan kekuasaan tertentu yang diatur dalam surat kuasa tersebut.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Board Charter*)

Direksi PaninBank memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku yang mengatur hal-hal terkait dengan :

- Organisasi;
- Masa jabatan;
- Tugas dan tanggung jawab;
- Wewenang;
- Pendelegasian wewenang;
- Independensi Direktur Utama;
- Keterbukaan;
- Etika kerja;
- Pembentukan unit-unit
- Rapat dan pelaksanaan rapat;
- Mekanisme pengambilan keputusan;
- Penilaian kinerja; dan
- Etika jabatan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja senantiasa dikaji dan dikinikan secara berkala. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi telah disetujui dan disahkan oleh Komisaris dan Presiden Direktur PaninBank.

Pengangkatan Anggota Direksi

Anggota Direksi PaninBank diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Masa jabatan anggota Direksi berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Apabila terdapat penambahan/penggantian anggota Direksi, masa kerja anggota Direksi tersebut dimulai sejak tanggal ditentukan oleh RUPS dan berakhir pada tanggal yang sama dengan masa kerja anggota Direksi lainnya. Anggaran Dasar PT. Bank Panin Tbk. menetapkan bahwa Anggota Direksi yang masa

kerjanya telah berakhir dapat dipilih kembali oleh RUPS untuk 3 (tiga) tahun berikutnya. Pengangkatan anggota Direksi dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria Anggota Direksi diatur didalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yang antara lain mensyaratkan sebagai berikut:

1. Mempunyai ahlak dan moral yang baik,
2. Paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Esekutif Bank,
3. Memiliki Profesionalisme kerja dan integritas yang tinggi,
4. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko,
5. Memiliki kompetensi yang layak sesuai dengan kedudukannya,
6. Memenuhi kriteria independensi dan transparasi,
7. Telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,
8. Kriteria lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi PaninBank per tanggal 31 Desember 2021 beranggotakan 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari 9 (sembilan) orang berkewarga negaraan Indonesia dan 1 (satu) orang berkewarga negaraan Malaysia, seluruhnya berdomisili di Indonesia.

Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur yang berasal dari kalangan Professional, memiliki integritas dan kompetensi dalam bidang perbankan. Presiden Direktur PaninBank merupakan pihak independen yang tidak memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan serta hubungan keluarga terhadap pemegang saham pengendali, maupun terhadap Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya.

Seluruh anggota Direksi PaninBank memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman serta keahlian di bidang perbankan. Pengangkatan atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, serta peraturan oleh regulator yang mengatur tentang penilaian dan kepatutan. Seluruh Anggota Direksi yang menjabat telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan telah memiliki sertifikasi di bidang Manajemen Risiko.

Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan

Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Direksi. Anggota Direksi yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari OJK, mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Susunan Direksi PaninBank adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Domisili
1	Herwidayatmo	Presiden Direktur	1 September 2014 sampai dengan saat ini	Indonesia
2	Hendrawan Danusaputra	Wakil Presiden Direktur (Koordinator Bidang Corporate Banking Bidang Commercial Banking & Mortgage, Bidang Treasury, Bidang Network & Distribution dan membawahi Institutional Banking & BUMN, Credit Card & Personal Loan (CCPL) dan General Affair serta Fungsi Pengembangan dan Pengawasan Subsidiaries)	2016 sampai dengan saat ini	Indonesia
3	Januar Hardi	Direktur I (Bidang Corporate Banking)	13 Desember 2016 sampai dengan saat ini	Indonesia
4	Edy Heryanto	Direktur II (Bidang Commercial Banking & Mortgage, meliputi Commercial, Small Medium Business, Mikro dan Mortgage)	28 Mei 2004 sampai dengan saat ini	Indonesia
5	Gunawan Santoso	Direktur III (Bidang Treasuri, meliputi Liquidity, Currency Trading & Commercial, dan Capital Market & Investor Relations)	28 Juni 2007 sampai dengan saat ini	Indonesia
6	Haryono Wongsonegoro	Direktur IV (Bidang Network & Distribution)	12 November 2020 sampai dengan saat ini	Indonesia
7	Ng Kean Yik	Direktur V (Bidang Risk Management meliputi Risk Management dan Digital & Liabilities Management)	30 Juni 2008 sampai dengan saat ini	Indonesia
8	Lionto Gunawan	Direktur VI (Bidang Direktur SDM dan Bisnis & Strategis IT)	9 Juni 1997 sampai dengan saat ini	Indonesia
9	Suwito Tjokrorahardjo	Direktur VII (Bidang Operasional & Teknologi Informasi, International Operations, dan Internal Control)	29 Mei 2015 sampai dengan saat ini	Indonesia
10	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur VIII (Bidang Kepatuhan, Legal Affairs, Pengaduan Nasabah, Kepatuhan Terintegrasi dan APU PPT/AML)	8 September 2009 sampai dengan saat ini	Indonesia

Tabel Profil Anggota Direksi PaninBank per Akhir 2021

Nama	Kewarga negeraan	Usia	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Herwidayatmo	WNI	65 tahun	Presiden Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1981) - Master Business Administration dari Saint Mary's University, Halifax, Nova Scotia Canada (1992) 	<ul style="list-style-type: none"> - Presiden Direktur Bank Panin - Wakil Presiden Direktur PT Bank Permata - Direktur Hukum dan Kepatuhan PT Bank Permata - Executive Director World Bank untuk Asia Tenggara - Ketua Bapepam - Deputy Menteri BUMN bidang Restrukturisasi dan Privatisasi - Bapepam, Departemen Keuangan
Hendrawan Danusaputra	WNI	57 tahun	Wakil Presiden Direktur	Computer Science, University of Technology, Sydney, Australia (1988)	<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Presiden Direktur PaninBank - Direktur Institutional Banking PaninBank - Vice President Divisi Internasional - Direktur Financial Institution di American Express Bank
Lionto Gunawan	WNI	54 tahun	Direktur	Finance, San Francisco State University, Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur SDM dan Bisnis & Strategis IT PaninBank - Direktur di ANZ PaninBank - Manager Westpac PaninBank
Edy Heryanto	WNI	57 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan - Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Perbankan Komersial & Mortgage PaninBank - Vice President dan Pemimpin KCU Jakarta Palmerah - Credit Analyst, Bank Universal
Gunawan Santoso	WNI	54 tahun	Direktur	Fakultas Teknik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Treasuri PaninBank - Komisaris di PT Verena Multi Finance - Komisaris di PT Clipan Finance Tbk
Ng Kean Yik	WNA Malaysia	66 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Jurusan Commerce University of Melbourne, Australia - Master Business Administration, University of Melbourne, Australia 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Risk Management, Digital & Liabilities Development - Direktur Perbankan Ritel PaninBank - Group Manager Retail Banking PaninBank - Head Portfolio Management ANZ Bank - Executive Group Strategy

Together, Building Sustainable Growth

					ANZ Bank
Januar Hardi	WNI	58 tahun	Direktur	Peternakan/Ilmu Ekonomi Peternakan, Institut Pertanian Bogor (IPB)	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Perbankan Korporasi PaninBank - Vice President Head Of Corporate Banking Bank Panin - Asst. Vice President Unit Head Corporate Banking Group Bank Panin - Senior Manager Unit Head Corporate Banking Group Bank Panin - Manager Unit Head Corporate Banking Group Bank Panin - Account Manager Consumer Banking Junior Officer Consumer Banking
Suwito Tjokrorahardjo	WNI	57 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Universitas Surabaya - Universitas Pelita Harapan dengan Magister bidang Ekonomi/Marketing 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Operasional dan Teknologi - Branch Network & Operations Group Head PaninBank - Lippo Bank - Citibank
Antonius Ketut Dwirianto	WNI	54 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) bidang Keuangan dan Perbankan Yogyakarta - Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI) - Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta - Magister Hukum Bisnis dari Universitas Pelita Harapan - Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana dari Universitas Jayabaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Kepatuhan , Legal Affair & AML - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PaninBank - Kepala Biro Compliance PaninBank - Branch Manager Bank CIC - Account Officer Bank CIC
Haryono Wongsonegoro	WNI	57 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana bidang Akuntansi, Universitas Putra Bangsa Surabaya (1990) - Master of Management, Universitas Udayana Bali (2004) 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Jaringan dan Distribusi PaninBank (2020-sekarang) - Kepala Kantor Wilayah Jakarta Bank Central Asia (2011-2019) - Kepala Bisnis Kecil dan Menengah (SME) dan Bisnis Komersial Bank Central Asia (2009-2011) - Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Bank Central Asia (2005-2009)

					<ul style="list-style-type: none"> - Pemimpin KCU Bank Central Asia (1995-2005) - Wakil Pemimpin KCU Bank Central Asia (1993-1995) - Kepala Tim Audit Internal Bank Central Asia (1989-1993) - Auditor di Kantor Akuntan Publik (1987-1989)
--	--	--	--	--	---

Tugas dan Tanggungjawab Anggota Direksi

Tugas dan Tanggungjawab masing-masing Anggota Direksi disajikan sesuai tabel tugas dan tanggungjawab Anggota Direksi, sebagai berikut ;

Tabel Tugas dan Tanggungjawab Anggota Direksi

No	Nama	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Herwidayatmo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan visi dan misi Bank dapat terwujud dengan dukungan strategi dan kebijakan Bank yang tepat; 2. Bertanggung jawab terhadap Rencana Bisnis Bank yang meliputi ; <ol style="list-style-type: none"> a Merumuskan kebijakan dan strategi Bank dalam Rencana Bisnis Bank berikut revisinya (bila ada); b Mensosialisasikan kepada semua jajaran organisasi yang terkait; c Melakukan evaluasi realisasi Rencana Bisnis Bank setiap akhir bulan/akhir triwulan/akhir tahun. 3. Memimpin pengelolaan dan seluruh kegiatan Bank yang dijalankan oleh para anggota Direksi; 4. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang <i>Risk Management (Non Risk Taking Unit)</i>, Bidang <i>Finance & Planning</i>, Bidang <i>Human Resources, Business & IT Strategic</i>, Bidang <i>Operations & Information Technology</i>, dan Bidang <i>Compliance</i>, Konglomerasi Grup, APU PPT, Pengaduan Nasabah (CCH) & <i>Legal Affair (Non Business & Operation Legal)</i> dan membawahi <i>Business & Corporate Legal</i> (Biro Hukum), <i>Corporate Credit Restructuring & Recovery</i> (CRR) dan <i>SpECIAL Asset Management (SAM)</i>, Biro Pengawasan & Pemeriksaan (SKAI), serta <i>Corporate Secretary</i>; 5. Memastikan ; <ol style="list-style-type: none"> a Pengembangan dan pengendalian kegiatan Bidang dan Unit Kerja di bawah koordinasinya terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan intern maupun ekstern; b Tercapainya seluruh rencana kerja Bank dengan tetap memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, mampu mendorong pertumbuhan yang sehat dan mampu memberikan keuntungan kepada Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya; c Pelaksanaan Bidang <i>Compliance</i>, Konglomerasi Grup, APU PPT, Pengaduan Nasabah (CCH) & <i>Legal Affairs (Non Business & Operation Legal)</i> dan penanganan perkara hukum terkait kegiatan operasional Bank diluar perkreditan, sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku; d Penerapan Manajemen Risiko (<i>Risk Management – Non Risk Taking Unit</i>) yang efektif dan efisien untuk menjalankan fungsi “Four Eyes Principles “;

		<ul style="list-style-type: none"> e. Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan (akunting) dan perencanaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku; f. Pengembangan sistem dan teknologi Bank yang dapat menunjang seluruh kegiatan operasional Bank dan ke depannya; g. Terjaganya tingkat kesehatan Bank; h. Efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dan tindaklanjut atas hasil pemeriksaan OJK, temuan audit internal dan audit eksternal; i. Pengendalian dan pemantauan efektifitas pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) untuk memberi kesempatan kepada seluruh jenjang organisasi untuk berperan serta dalam upaya-upaya pemberantasan internal fraud; <ol style="list-style-type: none"> 6. Melakukan konsolidasi semua bidang dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank yang akan disampaikan kepada OJK serta melakukan sosialisasi kepada seluruh Pejabat Unit Kerja terkait, 7. Berkoordinasi dengan para Direktur bidang dalam mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank secara triwulan dan menyarankan revisinya apabila dipandang perlu; 8. Memimpin Rapat Direksi, Rapat ALCO dan Komite Direksi lainnya sesuai jadwal yang ditetapkan maupun rapat-rapat Direksi di luar jadwal yang ada; 9. Menciptakan hubungan yang harmonis antara Dewan Komisaris, Direksi Pemegang Saham, Karyawan, Nasabah, Investor dan Instansi Pemerintah lainnya dalam rangka menciptakan tata kelola perusahaan yang baik; 10. Membina hubungan dengan seluruh mitra kerja Bank agar dapat terwujud hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak; 11. Menjadi Ketua dari Komite-komite Direksi; 12. Mengambil alih tugas anggota Direksi dan/atau penggantinya yang berhalangan hadir, sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat dan Pengganti Direksi; 13. Memimpin dan mengarahkan kebijakan <i>Human Resources</i> di bawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>.
2	Hendrawan Danusaputra	<p>A Selaku Koordinator Bidang ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Kebijakan dan Strategi untuk pencapaian target usaha, bersama Direktur Bidang dan Unit Kerja terkait; 2. Menetapkan Kebijakan, perencanaan, pengembangan dan strategi Bidang <i>Corporate Banking</i>, Bidang <i>Commercial Banking & Mortgage</i>, Bidang <i>Treasury</i>, dan Bidang <i>Network & Distribution</i>; 3. Menyetujui dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Commercial Banking & Mortgage</i>, Bidang <i>Treasury</i> dan Bidang <i>Network & Distribution</i>; 4. Memastikan ; <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan pengendalian kegiatan Unit Kerja di bawah koordinasinya terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; b. Pemberian <i>Credit Line</i> antar Bank, plafond transaksi <i>Forex</i>, transaksi Surat Berharga dan Pasar Uang sesuai dengan batas

		<p>kewenangan yang diberikan;</p> <ol style="list-style-type: none">c. Perkembangan bisnis yang kompetitif dan tercapainya target yang ditetapkan;d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara dengan baik;e. Terkendalnya tingkat <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Bank; <p>5. Menggantikan tugas Presiden Direktur dan/atau Direktur lain/ penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat dan Pengganti Direksi.</p> <p>B Bidang <i>Institutional Banking & BUMN, Credit Card & Personal Loan</i> dan <i>General Affair</i> ;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Institutional Banking & BUMN, CCPL</i> dan <i>General Affair</i>;2. Menetapkan Kebijakan, Perencanaan, Pengembangan dan Strategi Bidang <i>Institutional Banking & BUMN, CCPL</i> dan <i>General Affair</i>.3. Memastikan ;<ol style="list-style-type: none">a. Kebijakan, Perencanaan, Pengembangan dan Strategi terlaksana dengan baik;b. Tercapainya target aktiva produktif yang dikelolanya;c. Pengadaan barang & jasa, pengelolaan dan pengawasan inventaris serta aset Bank (<i>Non Financial</i>) dikelola dan dioperasikan secara efisien dan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan;d. Terselenggaranya program marketing yang terencana dan terkoordinasi baik;e. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis CCPL kepada Cabang sesuai koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>; <p>C Fungsi Pengembangan dan Pengawasan Subsidiaries dan Bank Koresponden ;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan kebijakan, perencanaan, monitoring, pengembangan dan strategi subsidiaries;2. Membina, mengembangkan dan mengawasi kinerja, bisnis, operasional serta pertumbuhan usaha Perusahaan Anak termasuk <i>KPM Joint Finance</i>;3. Membina hubungan baik dengan Bank Koresponden, lembaga pemeringkat dan lembaga Keuangan.
--	--	---

3	Januar Hardi	<p>Selaku Direktur Bidang <i>Corporate Banking</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun Rencana Bisnis Banking Bidang <i>Corporate Banking</i>;2. Menetapkan kebijakan, strategi, perencanaan dan pengembangan Bidang <i>Corporate Banking</i> serta memperhatikan kualitas kredit yang diberikan;3. Memastikan ;<ol style="list-style-type: none">a. Terselenggaranya kegiatan di bawah koordinasinya sesuai target bisnis;b. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai prinsip kehati-hatian;c. Tercapainya target Kredit Korporasi;d. Terkendalinya tingkat NPL dan <i>Special Mention</i> kredit korporasi;e. Pelatihan dan pembinaan untuk pemasaran produk yang efektif agar lebih dinamia dan kompetitif berkoordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>.4. Melakukan supervisi dan pengendalian Divisi <i>Corporate Banking</i> dan memastikan pelaksanaan tugas Divisi sesuai kebijakan yang ditentukan;5. Menjalin hubungan dengan perusahaan Korporasi dan memastikan layanan yang kompetitif;6. Memutuskan pemberian pembiayaan Korporasi sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan;7. Merekomendasikan proses penyelamatan kredit (aktiva produktif) di bidangnya;8. Memimpin dan mengarahkan kebijakan <i>Human Resources</i> dibawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>;9. Menggantikan tugas Direktur lain/ penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat dan Pengganti Direksi.
---	--------------	---


4	Edy Heryanto	<p>Selaku Direktur Bidang <i>Commercial Banking & Mortgage</i>, meliputi <i>Commercial, Small Medium Business (SMB)</i>, Mikro dan <i>Mortgage</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Commercial Banking</i> dan <i>Mortgage</i>; 2. Menetapkan Kebijakan dan Strategi ; <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan pengembangan Bidang <i>Commercial Banking</i>, SMB Mikro dan <i>Mortgage</i>; b. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat; c. Pengelolaan kredit-kredit bermasalah dan <i>Special Mention</i> segmen Komersial, SMB, Mikro, dan <i>Mortgage</i>. 3. Memastikan ; <ol style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya kegiatan dibawah koordinasinya sesuai target bisnis; b. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian; c. Tercapainya target Kredit Komersial, SMB, Mikro dan <i>Mortgage</i> di seluruh Cabang; d. Terkendalnya tingkat NPL dan <i>Special Mention</i> kredit segmen Komersial, SMB, Mikro dan <i>Consumer Lending</i>; e. Pelatihan dan Pembinaan untuk pemasaran produk yang efektif agar lebih dinamis dan kompetitif berkoordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>. 4. Memutuskan pemberian pembiayaan <i>Commercial</i>, SMB, Mikro dan <i>Mortgage</i> sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan; 5. Merekomendasikan proses penyelamatan kredit (aktiva produktif) di bidangnya; 6. Memimpin dan mengarahkan kebijakan <i>Human Resources</i> di bawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i> 7. Menggantikan tugas Direktur lain/ penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat dan Pengganti Direksi.
5	Gunawan Santoso	<p>Selaku Direktur Bidang <i>Treasury</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Treasury</i>; 2. Menetapkan kebijakan, strategi bidang <i>Treasury</i> serta memastikan terselenggaranya kegiatan dimaksud dengan baik dan lancar; 3. Memutuskan pemberian <i>line</i> antar Bank, Plafond transaksi <i>Forex</i>, transaksi Surat Berharga dan Pasar Uang sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan; 4. Membantu peningkatan pendapatan Bank dari Transaksi <i>Treasury</i> dalam batasan risiko yang dapat ditoleransi Bank; 5. Memastikan ; <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan likuiditas Bank, kecukupan saldo Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia serta tersedianya <i>Secondary Reserve</i> sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku; b. Terjaganya Posisi Devisa Netto (PDN) Bank dari waktu ke waktu


		<p>sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Terselenggaranya transaksi valuta asing baik untuk kepentingan Bank maupun kebutuhan transaksi nasabah secara aman dan menguntungkan; d. Terselenggaranya transaksi surat-surat berharga baik untuk keperluan <i>trading</i> maupun <i>banking book</i> secara aman dan menguntungkan; e. Pembinaan, sosialisasi informasi penting, pengembangan hubungan baik serta komunikasi dengan para investor terselenggara dengan efektif dan berjalan secara wajar; f. Pelatihan dan pembinaan untuk pemasaran produk yang efektif agar lebih dinamis dan kompetitif berkoordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>. <p>6. Menyiapkan, menganalisis dan menyajikan laporan-laporan yang berkaitan dengan Pengelolaan Aset dan Kewajiban Bank dalam Rapat ALCO,</p> <p>7. Menggantikan tugas Direktur lain/ penggantinya apabila yang bersangkutan dan penggantinya berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat dan Pengganti Direksi.</p>
<p style="text-align: center;">6</p>	<p style="text-align: center;">Haryono Wongsonegoro</p>	<p>Selaku Direktur Bidang <i>Network & Distribution</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Network & Distribution</i>; 2. Menetapkan Kebijakan dan strategi ; <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan Pengembangan Bidang <i>Network & Business</i> dan <i>National Sales Managemen</i>; b. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat. 3. Memastikan ; <ul style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya kegiatan dibawah koordinasinya sesuai target bisnis; b. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian; c. Terselenggaranya program marketing yang terencana dan terkordinasi baik; d. Tercapainya target bisnis dan <i>sales</i> di seluruh Cabang; e. Pelatihan dan pembinaan untuk pemasaran produk yang efektif agar lebih dinamis dan kompetitif berkoordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>; 4. Memimpin dan mengarahkan Kebijakan <i>Human Resources</i> dibawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>.
<p style="text-align: center;">7</p>	<p style="text-align: center;">Ng Kean Yik</p>	<p>Selaku Direktur Bidang Manajemen Risiko, <i>Digital & Liabilities Management</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Risk Management</i> dan <i>Digital & Liabilities Management</i>; 2. Mengembangkan strategi implementasi kerangka Manajemen Risiko yang memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas usaha dan profil risiko Bank; 3. Menetapkan strategi perencanaan dan pengembangan produk-produk

		<p><i>Digital</i> serta memastikan terselenggaranya kegiatan tersebut sesuai target bisnis, bekerjasama dengan Direktur <i>Human Resources</i>, Bisnis dan IT Strategi, Direktur <i>Operations</i> dan <i>Information Technology</i> dan Direktur <i>Network & Distribution</i> dan Direktur <i>Compliance</i>.</p> <p>4. Memastikan ;</p> <p>a. Efektifitas pengelolaan Bidang Manajemen Risiko (<i>Non Risk Taking Unit</i>);</p> <p>i. Melakukan Monitoring agar risiko Bank teridentifikasi, terukur, dapat dikelola secara baik dan dikendalikan sesuai visi, misi, strategi dan <i>risk appetite</i> Bank melalui proses pemantauan,</p> <p>ii. Memberikan opini/ pendapat manajemen risiko atas usulan dan rancangan keputusan dari Direktur bidang lainnya yang akan melakukan kegiatan perkreditan, operasional dan atau rancangan produk/ aktivitas baru sepanjang rancangan kegiatan/ keputusan tersebut disampaikan dan dimintakan opini, dengan tujuan;</p> <p>1) Agar risiko yang mungkin timbul bisa diidentifikasi dan dikelola,</p> <p>2) Prinsip-prinsip Manajemen Risiko bisa diperbaiki,</p> <p>3) Terpenuhinya penerapan <i>Four Eyes Principles</i> bagi manajemen Bank.</p> <p>opini/ pendapat akan diberikan sepanjang permintaan opini/ pendapat disampaikan dan dimintakan secara terbuka dan resmi. Sifat dari opini/ pendapat manajemen risiko tersebut tidak bersifat mutlak dan tidak mengikat harus dilaksanakan, serta bukan merupakan suatu keputusan setuju atau tidak setuju (<i>Non Risk Taking Unit</i>), namun sebagai bahan pertimbangan oleh Manajemen (Komite Pemutus Kredit/ KKD) dalam pengambilan keputusan;</p> <p>iii. Menyampaikan laporan atau informasi tertulis secara berkala ataupun insidentil yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas manajemen risiko kepada Presiden Direktur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan regulator lainnya;</p> <p>iv. Menjaga pelaksanaan, penyampaian laporan, pemberian opini terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai POJK atau Peraturan yang berlaku;</p> <p>v. Bekerjasama dengan Direktur <i>Compliance</i> dalam pelaksanaan Konglomerasi Keuangan Panin Grup.</p> <p>b. Pengembangan <i>Digital Banking and Liability Product</i> yang dapat memenuhi pencapaian sasaran Bank sesuai dengan perkembangan pasar;</p> <p>5. Memimpin Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin Grup selaku ketua KMR Terintegrasi;</p> <p>6. Memimpin dan mengarahkan kebijakan <i>Human Resources</i> dibawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>;</p> <p>7. Menggantikan tugas Direktur lain/ penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat dan Pengganti Direksi.</p>
8	Lionto Guanawan	<p>Selaku Direktur Bidang <i>Human Resources</i> dan <i>Business & IT Strategic</i></p> <p>1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Human Resources</i> dan <i>Business & IT Strategic</i>;</p> <p>2. Menetapkan kebijakan dan strategi;</p> <p>a. Perencanaan dan pengembangan <i>Human Resources</i> meliputi</p>

		<p>rekrutmen, penempatan & pengangkatan karyawan, sistem remunerasi dan nominasi, pengaturan dan penetapan kepegangatan, jenjang karier, pendidikan dan pelatihan karyawan;</p> <p>b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bidang <i>Business & IT Strategic</i> dilakukan melalui pemberian ide dan saran dalam rapat Direksi dan rapat Komite IT (<i>IT Steering Committee</i>) terkait strategi bisnis dan IT.</p> <p>3. Memastikan ;</p> <p>a. Pemenuhan kebutuhan, pengembangan, kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan dan pengelolaan <i>Human Resources</i> secara optimal sesuai arah dan perkembangan organisasi yang ditetapkan, serta mengikuti perkembangan situasi ketenaga kerjaan saat ini;</p> <p>b. Kebijakan <i>Human Resources</i> serta Pengembangan & Pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>c. <i>Strategi Business & IT</i> termasuk inovasinya sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank dan perkembangan pasar,</p> <p>d. Memimpin dan mengarahkan kebijakan <i>Human Resources</i> di bawah koordinasinya,</p> <p>e. Memimpin dan mengarahkan kebijakan <i>Human Resources</i> dibawah koordinasinya.</p>
<p style="text-align: center;">9</p>	<p style="text-align: center;">Suwito Tjokrorahardjo</p>	<p>Selaku Direktur Bidang <i>Operations, Information Technology, International Operations</i> dan <i>Internal Control</i></p> <p>1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Operations, Information Technology, International Operations</i> dan <i>Internal Control</i>;</p> <p>2. Menyusun dan menetapkan strategi serta pengembangan Bidang <i>Operations, Information Technology, International Operations</i> dan <i>Internal Control</i> yang efektif dan efisien;</p> <p>3. Menjadi mitra Direktorat lainnya dalam pelaksanaan operasional dan pengembangan IT & <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Bank;</p> <p>4. Memastikan :</p> <p>a. Kebijakan dan Strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik,</p> <p>b. Terselenggaranya kegiatan Operasional Bank yang lancar secara efektif, efisien dan aman;</p> <p>c. <i>Internal Control</i> Bank berjalan sebagaimana mestinya;</p> <p>d. Penyusunan dan pengkinian <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Bank sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>5. Memimpin dan mengarahkan kebijakan <i>Human Resources</i> dibawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>;</p> <p>6. Menggantikan tugas Direktur lain/ penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat dan Pengganti Direksi.</p>
<p style="text-align: center;">10</p>	<p style="text-align: center;">Antonius Ketut Dwirianto</p>	<p>Selaku Direktur Bidang Kepatuhan (<i>Compliance</i>), Legal Affair, Hubungan Kelembagaan, <i>Anti Money Laundering (APU PPT)</i>, Konglomerasi Keuangan Grup dan Pengaduan Nasabah</p> <p>1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Hukum/ Legal Affair, Bidang</p>

		<p>Kepatuhan (<i>Compliance</i>), Hubungan Kelembagaan, <i>Anti Money Laundering</i> (APU PPT), Konglomerasi Keuangan Grup Panin dan Pengaduan Nasabah,</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyusun rencana kerja, kebijakan dan strategi Bidang Hukum/ <i>Legal Affair</i>; Bidang Kepatuhan (<i>Compliance</i>), Hubungan Kelembagaan, <i>Anti Money Laundering</i> (APU PPT), Konglomerasi Keuangan Grup Panin dan Pengaduan Nasabah yang efektif dan efisien; 3. Menjadi mitra Direktorat lainnya dalam pelaksanaan kepatuhan terhadap perundang undangan dan peraturan lainnya; 4. Memimpin dan mengarahkan kebijakan <i>Human Resources</i> dibawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>; 5. Memastikan ; <ol style="list-style-type: none"> a Bidang Hukum (<i>Legal Affiar</i>); <ol style="list-style-type: none"> i. Menjaga kepentingan PaninBank dari risiko Hukum (diluar proses penanganan kredit bermasalah dan aksi korporasi lainnya), melalui; <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian Opini Hukum/ Review perjanjian dengan pihak ketiga, 2) Pemberian pendampingan perkara hukum terhadap Kantor Pusat, Kantor Cabang dan/atau Karyawan dengan status sebagai terlapor/ diperiksa untuk perkara operasional diluar penanganan kredit bermasalah atau proses penyelamatan kredit; 3) Menunjuk Kantor Hukum untuk menjaga kepentingan Bank; 4) Pemberian opini/ pendapat hukum terhadap permasalahan hukum Bidang Operasional Bank dan pengaduan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku; 5) Pemberian opini/ pendapat hukum terhadap rancangan produk/ aktivitas baru; ii. Melakukan korespondensi dan menindaklanjuti permintaan tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum (diluar proses penanganan kredit bermasalah dan aksi korporasi lainnya) kepada KPK, BNN, Kepolisian, DJP dan Instansi penegak hukum lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku. b Bidang Kepatuhan (<i>Compliance</i>) & Hubungan Kelembagaan (<i>Intitutional Relations</i>); <ol style="list-style-type: none"> i. Memonitor Kepatuhan Bank terhadap komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Regulator lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku; ii. Memonitor Kepatuhan Bank dan memitigasi risiko kepatuhan dengan memberikan ; <ol style="list-style-type: none"> 1) Opini/pendapat kepatuhan yang didasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku; 2) Opini/pendapat kepatuhan terhadap rancangan produk/ aktivitas baru, rancangan kebijakan/pedoman, dan
--	--	---

		<p>rancangan memorandum pemberian kredit dengan nominal tertentu;</p> <ul style="list-style-type: none">iii. Menyusun dan menyampaikan <i>Recommendation Management Action</i> (RMA) atas hasil pemeriksaan audit internal kepada Manajemen dan Auditee untuk ditindaklanjuti;iv. Menyusun dan menyampaikan Laporan <i>Self Assessment Good Corporate Governance</i> dan atau informasi tertulis secara berkala ataupun insidentil yang berkaitan dengan pelaksanaan kepatuhan sesuai ketentuan/peraturan/undang-undang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan regulator lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;v. Menyampaikan/mensosialisasikan ketentuan terbaru dari regulator yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank, kepada Direksi dan/atau Unit Kerja terkait;vi. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Presiden Direktur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perkembangan Bidang Kepatuhan;vii. Menjaga pelaksanaan, penyampaian laporan, pemberian opini terkait pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sesuai POJK atau peraturan yang berlaku;viii. Mewakili Bank dalam berbagai kegiatan hubungan kelembagaan serta dalam kepengurusan organisasi-organisasi di luar Bank (antara lain; Perbanas, IBI, FKDKP, BaRa) serta menjalin hubungan baik dan kerjasama antar lembaga/Instansi Pengawas Bank, Pemerintah, BUMN dan Swasta, <p>c Bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT)/<i>Anti Money Laundering</i> (AML) ;</p> <ul style="list-style-type: none">i. Memastikan pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT) sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;ii. Memonitor, menganalisa dan melaporkan transaksi keuangan tunai (TKT/CTR), transaksi keuangan mencurigakan (TKM/STR), dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (TKL/IFTI) sesuai ketentuan perundang undangan;iii. Menyampaikan laporan secara berkala ataupun insidentil, serta menindaklanjuti permintaan tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan program APU PPT kepada Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Instansi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;iv. Menyampaikan/mensosialisasikan ketentuan dan kebijakan terkait penerapan APU PPT kepada Direksi, Unit Kerja terkait dan/atau Kantor Cabang;v. Mengembangkan <i>system monitoring</i> dan <i>reporting</i> transaksi APU PPT. <p>d Bidang Konglomerasi Grup</p> <ul style="list-style-type: none">i. Mengkoordinasikan Pelaporan Konglomerasi Keuangan Bank
--	--	---

		<p>melalui konsolidasi laporan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, Permodalan Terintegrasi dan Audit Terintegrasi sesuai POJK yang berlaku. Di luar pengawasan terhadap perkembangan bisnis dan operasional perusahaan anak (<i>Subsidiaries</i>);</p> <ul style="list-style-type: none">ii. Memberi opini/pendapat kepatuhan terintegrasi untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Bank sebagai Entitas Utama dalam rangka Tata Kelola Terintegrasi berjalan dengan baik;iii. Menyampaikan Laporan atau informasi tertulis secara berkala ataupun insidentil yang berkaitan dengan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, Permodalan Terintegrasi dan Audit Terintegrasi sesuai ketentuan/peraturan/ Undang-undang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);iv. Menyampaikan laporan lainnya secara berkala kepada Presiden Direktur Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK/Grup Entitas Utama) tentang hal-hal yang berkaitan dengan Konglomerasi Keuangan Grup Panin selaku Entitas Utama, <p>e Bidang Pengaduan Nasabah (<i>Customer Complain Handling</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">i. Menerima pengaduan nasabah dan menindaklanjuti pengaduan nasabah tersebut sesuai ketentuan dan kebijakan serta menyusun dan menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan yangn berlaku terkait pengaduan nasabah/ konsumen;ii. Memonitor dan memastikan penyelesaian pengaduan nasabah oleh seluruh Unit Kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang termasuk pengaduan yang diterima melalui media masa, e-mail dan sosial media perusahaan sesuai ketentuan;iii. Mengadministrasikan dan menganalisa statistik pengaduan nasabah dan melaporkan kepada Direksi dan Unit Kerja terkait sebagai <i>feedback</i> untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk dan layanan Bank;iv. Memberikan pendampingan dalam rangka penanganan pengaduan nasabah dan dalam proses mediasi perbankan dengan nasabah sehubungan dengan sengketa konsumen di Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu sesuai ketentuan.
--	--	--

*) Yang dimaksud dengan berhalangan adalah dalam hal anggota Direksi yang digantikan:

- a. Menjalani Cuti
- b. Tidak masuk kerja karena sakit
- c. Melakukan perjalanan dinas ke daerah atau ke luar negeri
- d. Dalam hal pengganti 1 & 2 berhalangan, maka Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur menjadi Direktur Pengganti

Independensi atau Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali (PSP), namun terdapat 2 (dua) anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Anggota Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Herwidayatmo		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hendrawan Danusaputra		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Lionto Gunawan		✓		✓		✓	✓		✓		✓	
Edy Heryanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Gunawan Santoso		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Ng Kean Yik		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Januar Hardi		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Suwito Tjokrorahardjo		✓		✓		✓	✓		✓		✓	
Antonius Ketut Dwirianto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Haryono Wongsonegoro		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Kepemilikan Saham Direksi

Pada Posisi 31 Desember 2021, **tidak terdapat** anggota Direksi yang memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada PT. Bank Panin, Tbk. dan pada perusahaan lain.

No.	Pemegang Saham	Jumlah Kepemilikan	Persentase Kepemilikan
1.	Hendrawan Danusaputra	3,500.000	0,0145
2.	Haryono Wongsonegoro	100.000	0,0004

Rangkap Jabatan Direksi

Tidak terdapat rangkap jabatan Direksi sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diperkenankan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jabatan di perusahaan lain	Perusahaan	Bidang Usaha
1.	Herwidayatmo	Presiden Direktur	-	-	-
2	Hendrawan Danusaputra	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
3.	Lionto Gunawan	Direktur	-	-	-
4.	Edy Heryanto	Direktur	-	-	-
5.	Gunawan Santoso *)	Direktur	Komisaris	PT. Verena Multi Finance, Tbk	Multifinance
6	Ng Kean Yik	Direktur	-	-	-
7	Januar Hardi	Direktur	-	-	-
8	Suwito Tjokrorahardjo	Direktur	-	-	-
9	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur	-	-	-
10	Haryono Wongsonegoro	Direktur	-	-	-

*) *Direncanakan akan berakhir pada RUPS 2022*

Rapat Direksi

Rapat Direksi diselenggarakan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. Disamping rapat rutin, Rapat Direksi dapat diselenggarakan setiap waktu apabila dianggap perlu atas permintaan Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan dari Rapat Dewan Komisaris atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) memiliki paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah.

Pelaksanaan Rapat Direksi

1. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk oleh Presiden Direktur dan disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari dan dalam hal mendesak paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat diadakan. Dalam panggilan rapat dicantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat dilaksanakannya Rapat Direksi,
2. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak diisyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,
3. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dan dapat digantikan oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi yang bersangkutan berdasarkan surat kuasa apabila Presiden Direktur berhalangan hadir,
4. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan PaninBank atau di tempat kegiatan usaha utama PaninBank di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh pihak yang memanggil Rapat,
5. Anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa,
6. Rapat Direksi sekurang-kurangnya membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penerapan dan pencapaian rencana korporasi dan rencana bisnis Bank;
 - b. Kesehatan dan operasional Bank;
 - c. Penerapan pengendalian intern, manajemen risiko dan *Corporate Governance*;
 - d. Pelaksanaan audit baik intern, ekstern maupun regulator;
 - e. Kebijakan personalia yang bersifat strategis;
 - f. Penggunaan laba bersih PaninBank dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan.

Pelaksanaan Rapat Direksi melalui Sarana Elektronik

Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Dalam hal ini, anggota Direksi dinyatakan telah ikut serta dalam Rapat Direksi. Pelaksanaan Rapat Direksi melalui sarana elektronik harus direkam dan dibuat risalah rapat. Kebijakan penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen perusahaan ditetapkan Direksi dengan memenuhi persyaratan minimum penyelenggaraan sistem elektronik di PaninBank sesuai dengan ketentuan perundangan tentang informasi dan transaksi elektronik.

Risalah Rapat

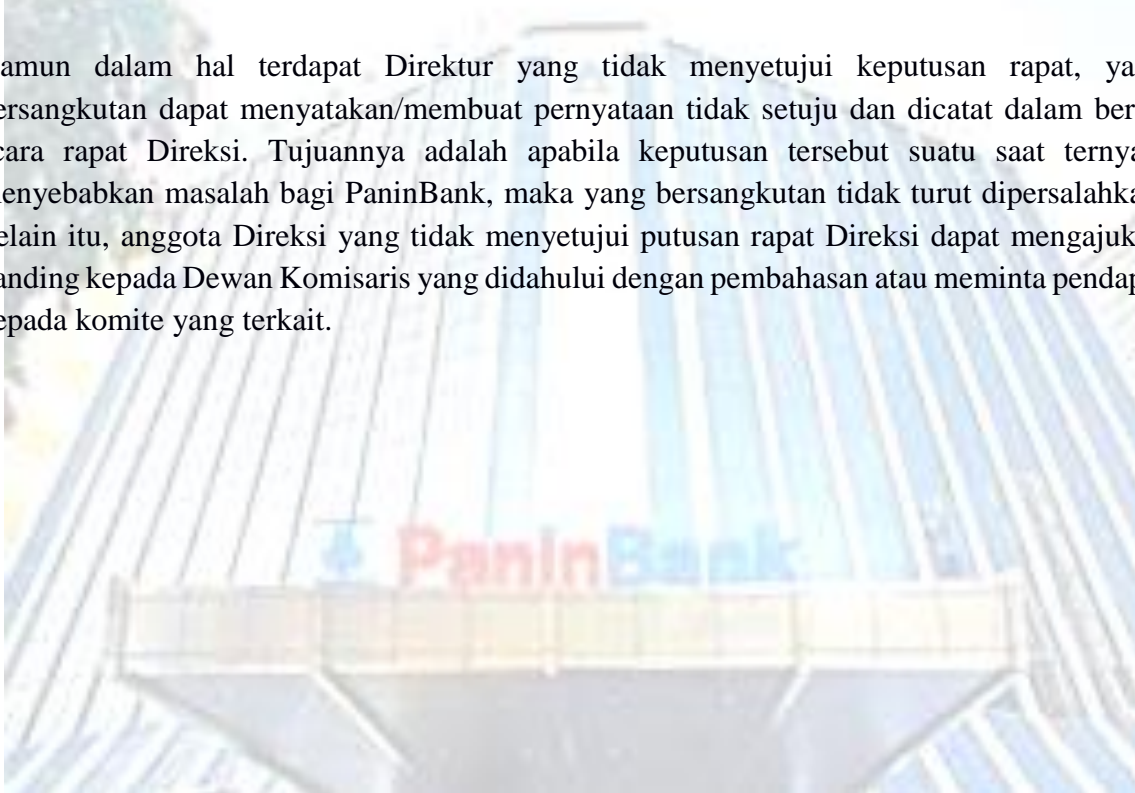
1. Risalah Rapat harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi dan ditandatangani oleh Ketua Rapat bersama-sama dengan seorang anggota Direksi lain yang hadir dan ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut,
2. Dokumen Risalah Rapat Direksi merupakan bukti sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, baik untuk keperluan anggota Direksi, pemegang saham atau pihak ketiga,

3. Dokumen Risalah Rapat Direksi bersifat rahasia. Arsip dokumen ini dipelihara/ disimpan oleh *Corporate Secretary*. Putusan hasil Rapat Direksi yang memerlukan tindak lanjut divisi terkait harus segera diteruskan Kepada Divisi yang bersangkutan oleh *Corporate Secretary*,
4. Frekuensi dari Rapat Direksi dan kehadiran dari anggota Direksi ikut dilaporkan dalam laporan tahunan PaninBank.

Perbedaan Pendapat

Pada dasarnya keputusan Rapat Direksi berdasarkan musyawarah mufakat, atau suara terbanyak. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat yang hadir.

Namun dalam hal terdapat Direktur yang tidak menyetujui keputusan rapat, yang bersangkutan dapat menyatakan/membuat pernyataan tidak setuju dan dicatat dalam berita acara rapat Direksi. Tujuannya adalah apabila keputusan tersebut suatu saat ternyata menyebabkan masalah bagi PaninBank, maka yang bersangkutan tidak turut dipersalahkan. Selain itu, anggota Direksi yang tidak menyetujui putusan rapat Direksi dapat mengajukan banding kepada Dewan Komisaris yang didahului dengan pembahasan atau meminta pendapat kepada komite yang terkait.



Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan Direksi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui rapat Direksi, keputusan Direktur maupun *circular approval*. Seluruh keputusan yang diambil Direksi wajib didokumentasikan dan dipelihara oleh *Corporate Secretary*.

Berikut adalah mekanisme pengambilan keputusan di PaninBank:

Pengambilan Keputusan Melalui Rapat Direksi

- Dalam menetapkan kebijakan terhadap suatu permasalahan, setiap Anggota Direksi wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - Itikad baik;
 - Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup;
 - Investigasi terhadap permasalahan serta kemungkinan penyelesaian;
 - Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan PaninBank;
 - Kesenambungan operasional PaninBank; dan
 - Kesesuaian dengan rencana dan tujuan PaninBank.
- Pembatalan atau perubahan atas hal-hal yang telah diputuskan dalam Rapat Direksi hanya dapat dilakukan dalam forum Rapat Direksi berikutnya.

Pengambilan Keputusan oleh anggota Direksi tanpa Rapat Direksi

- Keputusan untuk direktorat dari Direktur terkait
- Keputusan terkait proses-proses yang telah diatur dalam Surat Keputusan atau peraturan intern Panin Bank.

Pengambilan Keputusan Direksi melalui Circular Approval

- Tujuan mekanisme ini adalah dalam rangka efisiensi proses pengambilan keputusan Direksi untuk topik-topik/permasalahan tertentu yang tidak perlu dimasukkan menjadi agenda Rapat Direksi.
- Keputusan yang diambil dianggap sah apabila telah disetujui oleh minimum 50% anggota Direksi. Persetujuan Direksi dibuktikan dengan ditandatanganinya persetujuan tertulis mengenai suatu keputusan/hal tertentu.
- Kriteria topik-topik/permasalahan-permasalahan tertentu yang proses persetujuan Direksinya dapat melalui *circular approval* adalah:
 - Keputusan yang sudah diatur dalam Komite Direksi;
 - Bukan keputusan yang bersifat strategis, mendesak dan tidak berdampak signifikan kepada pencapaian tujuan dan target Panin Bank.
- Apabila terdapat anggota Direksi yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil melalui mekanisme *circular approval*, maka keputusan tersebut akan dimasukkan dalam agenda Rapat Direksi.

Proses Pengambilan Keputusan Rapat Direksi

Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan Rapat diambil berdasarkan jumlah suara setuju lebih dari 50% dari jumlah anggota Direksi yang hadir.

Rapat Direksi berhak untuk mengambil keputusan yang sah dengan keputusan mengikat apabila jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat yang hadir atau diwakili dalam rapat mencapai lebih dari 50%.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.

Setiap Direktur berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ditentukan lain.

Surat blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Apabila seorang anggota Direksi mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi atau kontrak, maka anggota Direksi tersebut tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut dalam suatu Rapat Direksi.

Rapat Gabungan

1. Rapat Gabungan dapat diinisiasi oleh Dewan Komisaris atau Direksi sesuai kebutuhan,
2. Rapat Gabungan diinisiasi oleh Direksi dalam hal Direksi memerlukan arahan dari Dewan Komisaris. Apabila diperlukan maka dalam Rapat Gabungan dapat menghadirkan narasumber dari dalam ataupun luar Bank,
3. Rapat Gabungan mencapai kuorum apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 51% (lima puluh satu persen) peserta yang diundang,
4. Rapat Gabungan dipimpin oleh Presiden Komisaris, dan dapat digantikan oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa apabila Presiden Komisaris berhalangan hadir,
5. Risalah rapat gabungan harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Gabungan dan oleh Presiden Direktur atau salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan dari peserta rapat,

6. Risalah rapat asli diadministrasikan secara baik dan harus disimpan serta harus tersedia bila diperlukan,
7. *Corporate Secretary* bertugas untuk mengundang peserta rapat, membuat dan mengadministrasikan risalah rapat gabungan.

Penyelenggaraan Rapat Direksi Tahun 2021

Selama tahun 2021 telah diselenggarakan Rapat Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali dan Rapat Gabungan (Direksi dengan Dewan Komisaris) sebanyak 4 (empat) kali

Nama	Rapat Direksi		Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris	
	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Herwidayatmo	12	100%	4	100%
Hendrawan Danusaputra	12	100%	4	100%
Lionto Gunawan	12	100%	4	100%
Edy Heryanto	12	100%	4	100%
Gunawan Santoso	12	100%	4	100%
Ng Kean Yik	12	100%	4	100%
Januar Hardi	12	100%	4	100%
Suwito Tjokrorahardjo	12	100%	4	100%
Haryono Wongsonegoro	12	100%	4	100%
Antonius Ketut Dwirianto	12	100%	4	100%

Agenda Rapat Direksi

No	Tanggal	Agenda
1.	20 Januari 2021	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain
2.	18 Februari 2021	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain
3.	12 Maret 2021	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain
4.	19 April 2021	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain
5.	25 Mei 2021	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain
6.	16 Juni 2021	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain
7.	23 Juli 2021	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain

8.	20 Agustus 2021	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain
9.	15 September 2021	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain
10.	15 Oktober 2021	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain
11.	19 November 2021	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain
12.	16 Desember 2021	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain

Agenda Rapat Gabungan

No	Tanggal	Agenda
1.	20 Januari 2021	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Branch Oversight - Lain-lain
2.	19 April 2021	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Branch Oversight - Lain-lain
3.	23 Juli 2021	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Branch Oversight - Lain-lain
4.	15 Oktober 2021	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain

Pelatihan Direksi

Program pelatihan Direksi diperlukan agar Anggota Direksi dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan Direksi. Sepanjang tahun 2021, Direksi telah mengikuti training sebagai berikut:

Nama	Workshop/Training/ Seminar	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyele nggara
Herwidayatmo	Refreshment SMR	5 Februari 2021 - Online	RDS
	Efektifitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based	25 Maret 2021-Online	FKDKP

	FDG SUSTAINABLE BANKING ASSESSMENT WWF INDONESIA with PANIN BANK	28 September 2021-Online	WWF
Hendrawan Danusaputra	Refreshment SMR	5 Februari 2021-Online	RDS
Lionto Gunawan	-	-	-
Edy Heryanto	Rencana Pembentukan Task Force Nasional Keuangan Berkelanjutan	5 Agustus 2021-Online	OJK
	FDG SUSTAINABLE BANKING ASSESSMENT WWF INDONESIA with PANIN BANK	28 September 2021-Online	WWW
Gunawan Santoso	Refreshment SMR	5 Februari 2021-Online	RDS
	Refreshment Treasury Dealer Valas Level Advance	3 Desember 2021 - Online	ACI
Ng Kean Yik	Efektifitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based	25 Maret 2021-Online	FKDKP
Januar Hardi	Refreshment SMR	5 Februari 2021-Online	RDS
	FDG SUSTAINABLE BANKING ASSESSMENT WWF INDONESIA with PANIN BANK	28 September 2021-Online	WWW
Haryono Wongsonegoro	Efektifitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based	25 Maret 2021-Online	FKDKP
	Refreshment SMR	5 Februari 2021-Online	RDS
Suwito Tjokrorahardjo	-	-	-
Antonius Ketut Dwirianto	Refreshment SMR	5 Februari 2021-Online	RDS
	Efektifitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based	25 Maret 2021-Online	FKDKP
	Data Privacy Webinar Series-Seri 1 Personal Data Protection In Digital Era	24 Maret 2021-Online	Perbanas
	Rencana Pembentukan Task Force Nasional Keuangan Berkelanjutan	5 Agustus 2021-Online	OJK
	Fdg Sustainable Banking	28 September 2021-	WWW

	Assessment Wwf Indonesia With Panin Bank	Online	
	Sinergi Pemerintah, Bi Dan Ojk Dalam Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional	19 November 2021- Online	OJK

Masa Jabatan Direksi

Sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 17 tanggal 27 Januari 2021, masa jabatan seluruh anggota Direksi berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2022.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Komite-komite di bawah Direksi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Direksi. Sampai dengan Tahun 2021, PaninBank memiliki komite-komite di bawah Direksi sebagai berikut:



KOMITE MANAJEMEN RISIKO / RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC)

Komite Manajemen Risiko adalah komite eksekutif yang dibentuk oleh Direksi PaninBank sebagai wadah pengambilan keputusan dan pengevaluasian pelaksanaan, pengelolaan melalui perumusan kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Manajemen Risiko.

Struktur dan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko beranggotakan mayoritas anggota Direksi yang menjadi anggota tetap Komite Manajemen Risiko serta anggota tidak tetap yang terdiri dari Pejabat Eksekutif Bank. Penunjukkan anggota Direksi serta Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur dengan mempertimbangkan eksposur risiko Bank. Komite Manajemen Risiko terdiri dari :

Komite Manajemen Risiko	
Anggota Tetap	1. Presiden Direktur 2. Wakil Presiden Direktur 3. Direktur Bidang Manajemen Risiko 4. Direktur Bidang <i>International Banking</i> 5. Direktur Bidang <i>Treasury</i> 6. Direktur Bidang Kredit Komersial 7. Direktur Bidang Kredit Korporasi 8. Direktur Bidang Operasi dan IT 9. Direktur Bidang Kepatuhan

Anggota Tidak Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi <i>International Banking</i> 2. Kepala Divisi Likuiditas 3. Kepala Divisi <i>Currency Trading & Commercial</i> 4. Kepala Divisi <i>Capital Market</i> 5. Kepala Divisi / Head Bidang Perkreditan Konsumer 6. Kepala Divisi / Head Bidang Perkreditan Komersil 7. Kepala Divisi / Head Bidang Perkreditan Korporasi 8. Kepala Biro Manajemen Risiko 9. Kepala Biro Pengawasan dan Pemeriksaan
----------------------------	---

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila terjadi kondisi eksternal yang tidak normal. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan Pimpinan Satuan Kerja Operasional dan Pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2. Perbaiki atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan *internal* PaninBank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank serta hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
3. Penetapan (*Justification*) atas hal-hal yang berkaitan dengan keputusan-keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal (*irregularities*), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis PaninBank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui *limit* yang telah ditetapkan. *Justification* disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha bank tertentu sehingga memerlukan adanya pengecualian terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh PaninBank.

Rapat dan Kegiatan Komite Manajemen Risiko

Rapat Komite Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya mengadakan rapat 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Komite Manajemen Risiko dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) anggota komite. Sepanjang tahun 2021, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali dengan agenda sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda/Materi
1	Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Risk Appetite. Risk Tolerance and Recovery Plan • Profil Kredit & Stress Test • Rencana Transformasi • Risk Profile
2	Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Review Risk Appetite dan Risk Tolerance • Review Risk Profile Anak Perusahaan

		<ul style="list-style-type: none"> • Review Stress Test • Strest Test OJK & BI • Update EY Gap Analysis
3	April 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Satuan Kerja Manajemen Risiko • Risk Appetite & Risk Tolerance • Profil Risiko Anak Perusahaan
4	Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Risk Appetite & Risk Tolerance • Portofolio Kredit • Bottom Up Stress Test
5	Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Risk Appetite & Risk Tolerance • Portofolio Kredit
6	Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Risk Appetite & Risk Tolerance • Portofolio Kredit, Market & Likuiditas • Stress Test Komprehensif • Risk Profile Bank & Anak Perusahaan • Hasil RCSA • Update EY Project
7	Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Risk Appetite & Risk Tolerance • Recovery Plan • Portofolio Kredit, Market & Likuiditas
8	September 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Risk Appetite & Risk Tolerance • Recovery Plan • Portofolio Kredit, Operasional, Market & Likuiditas • Pengkinian Recovery Plan
9.	Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Risk Appetite & Risk Tolerance • Recovery Plan • Risk Profile • Stress Test • Anak Perusahaan
10.	November 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Risk Appetite & Risk Tolerance • Recovery Plan • Portofolio Kredit, Operasional, Market & Likuiditas • Pengkinian Recovery Plan
11.	Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Risk Appetite & Risk Tolerance • Recovery Plan • Portofolio Kredit, Operasional, Market & Likuiditas • Summary Recovery Plan

Rapat Komite Manajemen Risiko mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko dan penerapannya, serta realisasi program kerja Komite Manajemen Risiko untuk selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil rapat dan ketentuan yang berlaku.

Pengambilan Keputusan pada Rapat

Pelaksanaan pengambilan keputusan pada Rapat Komite Manajemen Risiko diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka anggota tetap yang memiliki hak suara berhak melakukan pengambilan suara (*voting*).

Keputusan rapat Komite Manajemen Risiko sah dan mengikat apabila telah disetujui oleh lebih 50% (limapuluh persen) dari jumlah anggota tetap yang hadir.

Pertanggungjawaban dan Realisasi Kerja Komite

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite Manajemen Risiko dilaporkan melalui laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko atas 8 (delapan) jenis Risiko dan hal-hal lain mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat KMR.

ASSET & LIABILITIES COMMITTEE (ALCO)

Tujuan Dibentuknya ALCO

Tujuan dibentuknya ALCO adalah untuk membantu Direksi dalam pengawasan dan pengelolaan *Asset and Liability Management* (ALMA).

Struktur dan Keanggotaan

ALCO terdiri atas anggota tetap yaitu Direksi dan anggota tidak tetap yaitu Pejabat Eksekutif Bank. Berikut merupakan rincian susunan keanggotaan ALCO:



ALCO terdiri atas anggota tetap yaitu Direksi dan anggota tidak tetap yaitu Pejabat Eksekutif Bank. Penunjukan anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur dengan mempertimbangkan cakupan penerapan GCG.

Komite ALCO	
Anggota Tetap	1. Presiden Direktur (Ketua) 2. Wakil Presiden Direktur I 3. Direktur <i>Treasury & Capital Market</i> 4. Direktur <i>Compliance</i>

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Direktur <i>Risk Management, Diigital & Liability Dev.</i> 6. Direktur <i>Commercial Banking & Mortgage</i> 7. Direktur <i>Corporate Banking</i> 8. Direktur <i>Network & Distribution</i> 9. Direktur <i>Operation & Information Teknologi</i> 10. <i>Chief Financial Officer & Planning</i> 11. Direktur <i>Human Resources, Business & IT Strategic</i>
Anggota Tidak Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi <i>Liquidity</i> 2. Kepala Divisi <i>Capital Market</i> 3. Kepala Divisi <i>Currency Trading And Commercial</i> 4. Kepala Biro Administrasi Keuangan. 5. Kepala Biro Manajemen Risiko 6. Kepala Biro Administrasi Perkreditan 7. Kepala Divisi <i>Corporate Banking</i> 8. Kepala Divisi <i>Institutional Banking & BUMN</i> 9. Kepala Divisi <i>International Operations</i> 10. Kepala Divisi <i>Commercial Banking</i> 11. Kepala Divisi <i>SMB</i> 12. Kepala Divisi <i>Mortgage</i> 13. Kepala <i>National Liabilities</i> 14. Kepala Divisi <i>Credit Card & Personal Loan</i>

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

ALCO sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menganalisis usulan dari unit bisnis/direktorat terkait manajemen aset dan kewajiban (*asset and liability management*) serta merekomendasikan strategi ALMA. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO akan bersifat *forward looking* untuk mencapai strategi ALMA Bank. Berikut adalah tugas dan tanggungjawab ALCO:

1. Mengkaji dan Mengkinikan Strategi ALMA
 - a. Melakukan evaluasi eksposur risiko suku bunga dan strategi ALMA untuk menjaga konsistensi antara posisi pengambilan risiko Bank dan tujuan dari manajemen risiko suku bunga.
 - b. Menginformasikan kepada Direksi mengenai perubahan peraturan dan perkembangannya yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.
2. Mengevaluasi berbagai Indikator Makro Ekonomi
 - a. Kondisi perekonomian domestik, antara lain:
 - i. Nilai tukar, suku bunga saat ini dan yang diharapkan di masa mendatang
 - ii. Sinyal moneter Bank Indonesia (kebijakan moneter: kontraksi atau ekspansi)
 - iii. Berbagai indikator kunci perekonomian, seperti cadangan devisa, inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan neraca pembayaran.
 - iv. Situasi politik, sosial dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi ekonomi
 - b. Konsistensi dengan manajemen suku bunga Bank.
 - c. Kondisi perekonomian internasional, antara lain:
 - i. Tren suku bunga dan kurs US \$ (Dollar) dibandingkan dengan mata uang asing utama lainnya.
 - ii. Pertumbuhan perekonomian dunia pada umumnya dan pengaruhnya terhadap Indonesia.

3. Mengkaji Penetapan Harga (*Pricing*) Aset dan Kewajiban Bank
 - a. Penetapan Harga Aset
 - i. Mengkaji penetapan harga rata-rata bulanan untuk pinjaman dalam setiap sektor usaha secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US \$)
 - ii. Mengkaji tingkat pengembalian secara historis dari:
 - 1) Aset yang sensitif terhadap tingkat suku bunga, dan
 - 2) Aset produktif (*earning asset*), terpisah untuk Rupiah dan US \$
 - 3) Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia dan OJK) pertumbuhan aset yang dimiliki Bank dibandingkan dengan rata-rata industri.
 - b. Penetapan Harga *Liability*
 - i. Mengkaji biaya dana nominal untuk setiap kategori *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga dan total biaya dana untuk seluruh *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga (terpisah untuk Rupiah dan US \$)
 - ii. Mengkaji total biaya dana untuk *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US \$)
 - iii. Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia dan OJK) pertumbuhan dana pihak ketiga yang dimiliki Bank dibandingkan dengan rata-rata industri.
 - c. Perubahan Tingkat Suku Bunga

Berdasarkan *Net Interest Margin* (NIM), pertumbuhan aset dan liabilitas, *tren* suku bunga, dan tingkat suku bunga yang dimiliki pesaing menentukan kenaikan/penurunan suku bunga secara keseluruhan atau hanya untuk beberapa sektor usaha pinjaman dan/atau beberapa jenis simpanan nasabah.
4. Mengkaji dan mengkinikan rencana pendanaan darurat secara berkala untuk memastikan efektifitas rencana pendanaan darurat tersebut, jika diperlukan.
5. Mengkaji ulang sistem, dan asumsi yang digunakan sebagai dasar untuk rekomendasi dan kebijakan ALCO, khususnya untuk mengakomodasi perubahan-perubahan eksternal, misalnya kondisi pasar dan lain- lain.
6. Sistem, dan asumsi harus dikaji kembali setiap terdapat perubahan-perubahan di pasar yang signifikan, perubahan peraturan maupun kondisi pasar dan lain-lain, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan dapat dilakukan sesering mungkin tergantung pada kondisi Perseroan dan industri perbankan.

ALCO menerima informasi mengenai kondisi regulasi dan pasar melalui:

1. Biro Kepatuhan tentang Perubahan Peraturan yang berpengaruh pada Bank.
2. Divisi Treasury, tentang:
 - a Perubahan tren likuiditas pasar,
 - b Suku bunga,
 - c Kegiatan operasi pasar terbuka Bank Indonesia,
 - d Lelang SBI dan lelang obligasi,
 - e Data ekonomi,
 - f Kurs valuta asing,
 - g Produk-produk *treasury*, dan hal-hal yang berhubungan dengan usaha *Treasury* lainnya.

3. Divisi Administrasi Kredit, yang berhubungan dengan:
- a *Consumer Banking*,
 - b *Commercial Banking*,
 - c *Corporate Banking*,
 - d *Institutional Banking & BUMN*
 - e *Perubahan* di pasar pinjaman komersial, pasar pinjaman konsumtif, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan pinjaman.

Program Kerja ALCO Tahun 2021 serta Realisasinya

Kegiatan *ALCO* dituangkan dalam bentuk rapat-rapat *ALCO* yang antara lain merupakan rapat koordinasi dalam rangka membantu Direksi melakukan pengawasan dan pengelolaan *ALMA*. Hasil rapat *ALCO* dituangkan dalam bentuk notulen rapat *ALCO*. Program kerja *ALCO* tahun 2021 tidak terlepas dari tugas-tugas dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengelolaan *ALMA*

Rapat ALCO

Selama tahun 2021 *ALCO* mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

Rincian penyelenggaraan rapat *ALCO* selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rapat ke:	Tanggal	Agenda
1	20 Jan 2021	<ul style="list-style-type: none">• Makro Ekonomi• Liquidity• Interest Rate• Exchange Rate• Capital Market• Financial Performance• Pricing Strategy• Maturity Profile• Permodalan
2	18 Feb 2021	
3	17 Mar 2021	
4	19 April 2021	
5	25 Mei 2021	
6	16 Jun 2021	
7	23 Jul 2021	
8	20 Aug 2021	
9	15 Sept 2021	
10	15 Okt 2021	
11	19 Nov 2021	
12	16 Des 2021	

Uraian mengenai Fungsi *Investor Relation*

- a. Merespon permintaan data/informasi yang dibutuhkan oleh *analyst/fund manager*
- b. Menyiapkan materi presentasi untuk *analyst meeting/conference*
- c. Menghadiri forum-forum/*analyst meeting*
- d. Mereview, mengoreksi dan melengkapi *draft 'research report'* dari analis pasar modal dan lembaga pemeringkat lainnya
- e. Menyelenggarakan *public expose* tahunan sesuai ketentuan
- f. Mengikuti *analyst meeting* sesuai penugasan Direksi

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI/ *INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE (ITSC)*

Dalam rangka menjaga penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI), maka Direksi PaninBank membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*). Tujuan Pembentukan Komite Pengarah TI adalah untuk memberikan rekomendasi serta membantu Direksi dan Komisaris dalam memantau kegiatan penyelenggaraan dan kesiapan infrastruktur TI.

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT. Bank Panin, Tbk. yaitu Surat Keputusan No.014/SK-DIR/20 tanggal 16 November 2020, susunan keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi PaninBank adalah sebagai berikut:

ITSC	
Ketua	Presiden Direktur
Wakil Ketua I	Wakil Presiden Direktur
Anggota	Direktur Operations dan IT
Anggota	Direktur HR, Business & IT Strategy
Anggota	Direktur Risk Management, Digital & Liability Dev.
Anggota	Kepala Biro Teknologi Informasi

Tugas dan Tanggungjawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI) sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkaji perencanaan strategi TI dan memantau pelaksanaan proyek-proyek TI dan terdiri dari:

1. Mengevaluasi dan meyakini perumusan kebijakan dan prosedur teknologi informasi telah dimutakhirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangan pengamanan dan manajemen risiko terkait penggunaan teknologi informasi;
2. Mengevaluasi dan meyakini bahwa Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) selaras dengan rencana strategis dan rencana Bisnis Bank serta mendukung kebutuhan sistem informasi manajemen bisnis unit atau satuan kerja dan kegiatan operasional Bank dan menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal:
 - Rencana pelaksanaan (*road map*) untuk mencapai kebutuhan teknologi informasi yang mendukung strategi bisnis PaninBank. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*;
 - Sumber daya yang dibutuhkan;
 - Keuntungan / manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
3. Mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek TI;
4. Mengevaluasi pencapaian *service level agreement* kinerja proyek TI. Komite juga melengkapi hasil evaluasi dengan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien;
5. Mengevaluasi atas kinerja teknologi informasi, dan upaya peningkatannya misalnya

- dengan mendeteksi keusangan teknologi informasi dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan teknologi informasi;
6. Mengevaluasi efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor teknologi informasi dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
 7. Meyakini kesiapan *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan*;
 8. Melakukan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh Biro Teknologi Informasi dan pengguna. Komite juga dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul; dan
 9. Mengevaluasi kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan teknologi informasi maka Komite Pengarah Teknologi Informasi harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi

Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;
2. Mendapatkan akses dan data ke dalam sistem dalam rangka melakukan pengkajian terhadap penyelenggaraan TI;
3. Meminta pihak ketiga untuk melakukan pengujian atas keamanan sistem TI.

Kegiatan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Program kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi secara berkala untuk membahas penyelenggaraan teknologi informasi yang dilakukan oleh Biro Teknologi Informasi selama tahun 2021. Hasil rapat tersebut dituangkan dalam bentuk notulen rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi sepanjang tahun 2021 telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

No	Tanggal	Agenda / Materi
1	19 Februari 2021	1. Summary Audit TI Q4 2020 2. Realisasi Rencana Kerja TI Q4 2020 3. Rencana Kerja TI Q1 2021 4. BCP & DRP
2	28 Mei 2021	1. Summary Audit TI Q1 2021 2. Realisasi Rencana Kerja TI Q1 2021 3. Rencana Kerja TI Q2 2021 4. BCP & DRP
3	26 Agustus 2021	1. Summary Audit TI Q2 2021 2. Realisasi Rencana Kerja TI Q2 2021 3. Rencana Kerja TI Q3 2021 4. BCP & DRP

KOMITE TATA KELOLA / GCG

Struktur dan Keanggotaan

Komite GCG terdiri atas anggota Direksi yang menjadi anggota tetap Komite GCG serta anggota tidak tetap yang terdiri dari Pejabat Eksekutif Perseroan yang ditetapkan. Penunjukkan anggota Direksi serta Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur dengan mempertimbangkan cakupan penerapan GCG. Berikut adalah anggota Komite GCG:

Komite GCG	
Anggota Tetap	<ol style="list-style-type: none">1. Presiden Direktur;2. Wakil Presiden Direktur3. Direktur yang membawahi <i>Commercial Banking Group</i>4. Direktur yang membawahi <i>Corporate & Credit</i>5. Direktur yang membawahi <i>Institutional Banking</i>6. Direktur yang membawahi <i>Treasury</i>7. Direktur yang membawahi <i>HR Bussiness & IT Strategic</i>8. Direktur yang membawahi <i>Compliance</i>9. Direktur yang membawahi <i>Risk Management</i>
Anggota Tidak Tetap	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Corporate Secretary</i>2. Kepala Biro Kepatuhan3. Kepala Biro Manajemen Risiko4. Kepala Biro Pengawasan dan Pemeriksaan5. Kepala Group Operations6. Kepala Biro Umum & Personalia7. Kepala Biro Akuntansi dan Keuangan8. Kepala Biro Internal Control

Kegiatan Komite GCG

Pelaksanaan kegiatan komite GCG dituangkan dalam bentuk penyelenggaraan rapat Komite. Pada tahun 2021, Komite GCG telah menyelenggarakan rapat sebanyak 2 (dua) kali. Dalam rapat tersebut, agenda/materi yang dibahas adalah mengenai hasil *Self Assessment* GCG.

Tugas dan Tanggungjawab Komite GCG

Komite GCG sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menyusun, mengkomunikasikan dan mengawasi serta melakukan tindakan-tindakan perbaikan atas kepatuhan terhadap penerapan GCG, etika, pengendalian intern, strategi anti-fraud dan terkait dengan sumber daya manusia (SDM). Berikut adalah tugas dan tanggungjawab Komite GCG atas kepatuhan terhadap hal-hal yang antara lain terdiri dari:

Penerapan GCG & Pengendalian Intern

- Mengevaluasi *Code of Corporate Governance*, *Code of Conduct*, Strategi Anti-Fraud serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Komite Direksi secara periodik untuk kemudian diserahkan kepada Biro Kepatuhan agar dapat dilakukan pengkinian.
- Memantau perencanaan, pelaksanaan dan laporan *self assessment* GCG oleh *timself-assessment* GCG.
- Mengevaluasi *governance outcome* sekurang-kurangnya sebagai berikut: Pelaporan pada regulator, Penerapan dan pengembangan budaya kepatuhan, Penyelesaian pengaduan nasabah serta pengaduan yang memerlukan penyelesaian lintas, Pelaksanaan Strategi *Anti-Fraud*, Benturan Kepentingan dan KYE sesuai perodesasi masing-masing pernyataan, Pelanggaran kepatuhan atas peraturan ekstem dan intern; dan Pelaksanaan kebijakan deponan besar dan penyediaan dana besar dan penyediaan dana kepada pihak terkait.
- Memastikan peningkatan *awareness* GCG dan budaya kepatuhan yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pengkomunikasian melalui media internal

Strategi Anti Fraud

- Memastikan peningkatan *awareness* strategi *anti-fraud* yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pengkomunikasian melalui media internal.
- Memantau dan mengawasi investigasi serta penyelesaian insiden/kejadian *fraud*.
- Memastikan BOC dan BOD mendapatkan laporan penyelesaian permasalahan/insiden *fraud* yang berdampak signifikan dan melaporkannya kepada pengawas Bank (regulator)
- Mengawasi efektivitas pelaksanaan fungsi *Fraud Manajemen Team (FMT)* dan *whistleblowing system (WBS)*.
- Memberikan rekomendasi bagi Presiden Direktur atas penanganan indikasi *fraud* berdasarkan WBS yang telah diverifikasi FMT.
- Mengawasi tindak lanjut berupa perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh unit terkait untuk mencegah *fraud* tidak terulang kembali.

Etika

- Memantau pemberian sanksi terkait pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku dan tindakan indisipliner terhadap peraturan dan ketentuan Bank serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Memantau pelatihan, *refreshment*, sosialisasi dan penginformasian Peraturan Perusahaan dan Pedoman Etika dan Perilaku.

Sumber Daya Manusia (SDM)

- Memantau pelaksanaan program-program dan kebijakan SDM terkait penerapan prinsip-prinsip GCG
- Memantau laporan pelanggaran dan pemberian sanksi

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Landasan Hukum

Komite Kebijakan Perkreditan dibentuk sebagai wujud kepatuhan Bank terhadap regulasi yang mewajibkan Bank memiliki Komite Kebijakan Perkreditan yaitu POJK Nomer 42/POJK.03/2017 yang diimplementasi melalui Surat Keputusan Direksi untuk yang terakhir kali Nomor 012/SK-DIR/21 tanggal 18 Agustus 2021.

Struktur dan Keanggotaan

Komite Kebijakan Perkreditan merupakan Komite yang berada di bawah Direksi yang memiliki keanggotaan terdiri dari beberapa Direksi sebagai anggota tetap Direksi dan beberapa pejabat eksekutif sebagai anggota tetap lainnya, yaitu sebagai berikut ;

Anggota Tetap Direksi:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. President Direktur | Sebagai Ketua |
| 2. Wakil President Direktur | Sebagai Wakil Ketua |
| 3. Direktur Corporate Banking | Sebagai Anggota |
| 4. Direktur Commercial Banking & Mortgage | Sebagai Anggota |
| 5. Direktur Risk Management, Digital & Liability Dev. | Sebagai Anggota |
| 6. Direktur Compliance, Legal Affair & AML | Sebagai Anggota |

Anggota Tetap Direksi:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. EVP Finance & Planning CFO | Sebagai Anggota |
| 2. Commercial Banking Head | Sebagai Anggota |
| 3. SMB Head | Sebagai Anggota |

4. Mortgage Head	Sebagai Anggota
5. Corporate Banking Group Head	Sebagai Anggota
6. Kepala Bagian Unit I Corporate Banking	Sebagai Anggota
7. Kepala Bagian Unit II Corporate Banking	Sebagai Anggota
8. Institutional Banking & BUMN Head	Sebagai Anggota
9. Kepala Bidang Direct Financing	Sebagai Anggota
10. Kepala Divisi Administrasi Kredit	Sebagai Anggota
11. Kepala Biro Manajemen Risiko	Sebagai Anggota
12. Kepala Biro Administrasi Keuangan	Sebagai Anggota
13. Kepala Satuan Kerja Audit Intern	Sebagai Anggota
14. CRR & SAM Cordinator	Sebagai Anggota

Fungsi Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan memiliki fungsi, diantaranya ;

- a. Menilai/ mengkaji kebijakan perkreditan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian;
- b. Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan agar dilaksanakan secara konsisten;
- c. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kondisi portofolio kredit.

Kegiatan Komite Kebijakan Perkreditan ;

Komite Kebijakan Perkreditan memiliki aktivitas sesuai dengan fungsi dan perannya yang dituangkan dalam aktivitas rapat dengan frekuensi per triwulan namun dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan dan hasil dari rapat disampaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Komisaris dalam bentuk notulen rapat.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DAN SUKSESI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Komposisi Keberagaman Dewan Komisaris

Komposisi keberagaman anggota Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi kelembagaan Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Tabel Komposisi Keberagaman / Profil Anggota Dewan Komisaris

Nama	Warga Negara	Usia	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Nelson Tampubolon	WNI	68	Presiden Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> Fakultas Ekonomi, Universitas Parahyangan Arthur D. Little Management Institute, Boston 	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama PT MNC Capital Indonesia Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Anggota Dewan Komisiner ex officio OJK pada Lembaga Penjamin Simpanan Direktur Direktorat International Bank Indonesia
Lintang Nugroho	WNI	65	Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> International Trade & Business di UCLA – LA, CA, USA Executive Management Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA Manajemen Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Presiden Komisaris PaninBank Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero. Direktur Operasi & IT Komisaris PT Bank Shinta Indonesia Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia. Kepala Divisi Operasi PT Bank Niaga
Chandra Rahardja Gunawan	WNI	63	Wakil Presiden Komisaris	Business Administration, University of San Francisco, Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Presiden Komisaris PaninBank. Wakil Presiden Direktur PaninBank. Vice President Chase Manhattan Bank
Drs. H. Riyanto	WNI	76	Komisaris Independen	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris PaninBank Komisaris di PT Bank Mitra Niaga Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan
Johnny	WNI	69	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> Akademi Bank Nasional Jurusan Ilmu Keuangan Perbankan 	<ul style="list-style-type: none"> Presiden Komisaris PaninBank. Direktur Tresuri PaninBank

				<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Asisten Manajer PaninBank
Gregory James Terry	WNA	77	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Fakultas Hukum, University of Melbourne • Master of Arts, Tuft University Chicago 	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Hukum Oentoeng Suria and Partners • Pejabat Eksekutif JM Financial Limited • General Counsel di Morgan Stanley untuk Asia • Direktur Operasional di Brierley Investments Limited • Country Manager Credit Suisse Bank, Austria • Jardine Fleming Investment Bank

Komposisi Keberagaman/ Profil Direksi

Komposisi keberagaman Direksi merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Direksi Perusahaan Terbuka sebagaimana di tuangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Tabel Komposisi Keberagaman / Profil Direksi

Nama	Warga Negara	Usia	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Herwidayatmo	WNI	65 tahun	Presiden Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta - Master Business Administration dari Saint Mary's University, Halifax, Nova Scotia 	<ul style="list-style-type: none"> - Presiden Direktur Bank Panin - Wakil Presiden Direktur PT Bank Permata - Direktur Hukum dan Kepatuhan PT Bank Permata - Executive Director World Bank untuk Asia Tenggara - Ketua Bapepam - Deputi Menteri BUMN bidang Restrukturisasi dan Privatisasi
Hendrawan Danusaputra	WNI	57 tahun	Wakil Presiden Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Computer Science, University of Technology, Sydney, Australia 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Institutional Banking PaninBank - Vice President Divisi Internasional - Komisaris PT Clipan Finance - Direktur Financial Institution di American Express Bank
Lionto Gunawan	WNI	54 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Finance, San Francisco State University, 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Umum dan SDM PaninBank

				Amerika Serikat	- Direktur di ANZ PaninBank - Manager Westpac PaninBank
Edy Heryanto	WNI	57 tahun	Direktur	- Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan - Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia	- Direktur Perbankan Komersial PaninBank - Vice President dan Pemimpin KCU Jakarta Palmerah - Credit Analyst, Bank Universal
Gunawan Santoso	WNI	54 tahun	Direktur	Fakultas Teknik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	- Direktur Tresuri PaninBank - Komisaris di PT Verena Multi Finance - Komisaris di PT Clipan Finance Tbk
Ng Kean Yik	WNA	66 tahun	Direktur	- Jurusan Commerce University of Melbourne, Australia - Master Business Administration, University of Melbourne, Australia	- Direktur Perbankan Ritel PaninBank - Group Manager Retail Banking PaninBank - Head Portfolio Management ANZ Bank - Executive Group Strategy ANZ Bank
Januar Hardi	WNI	58 tahun	Direktur	Peternakan/Ilmu Ekonomi Peternakan, Institut Pertanian Bogor (IPB)	- Direktur Perbankan Korporasi Bank Panin - Vice President Head Of Corporate Banking Bank Panin - Asst. Vice President Unit Head Corporate Banking Group Bank Panin - Senior Manager Unit Head Corporate Banking Group Bank Panin - Manager Unit Head Corporate Banking Group Bank Panin - Account Manager Consumer Banking Junior Officer Consumer Banking
Suwito Tjokrorahardjo	WNI	57 tahun	Direktur	- Universitas Surabaya - Universitas Pelita Harapan dengan Magister bidang Ekonomi/Marketing	- Branch Banking Division Head PaninBank - Branch Network & Operations Group Head PaninBank - Citibank - Lippo Bank
Antonius Ketut Dwirianto	WNI	54 tahun	Direktur	- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) bidang Keuangan dan Perbankan Yogyakarta - Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI) - Pelatihan di bidang	- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PaninBank - Kepala Biro Compliance PaninBank - Branch Manager Bank CIC - Account Officer Bank CIC

				<p>Credit Analysis of Agricultural Trade Finance di Iowa State University, Amerika Serikat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta - Magister Hukum Bisnis dari Universitas Pelita Harapan - Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana dari Universitas Jayabaya 	
Haryono Wongsonegoro	WNI	57 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana bidang Akuntansi, Universitas Putra Bangsa Surabaya (1990) - Master of Management, Universitas Udayana Bali (2004) 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Jaringan dan Distribusi PaninBank (2020-sekarang) - Kepala Kantor Wilayah Jakarta Bank Central Asia (2011-2019) - Kepala Bisnis Kecil dan Menengah (SME) dan Bisnis Komersial Bank Central Asia (2009-2011) - Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Bank Central Asia (2005-2009) - Pemimpin KCU Bank Central Asia (1995-2005) - Wakil Pemimpin KCU Bank Central Asia (1993-1995) - Kepala Tim Audit Internal Bank Central Asia (1989-1993) - Auditor di Kantor Akuntan Publik (1987-1989)

PENILAIAN KANDIDAT KOMISARIS DAN DIREKTUR

Indikator Penilaian Kandidat Komisaris dan Direktur

Sebagai Bank yang mengedepankan prinsip kehati hatian, sebagai salah satu kriteria penting dalam proses nominasi dan suksesi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Disamping itu, latar belakang pengalaman, pengetahuan dan keahlian dalam bidang yang akan dijabat diupayakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga mendapatkan komposisi Direksi yang mampu bekerja secara optimal.

Kualitas individu dan pengetahuan yang baik mengenai budaya perusahaan tersebut merupakan salah satu faktor yang penting. Kandidat dapat berasal dari eksternal, ataupun dari staf senior yang memiliki potensi untuk menjadi Direksi yang telah dipersiapkan melalui rencana pengembangan karyawan perusahaan. Saat ini, lebih dari 90% (Sembilan puluh

persen) anggota Direksi PaninBank merupakan Kader Internal yang mayoritas sebelumnya telah berpengalaman operasional Bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

Prosedur Pengajuan Kandidat Komisaris dan Direktur

Proses Identifikasi Kandidat yang memenuhi syarat dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan cara meneliti latar belakang dan *track record* kandidat, tanpa membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama. Komite Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris, selanjutnya Dewan Komisaris akan meminta Direksi mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*) serta diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Luar Biasa untuk mendapat persetujuan dan pengesahan. Adapun prosedur pengajuan kandidat Komisaris dan Direktur adalah sebagai berikut:



Program Orientasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Baru

Program Pengenalan atau Orientasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Baru menindaklanjuti pengangkatan anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris, tujuan program orientasi ini adalah untuk memberikan pengenalan secara umum mengenai kondisi perusahaan agar anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat menjalin kerja sama sebagai tim yang solid, mengingat latar belakang mereka yang berbeda-beda. Adapun materi yang disampaikan dalam program orientasi sebagai berikut :

1. Overview peran, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
2. Penerapan kepatuhan dan GCG serta Risk Management
3. Hasil Audit PaninBank
4. Penerapan Budaya Perusahaan
5. Overview Bisnis PaninBank

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat Komisaris dan Direksi baru

KEBIJAKAN REMUNERASI PANINBANK

Prosedur Penetapan Remunerasi Dan Fasilitas Dewan Komisaris Dan Direksi

Dewan Komisaris

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Direksi

Sedangkan ketentuan tentang besarnya gaji atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Adapun prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:



Kebijakan Remunerasi bagi Direksi

Kriteria penetapan remunerasi bagi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Prestasi kerja individual;
2. Tingkat inflasi;
3. Kewajaran dengan *peer group*;
4. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Indikator kinerja untuk mengukur penetapan remunerasi bagi Direksi & Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Perseroan;
2. Hasil pemeriksaan internal maupun eksternal;
3. Penyelesaian terhadap permasalahan yang berkembang (jika ada).

Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan jangka panjang/pasca kerja untuk setiap anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Gaji
2. Tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan Bank

Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi:

- kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut; dan
- kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (*Malus*), atau ditarik kembali dalam hal sudah dibayarkan (*Clawback*);
- kebijakan pembayaran (*vesting*) atas penangguhan yang dilakukan antara lain jangka waktu pembayaran; dan
- pengungkapan faktor yang menentukan perbedaan Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan diantara Pegawai atau kelompok Pegawai, jika ada;

Pemberian remunerasi terkait kinerja dan risiko dengan menentukan MRT (*Material Risk Taker*) dan perhitungan *Malus* dan *Clawback*.

Penggunaan Konsultan

PaninBank menggunakan jasa konsultan

1. Steven & Mourits dengan tugas menyusun perhitungan aktuarial terkait dengan pensiun dan/ atau pesangon karyawan
2. *Wyr Solution* dengan tugas membantu memperkuat Organisasi PaninBank melalui pengembangan *onboarding* untuk rekrutmen dan mengidentifikasi talent-talent yang ada.

Paket Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket/ kebijaksanaan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi yaitu terdiri dari honorarium bagi Dewan Komisaris dan Gaji bagi Direksi.

Tabel Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam Tahun 2021	
		Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	6	8.262
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transport taksi, asuransi kesehatan dan sebagainya yang*): a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	2	219
TOTAL			8.481

*) dinilai dalam ekivalen Rupiah

Tabel Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam Tahun 2021	
		Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	10	44.403
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transport taksi, asuransi kesehatan dan sebagainya yang *) : a. Dapat dimiliki	9	3.838

	b. Tidak dapat dimiliki		
TOTAL			48.241

*) dinilai dalam ekivalen Rupiah

Tabel Jumlah Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris per orang dalam Tahun 2021

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
di atas Rp 2 miliar	10	2
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar		2
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar		2
Rp 500 juta ke bawah		

*) yang diterima secara tunai

Remunerasi yang bersifat Variabel

Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi:

1. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut, bentuk remunerasi yang bersifat variabel adalah pemberian Gratifikasi yang didasarkan pada hasil kinerja; dan
2. Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel diantara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor-faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.

Tabel Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal pada tahun 2021 sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi Yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	5.694	171,324

Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai

Pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga) pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja, adapun jumlah dan total nominal pesangon yang dibayarkan disampaikan pada tabel sebagai berikut:

Jumlah nominal pesangon yang dibayarkan	Jumlah Pegawai
Lebih dari Rp. 1 Miliar	-
Lebih dari Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	-
Kurang dari Rp. 500 Juta	3

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji karyawan, Direksi, maupun Dewan Komisaris pada Tahun 2021 dan perbandingannya dengan Tahun 2019 dan 2020, dapat digambarkan sesuai tabel berikut:

No	Keterangan	Ratio 2019	Ratio 2020	Ratio 2021
1	Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	48.37 : 1	47.72 : 1	50.00 : 1
2	Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2.08 : 1	2.17 : 1	1.90 : 1
3	Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	2.49 : 1	3.95 : 1	3.95 : 1
4	Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1.96 : 1	1.77 : 1	1.69 : 1

Keterangan: * Pegawai adalah pegawai tetap bank sampai batas pelaksana

FUNGSI KEPATUHAN

Kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan. Kompleksitas kegiatan usaha Bank tersebut memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank, dimana salah satu risiko yang dihadapi Bank adalah risiko Kepatuhan.

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Perseroan diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat *preventif (ex-ante)* maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat *ex-ante* dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Perseroan.

Tindakan-tindakan preventif yaitu dengan meyakini bahwa seluruh kegiatan usaha, kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur bank telah patuh terhadap ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Diharapkan dengan tindakan preventif tersebut, maka bank dapat menghindari atau mengurangi dampak apabila terdapat suatu kejadian risiko (*risk event*). Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana dimaksud diatas, diperlukan peningkatan peran dan Fungsi Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan yang ada pada Perseroan sehingga potensi risiko kegiatan usaha Perseroan dapat diantisipasi lebih dini.

Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi kepatuhan dan mengkoordinasi peningkatan dan penumbuhkembangan budaya kepatuhan di Perseroan. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Piagam Kepatuhan PaninBank, kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan merupakan suatu kewajiban seluruh organ dan karyawan Perseroan sehingga tercipta sebuah Budaya Kepatuhan.

Sejalan dengan penunjukan Bank Panin sebagai Entitas Utama, Bank Panin telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Melakukan pelaporan Kepatuhan Terintegrasi atas pelaksanaan kepatuhan dalam Konglomerasi Keuangan Bank Panin secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris Bank selaku Entitas Utama.

- Melakukan penyelarasan alur kerja kepatuhan dengan Satuan Kerja Kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) anggota Konglomerasi Keuangan Bank Panin, untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan serta meminimalisasi eksposur risiko kepatuhan di masing-masing LJK

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, secara struktur organisasi, PaninBank memiliki seorang Direktur Kepatuhan, dimana dalam menjalankan tugasnya Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang dikepalai oleh seorang Kepala Biro (Kepala Satuan Kerja Kepatuhan).

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Berikut adalah tabel struktur organisasi Kepatuhan PaninBank:



Secara garis besar pelaksanaan Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> - Berperan aktif dalam melakukan pengawasan fungsi kepatuhan Bank - Memberikan masukan bagi peningkatan fungsi kepatuhan Bank
Direksi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengelola Bank dengan selalu patuh terhadap ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku - Mendukung terwujudnya Budaya Kepatuhan di masing-masing Unit Kerja yang menjadi area tanggung jawabnya
Satuan Kerja Kepatuhan	Melaksanakan fungsi kepatuhan sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Satuan Kerja Kepatuhan
Satuan Kerja Audit Intern	Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan, dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Piagam dan Rencana Kerja Audit Intern
Divisi/Biro/Group/Cabang	Meyakini ketepatan dan pemenuhan pelaporan yang diperlukan dan melaksanakan kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Biro Kepatuhan (*Compliance*)

Bank memiliki Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan (Biro Kepatuhan) yang dipimpin oleh seorang Direktur Kepatuhan. Adapun proses pengangkatan Direktur Kepatuhan PaninBank harus sesuai dengan ketentuan, yaitu ditunjuk dan diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dan telah memperoleh persetujuan dari Regulator Perbankan.

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Kepala Biro Kepatuhan yang membawahi Satuan Kerja Kepatuhan (Biro Kepatuhan).

Ruang Lingkup Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan lain yang berlaku;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan kebijakan ketentuan Regulator Perbankan serta peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Tugas dan Tanggungjawab Biro Kepatuhan

Dalam upaya meningkatkan efektifitas penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, maka PaninBank telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada Biro Kepatuhan Bank untuk:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi sesuai strategi peningkatan Budaya Kepatuhan yang disusun Direktur Kepatuhan;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Regulator Perbankan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Regulator Perbankan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, hal ini dapat dilakukan bekerja sama dengan unit terkait;
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator Perbankan dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Profil Kepala Biro Kepatuhan

Berikut adalah informasi mengenai Kepala Biro Kepatuhan:

1. Nama pejabat : Wahyu Wardhanakusuma
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta
4. Riwayat Pendidikan : Sarjana Hukum – Universitas Padjajaran, Bandung
5. Riwayat jabatan : - Kepala Unit Kepatuhan (2008-2010)
- Kepala Bagian Kepatuhan (2010-2011)
- Kepala Biro Kepatuhan (2011-sekarang)
6. Dasar hukum penunjukan: Surat Penunjukan No. 018/DIR/BCO/SJ/11 tanggal 13 September 2011
7. Kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki:
 - Sertifikasi Manajemen Risiko – Level 4 (2021)
 - Sertifikasi Kepatuhan Level 1 (2015)

Kriteria Kepala Biro Kepatuhan

Adapun kriteria bagi Kepala Biro Kepatuhan terdiri dari:

1. Memenuhi persyaratan independensi;
2. Menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan; dan
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*).

Kualifikasi Personel Biro Kepatuhan

Biro Kepatuhan baik secara kolektif maupun perorangan harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai anggota yaitu:

1. Memiliki pengetahuan atas peraturan perundang-undangan terkait dengan operasional bank, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya;
2. Memiliki kemampuan melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*);
3. Memiliki keahlian komunikasi, *interpersonal*, negosiasi, dan kemampuan korespondensi yang baik.

Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Kepatuhan Tahun 2021

Adapun upaya dan langkah yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan selama tahun 2021, antara lain sebagai berikut:

Upaya dan Langkah Satuan Kerja Kepatuhan	
Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian informasi atas ketentuan regulator yang terbaru - Pengkinian database peraturan perbankan dan ketentuan terkait lainnya.. - Hal-hal yang disampaikan antara lain mengingatkan kepada Unit Kerja untuk mematuhi ketentuan terbaru dan melakukan penyesuaian pada Buku Pedoman Internal Unit Kerja apabila diperlukan
Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan pemenuhan atas prinsip kehati hatian <i>Financial Key Point</i> Bank, antara lain : Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (CAR), <i>Non Performing Loan (NPL)</i>, Posisi Devisa Neto (PDN), dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). - Pemantauan atas kewajiban penyampaian pelaporan oleh Unit Kerja kepada regulator/pihak eksternal. - Pemantauan atas teguran/sanksi yang diterima oleh PaninBank disebabkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. - Pemantauan atas komitmen Bank terhadap Hasil Pemeriksaan OJK, PPATK dan BI. - Pemantauan, menganalisa dan mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan. - Pemantauan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dimana PaninBank ditunjuk sebagai Entitas Utama.
Pelatihan	<p>Pendidikan dan pelatihan diberikan kepada pegawai maupun calon pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan. Hal ini bertujuan untuk membangun/meningkatkan kesadaran dari individu akan pentingnya menjalankan fungsi kepatuhan pada kegiatan usaha Perbankan. Adapun bentuk pelatihan yang diberikan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam <i>training</i> Program Pengenalan Bank terdapat sesi mengenai Standar Kehati hatian Perbankan, maupun APU PPT, dimana peserta <i>training</i> adalah calon pegawai / pegawai baru. - Karyawan pada Biro Kepatuhan diikutsertakan dalam sertifikasi Manajemen Risiko dan sertifikasi Kepatuhan. - Diadakannya rapat kerja petugas UKPN Cabang dengan tujuan <i>refreshment</i> atas ketentuan APU dan PPT untuk diterapkan dalam lingkup kerja masing-masing Cabang.
Pembinaan	<p>Pembinaan diberikan kepada Unit Kerja/ Cabang sesuai dengan ketentuan yang ada. Upaya pembinaan dapat dilakukan melalui memorandum/ surat pembinaan, dengan tujuan agar Unit Kerja/Cabang memperhatikan prinsip Kepatuhan dan tidak terjadi kembali pelanggaran ketentuan dimasa yang akan datang.</p>
Pemberian Opini / Review	<p>Opini Kepatuhan terhadap aktivitas/kegiatan Bank antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana penerbitan Produk Bank baru maupun pengembangan - Pembuatan/ pengkinian Kebijakan/ Buku Pedoman/ ketentuan internal Bank - Pemberian fasilitas <i>Lending</i> (Kredit maupun Treasury) tertentu. - Kegiatan yang berkaitan dengan APU PPT - Kegiatan yang berkaitan dengan unit kerja legal affair seperti: pemberian opini hukum, pengkajian perkembangan hukum, pengkajian kontrak/ perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga
Pelaporan	<p>Biro Kepatuhan telah mengembangkan sistem <i>early reminding</i> dalam upaya menjaga kepatuhan atas ketepatan waktu / menghindari keterlambatan penyampaian laporan.</p>

Lain-Lain	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan kebijakan dan prosedur Satuan Kerja Kepatuhan, APU PPT dan Legal Affair telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Berperan sebagai contact person bagi otoritas berwenang terkait dengan penerapan APUPPT (antara lain PPATK, KPK, Dirjen Pajak, BNN dan Penegak Hukum lainnya) - Sebagai <i>Liaison Officer</i> antara Perseroan dengan pemeriksa dalam kegiatan pemeriksaan oleh regulator (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK).
------------------	--

Selama tahun 2021, terdapat pelanggaran yang terjadi atas ketentuan regulasi antara lain:

No	Tanggal	Nomor dan Perihal Surat	Jenis Sanksi
1	05 Februari 2021	*) Surat OJK No: SR-9/PB.33/2021 Perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan Bersama (<i>Joint Audit</i>) OJK dan PPATK Atas Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) bank Saudara Posisi 30 Juni 2020.	Rp.709.700.000,-
2	03 Maret 2021	*) Surat PPATK No.B/167/PN.01.02/III/2021 Perihal : Tanggapan atas Surat Saudara No.050/DIR/EXT/21 tanggal 26 Februari 2021 perihal Laporan Perkembangan Perbaikan Sistem Pelaporan PT. Bank Panin Tbk.	Teguran
3	02 Maret 2021	**) Surat BI No: 23/49/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs Perihal: Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar atas Penyampaian Koreksi Laporan Secara <i>Offline</i> Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)	Rp.1.000.000,-
4	01 April 2021	*) Surat BI No: 23/60/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B Perihal: Laporan Harian Bank Umum (LHBU)	Rp.500.000,-
5	08 Juni 2021	*) Surat BI No: 23/4/DPKL-GPLB/Srt/Rhs Perihal: Penyampaian Laporan Bank Umum Terintegrasi	Teguran
6	14 Juni 2021	**) Surat OJK No : SR-63/PB.33/2021 Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT Bank Panin Tbk posisi 30 September 2020	Rp.69.200.000,-
7	13 Juli 2021	*) Surat OJK No : SR-13/PB.331/2021	Rp.2.400.000,-

		Perihal : Pengenaan Sanksi Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) periode Koreksi Laporan Bulan September 2020 dan Februari 2021 Bank Saudara.	
8	11 Agustus 2021	*) Surat OJK No : SR-283/EP.123/2021 Perihal : Surat Pembinaan Iklan Perbankan pada Media Sosial Cashbac (Promo Food & Beverages) Triwulan 2 2021.	Teguran
9	11 Agustus 2021	*) Surat OJK No : SR-287/EP.123/2021 Perihal : Surat Pembinaan Iklan Perbankan pada Media Sosial Cashbac (Promo Ramadhan Deals) Triwulan 2 2021.	Teguran
10	11 Agustus 2021	*) Surat OJK No : SR-290/EP.123/2021 Perihal : Surat Pembinaan Iklan PT. Bank Pan Indonesia Tbk Triwulan 2 2021.	Teguran
11	11 Agustus 2021	*) Surat OJK No : SR-285/EP.123/2021 Perihal : Surat Pembinaan Iklan Perbankan pada Media Sosial Cashbac (Promo McDonalds) Triwulan 2 2021.	Teguran
12	18 Agustus 2021	*) Surat BI No : 23/8/DPKL/Srt/Rhs Perihal : Penyampaian Laporan dan Kualitas Data Laporan Bank Umum Terintegrasi	Teguran
13	27 Agustus 2021) Surat OJK No : SR-51/EP.331/2021 Perihal : Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) PT. Bank Panin Tbk Tahun 2020.	Teguran
14	03 September 2021	*) Surat BI No : 23/44/DPKL-GPLB/Srt/Rhs Perihal : Penyampaian Laporan Bank Umum Terintegrasi	Teguran
15	10 September 2021	*) Surat OJK No : S-407/EP.121/2021 Perihal : Tanggapan keberatan sanksi administratif	Rp.1.200.000,-
16	07 Desember 2021	*) Surat BI No : 23/225/DPKL-GPLB/Srt/Rhs	Teguran

		Perihal : Penyampaian Laporan Bank Umum Terintegrasi	
	Total		784.000.000

Namun demikian PaninBank akan terus berupaya meningkatkan Fungsi Kepatuhan Bank untuk menjadi semakin baik.

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU & PPT)

Sebagai bentuk Kepatuhan PaninBank atas peraturan perundang undangan dan berbagai peraturan lainnya terkait Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT), Penerapan Prinsip APU & PPT yang dilakukan oleh PaninBank antara lain mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03./2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan, serta Keputusan dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Secara berkala regulator seperti OJK, PPATK maupun Auditor Internal PaninBank melakukan pengawasan atau audit atas pelaksanaan penerapan Prinsip APU & PPT di PaninBank.

Untuk mendukung penerapan Prinsip APU & PPT di PaninBank, PaninBank telah memiliki satuan kerja khusus yang disebut Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) yang dikoordinasikan melalui Biro Kepatuhan. Penerapan Prinsip APU & PPT di PaninBank melalui petugas UKPN baik di Kantor Pusat maupun di setiap Kantor Cabang Utama dengan jumlah minimal 1 (satu) orang Petugas UKPN (*dedicated officer*) di setiap Kantor Cabang Utama dengan didukung oleh sistem yang ada telah menjalankan Program APU & PPT.

Dalam rangka menerapkan Prinsip APU & PPT, secara konsisten dan berkelanjutan unit UKPN PaninBank melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabah, serta mengidentifikasi risiko APU PPT berdasarkan NRA, SRA dengan kriteria paramater negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
2. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU & PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi;

3. Memastikan serta mengembangkan sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
4. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha PJK, volume transaksi PJK, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
5. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU & PPT;
6. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
8. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK serta ketentuan;
9. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU & PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*;
10. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU & PPT terhadap satuan kerja terkait;
11. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU & PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan dan sumber informasi yang memadai;
12. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh UKPN Cabang;
13. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
14. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU & PPT terlaksana dengan baik;
15. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU & PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK;
16. Berperan sebagai *contact person* bagi regulator dan instansi yang berwenang terkait dengan penerapan program APU & PPT;
17. Berperan aktif terhadap pengkinian data nasabah.

Disamping itu, UKPN juga telah melaksanakan kewajiban penyampaian data jumlah nasabah kepada PPATK guna kepentingan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT). UKPN juga telah menindaklanjuti permintaan data informasi nasabah yang diperlukan oleh Regulator, Instansi Pemerintah dan Instansi Keuangan yang berwenang lainnya, serta telah menindaklanjuti permintaan dan pencabutan pemblokiran harta kekayaan nasabah PaninBank

sesuai dengan permintaan dari lembaga yang berwenang diantaranya yaitu Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kegiatan lain yang telah dilakukan PaninBank dalam mendukung program APU & PPT yaitu menyampaikan kuesioner berkaitan dengan APU & PPT kepada Bank Koresponden atau Bank yang memiliki kerjasama fasilitas kredit. Penyampaian kuesioner ini merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip APU & PPT pada PaninBank dalam kegiatan *Cross Border Correspondent Banking* (CBCB) sebagaimana diwajibkan oleh rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) dan ketentuan Bank Indonesia. Melalui upaya-upaya sebagaimana dijelaskan diatas, PaninBank berkomitmen penuh untuk mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta menciptakan sistem perbankan yang sehat.

Kegiatan terkait Pelaksanaan Program APU & PPT

Sepanjang Tahun 2021, kegiatan terkait pelaksanaan Program APU & PPT yang telah dilaksanakan PaninBank adalah sebagai berikut:

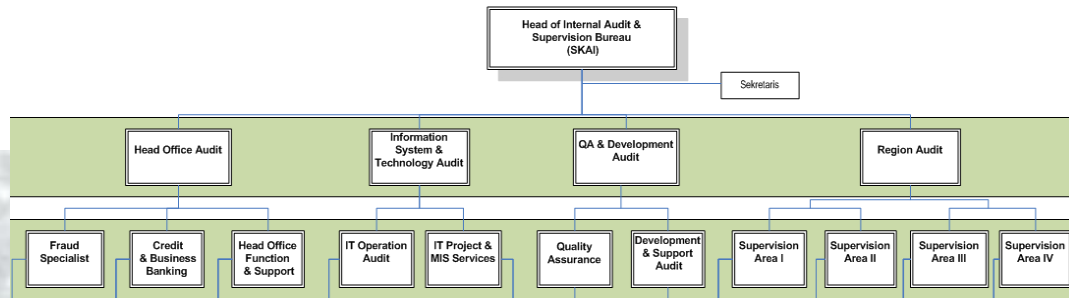
1. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (LTKM) selama periode bulan Januari sampai dengan Desember adalah sebanyak 32.796 (Tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) laporan yang terdiri dari 32.668 (Tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan) LTKT dan 128 (Seratus dua Puluh delapan) LTKM.
2. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri / *International Fund Transfer Instruction* (IFTI) selama periode bulan Januari sampai dengan Desember adalah sebanyak 176.356 (Seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam) laporan.
3. PaninBank senantiasa melakukan korespondensi dengan Kantor Pajak untuk menindaklanjuti surat-surat dari Kantor Pelayanan Pajak selama periode bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021.
4. Sosialisasi dan *Refreshment* ketentuan APU & PPT dan/atau Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah/*Know Your Customer* (KYC) *Principle* dan *Enhancement* Aplikasi APU & PPT. Dalam rangka penerapan program APU & PPT dan prinsip pengenalan nasabah pada PaninBank, PaninBank senantiasa melakukan sosialisasi dan *refreshment* berkaitan dengan ketentuan APU & PPT dan penyempurnaan serta peningkatan Aplikasi APU & PPT yang digunakan oleh PaninBank. Kegiatan tersebut antara lain:
 - a. *Refreshment* dan *Train to Trainers* APU & PPT kepada Petugas UKPN dari seluruh Kantor Cabang Utama PaninBank yang telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan selanjutnya dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - b. *Refreshment* dan *Train to Trainers* APU & PPT oleh Petugas UKPN dari masing-masing Kantor Cabang Utama PaninBank kepada Kantor Cabang Pembantu yang diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - c. *Sosialisasi* Program APU & PPT kepada seluruh karyawan baru PaninBank terutama karyawan baru yang berhubungan langsung dengan nasabah (*frontliners*).
 - d. *Penyempurnaan / enhancement* Aplikasi APU & PPT.

AUDIT INTERNAL

Struktur dan Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal

Struktur dan kedudukan unit audit internal dan Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Internal.

Dalam struktur organisasi Bank Panin, Unit Audit Internal (SKAI) dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur



Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SKAI

Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit

Profil Kepala SKAI

Berikut adalah informasi mengenai Kepala SKAI:

1. Nama pejabat : Herbert J.S. Sibuea
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Jakarta
2. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan
Berkarir di PaninBank sejak Januari 1997. Dimulai dari mengikuti Program Pendidikan *Internal Audit Officer* Bank Panin Angkatan 1, menjadi Koordinator SKAI KC Palmerah dan Batam, sebagai *Operations Manager* di KC Serang dan *Centralized Processing Head* di KC Palmerah, dan menjabat sebagai Kepala Biro Pengawasan & Pemeriksaan (Satuan Kerja Audit Intern/ SKAI) sejak Januari 2009.

Dasar hukum penunjukan:

- a. Surat tgl 24 Desember 2008, No. 008/DIR/JAP/SJ, Perihal Surat Penunjukan Jabatan
- b. Surat tgl 24 Desember 2008, No. 344-DIR-KBI-08, Perihal Pengangkatan Kepala SKAI

Kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki : Sertifikasi Manajemen Risiko – Level 4.

Visi dan Misi SKAI

Adapun visi dan misi SKAI adalah sebagai berikut:

1. Visi:

Menjadi mitra kerja strategis (*strategic partner*) yang *independent, objektif*, profesional dan *respectable*.

2. Misi:

Memberikan layanan Audit *Intern* secara profesional untuk memastikan terwujudnya bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional yang merupakan kepentingan dari para pihak *stakeholders*.

Piagam Audit Internal

Audit Internal PT. Bank Panin, Tbk telah memiliki Piagam Audit Internal yang dikinikn pada tanggal 21 April 2021, yang telah diselaraskan dengan ketentuan regulator yaitu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.1/POJK.03/2019 tentang penerapan fungsi audit intern pada bank umum, dimana secara garis besar Piagam Audit Internal berisi : Visi/ Misi, Kedudukan, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Ruang Lingkup Kegiatan, Independensi, Persyaratan, dan Kode Etik Auditor Internal.

Komposisi Tenaga Kerja Audit Internal

Pada Tahun 2021 SKAI memiliki total 145 (seratus empat puluh lima) auditor dengan klasifikasi masa kerja sebagai berikut:

Masa Kerja	Total Auditor
0 – 4 tahun	10
5 – 9 tahun	6
10 – 14 tahun	79
≥ 15 tahun	50

Adapun program sertifikasi yang telah dilaksanakan oleh Auditor Internal selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sertifikasi	Total Auditor
<i>Certified Fraud Examiner (CFE)</i>	1

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

SKAI bertanggungjawab untuk memastikan bahwa proses *governance, risk management*, dan *compliance* telah memadai dan berfungsi secara efektif.

Kepala SKAI/ Biro Pemeriksaan dan Pengawasan (BPP) mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagai berikut:

Bertanggung jawab untuk:

1. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit internal;
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit internal;

3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta dana;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Tanggungjawab SKAI/BPP

SKAI/BPP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses *Good Corporate Governance, Risk Management, dan Compliance (GRC)* telah memadai serta berfungsi secara efektif.

Kepala SKAI/BPP mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab untuk:

- a. Memastikan pelaksanaan fungsi audit internal sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal dan Kode Etik Audit Internal,
- b. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI, serta memastikan staf Satuan Kerja Audit Internal mengikuti pengembangan kompetensi, profesionalisme, dan pengalaman sesuai dengan perkembangan kompleksitas serta kegiatan usaha Bank,
- c. Menyusun Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) beserta anggaran, dan memastikan realisasinya telah berjalan sesuai dengan rencana.
- d. Melaporkan temuan *significant* beserta hasil pemantauan tindak lanjut perbaikannya dalam waktu yang cepat kepada Presiden Direktur dan Direksi terkait, serta melaporkan tindak lanjut perbaikannya juga kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
- e. Melaksanakan fungsinya sebagai SKAI Entitas Utama, bekerjasama dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit intern di Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin

2. Berkewajiban untuk:

- a. Menyampaikan laporan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur terkait serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan,
- b. Menyiapkan laporan pelaksanaan beserta pokok-pokok hasil audit dan disampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris setiap semester,
- c. Menyiapkan dengan segera laporan atas temuan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Bagi Bank yang merupakan perusahaan induk:

- a. Menentukan strategi pelaksanaan audit internal perusahaan anak,
- b. Merumuskan prinsip-prinsip audit internal yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu.

3. Independensi Audit Internal

- a. Auditor Internal tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari *auditee*.

- b. SKAI/BPP maupun masing-masing Auditor Internal memiliki independensi dalam melakukan tugas dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku umum.
- c. Auditor Internal tidak boleh memiliki kepentingan langsung ataupun tidak langsung atas obyek atau kegiatan yang diperiksanya sehingga dapat dihindari terjadinya pertentangan kepentingan.
- d. SKAI/BPP tidak boleh melakukan rangkap tugas dan jabatan serta sebagai pelaksana dalam kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak.
- e. Untuk menghindari benturan kepentingan maka anggota SKAI yang berasal dari area fungsional, tidak diperkenankan melakukan tugas audit terhadap area fungsional yang sama minimal selama 2 (dua) periode audit (*cooling-off period*).

4. Fokus dan Pengembangan Audit 2021

Sesuai dengan Rencana Kerja yang telah menetapkan fokus dan pengembangan audit di tahun 2021, terdapat beberapa penyesuaian dan perubahan sehubungan dengan masa pandemi antara lain:

- a. Meningkatkan fungsi pengawasan berbasis risiko (ruang lingkup dan fokus pada area berisiko tinggi) dengan kaji ulang atas kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Penerapan GCG. Proses pengawasan sebagian besar dilakukan secara *offsite* ataupun menggunakan media virtual.
- b. Memposisikan diri sebagai mitra kerja strategis (*strategic partner*) dalam meningkatkan kinerja perusahaan, khususnya dalam penilaian atas penerapan dan pengelolaan *Governance, Risk Management, dan Compliance* pada kegiatan operasional Bank sesuai dengan kebijakan/ ketentuan yang berlaku.
- c. Mengoptimalkan strategi Regional Audit untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja yang dapat mendukung pelaksanaan audit berbasis risiko. Pelaksanaan *onsite* di Kantor Cabang dilakukan oleh SKAI Region yang ditempatkan di beberapa Kantor Cabang.
- d. Memprioritaskan fungsi *Audit Analytical* dengan penerapan *Continuous Audit* dan meningkatkan kualitas SDM serta memperbaharui infrastruktur pendukungnya baik dari sisi *hardware* maupun *software*.
- e. Kompetensi Auditor : Melanjutkan peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan-pelatihan, baik mengenai pengetahuan produk dan prosedur, maupun pelatihan pemahaman manajemen risiko dan proses audit serta sertifikasi profesional.
- f. Menjalankan Jasa serta Fungsi *Assurance, Konsultasi* melalui Pengembangan *Audit Methodology*, pengkinian Pedoman Audit baru yang mengacu pada Standarisasi *Best Practise (The Institute of Internal Auditors - IIA)* dan melakukan implementasi panduan/ juknis *Audit Program, Thematic Audit, Surprise Audit, On Site audit, Off Site Audit, QA Review*.
- g. Menjalankan Jasa *Fraud* Investigasi dan *Reporting*, sebagai koordinator dalam *Fraud Management Team* terkait penerapan 4 pilar Strategi Anti *Fraud*, Sosialisasi Modul *Fraud Awareness* bagi Karyawan, *Preventive Action* melalui *Lessons Learned Fraud Risk/ Event* kepada seluruh Pimpinan Kantor Cabang dan Unit Kerja Kantor Pusat,

Peran dan Fungsi Audit Investigasi terhadap *Fraud Incident* maupun tindak lanjut terhadap pelaporan dari Pengaduan Nasabah serta *Whistleblowing System, Detection Monitoring* melalui *Account Monitoring* dan KYE.

Pelaksanaan Tugas SKAI Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Audit Internal/ SKAI telah melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Pemeriksaan SKAI di KC terhadap 261 Aktivitas di KCU, 71 Aktivitas di KCP, dan 01 Aktivitas di KK.
2. 10 Aktivitas pada Divisi/ Biro/ Group di Kantor Pusat.
3. 7 Aplikasi/ *Security*/ Aktivitas di Bidang Teknologi Informasi.
4. 18 Aktivitas *Thematic Audit*, yang dilakukan pada Kantor Cabang sampling dan *Product Management* di Kantor Pusat.

Pelaksanaan Tugas SKAI

SKAI menyampaikan laporan atas aktivitas, tugas, dan fungsinya secara berkala, baik triwulan, semesteran, dan tahunan kepada Presiden Direktur, Komisaris, dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

Temuan Audit Internal

1. Hasil audit disampaikan dalam laporan yang berisi seluruh temuan, penyebab (*root cause*) dan tanggapan dari *auditee* (pihak-pihak yang diaudit) serta komitmen *auditee* untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah disepakati.
2. Laporan hasil audit ditindaklanjuti oleh Manajemen dengan membuat Surat *Recommendation Management Action* sebagai langkah pembinaan dan perbaikan kepada *auditee*, serta memonitor tindak lanjut hasil audit.
3. Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/ pemeriksaan tersebut, Satuan Kerja Audit Internal akan melakukan verifikasi/validasi terhadap perbaikan yang telah dilakukan oleh *auditee* dan mendokumentasikan bukti pendukungnya. *Progress* tindak lanjut tersebut selalu dimonitor sampai seluruh permasalahan dalam hasil audit diselesaikan oleh *auditee*.

Temuan Audit

- a. Seluruh temuan audit telah dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, dan *auditee*, dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan BPP (di Kantor Pusat dan SKAI di Kantor Cabang) dan ditindaklanjuti oleh Manajemen dengan membuat surat Rekomendasi *Management Action* sebagai langkah pembinaan dan arahan tindak lanjut perbaikan kepada *Auditee*.
- b. Melakukan Koordinasi dengan Direktur Bidang dan Biro/ Divisi/ Group terkait di Kantor Pusat, Kantor Cabang, terkait rekomendasi perbaikan internal kontrol pada operasional Bank (termasuk pengkinian ketentuan/ kebijakan/ pedoman operasional Bank yang telah ada) agar kelemahan/ penyimpangan yang sama tidak terjadi kembali.
- c. Memonitor tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan serta Rekomendasi *Management Action* dari Manajemen Kantor Pusat.

Rencana Kerja Audit Tahun 2021

RKAT untuk tahun 2021 telah dilakukan evaluasi dan revisi dengan mempertimbangkan perkembangan industri Perbankan sehubungan dengan masa pandemi. Sesuai dengan Rencana

Kerja Audit Tahunan 2021, perencanaan dan implementasi audit berbasis risiko memprioritaskan, antara lain:

- a. Peningkatan Kualitas hasil Pemeriksaan IA & Peningkatan Produktivitas Internal Audit: Pelaksanaan fungsi audit berbasis risiko (ruang lingkup dan fokus pada area berisiko tinggi) dan kaji ulang atas kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Penerapan GCG. Dalam perencanaan dan pelaksanaan Rencana Kerja Audit Tahunan 2021, SKAI melakukan beberapa penyesuaian terkait dengan *Methodology*, *Assessment*, dan *Realisasi*, sesuai dengan beberapa pertimbangan, masukan, dan kondisi berjalan, khususnya terkait dengan masa pandemi.
- b. Meningkatkan Jasa *Fraud* Investigasi dan *Reporting*
- c. Penguatan fungsi konsultasi Audit pada area *prevention*, *detection* dan *correction* dengan pengembangan fungsi dan penyediaan sumber daya pendukung dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas tujuan dan kinerja audit.
- d. Peningkatan Kompetensi Internal Audit : Pemenuhan kecukupan Auditor yang ahli dan spesialis sesuai area aktivitas Audit dan Sertifikasi Kompetensi Auditor menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan kompetensi organisasi sehubungan dengan kemungkinan perubahan proses dan bisnis bank
- e. Pengembangan Internal Audit *Metodology* : Mencapai Standar yang telah ditetapkan regulator (OJK), *Best Practise (The Institute of Internal Auditors - IIA)*/ IPPF untuk mencapai pengawasan yang efektif dan bersinergi (*strategic business partner*) dalam mendukung penerapan RBB (Rencana Bisnis Bank).
- f. Peningkatan penerapan Audit Berbasis Teknologi: Otomasi pada kinerja Internal Audit dengan pengembangan infrastruktur dan dukungan aplikasi terhadap aktivitas internal audit dengan pengadaan aplikasi *Audit Management System* sebagai salah satu strategi untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Internal Audit dan antisipasi *turn over* SDM dan perkembangan ruang lingkup audit sehubungan dengan perubahan aktivitas baik di internal dan eksternal.

PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Jumlah kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) dengan nilai kerugian / penyimpangan di atas Rp100 juta selama periode Tahun 2021.

Sesuai dengan pelaporan ke Bank Indonesia berdasarkan Pelaporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Semester I dan Semester II tahun 2021, maka jumlah kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) dengan nilai kerugian/ penyimpangan di atas Rp 100 juta selama periode Tahun 2021 adalah 3 (Tiga) kasus.

Terkait Penerapan Strategi Anti *Fraud*, PaninBank telah memiliki dan menjalankan fungsi deteksi melalui *whistleblowing system* dan SKAI telah melakukan fungsi investigasi sesuai dengan pelaporan Strategi Anti *Fraud* 2021.

Tabel Internal Fraud Tahun 2021

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Jumlah Internal Fraud	-	-	1	3	-	-
Telah diselesaikan	-	-	1	3	-	-
Dalam proses penyelesaian internal	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	1	-	-

Penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

AUDIT EKSTERNAL

Audit eksternal oleh pihak independen perlu dilakukan untuk memastikan akuntabilitas informasi khususnya pada aspek keuangan agar Perseroan mampu menentukan langkah strategis dan kebijakan yang tepat dalam menopang keberlanjutan bisnis Perseroan. Auditor eksternal yang telah memenuhi persyaratan membantu Perseroan untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi yang disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) dan laporan yang disiapkan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha yang wajar serta tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan dan Kuasa Direksi Menunjuk Akuntan Publik Independen

Direksi Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Deloitte) melalui persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris. Sebagaimana terdokumentasi dalam berita acara/risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan, RUPS memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan.

Independensi dalam Pelaksanaan Proses Audit

Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (“I&R”) anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“Deloitte”), melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("standar auditing yang berlaku umum") dan Peraturan Bank Indonesia.

Tujuan audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan Perseroan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Biaya Audit Umum Laporan Keuangan

Total biaya Audit Umum Laporan Keuangan PaninBank tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 4.300.000.000,- (Empat Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) yang meliputi audit atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Berikut adalah biaya audit umum laporan keuangan PaninBank dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun	Biaya	Akuntan Publik	Izin Akuntan Publik
2017	Rp. 3.950.000.000	Bing Harianto	No. AP. 0558
2018	Rp. 4.750.000.000	Bing Harianto	No. AP. 0558
2019	Rp. 3.900.000.000	Elisabeth Imelda	No. AP. 0849
2020	Rp. 4.350.000.000	Elisabeth Imelda	No. AP. 0849
2021	Rp. 4.300.000.000	Fonny Alimin	No. AP 1687

MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Sistem Manajemen Risiko yang terdiri dari:

a. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko

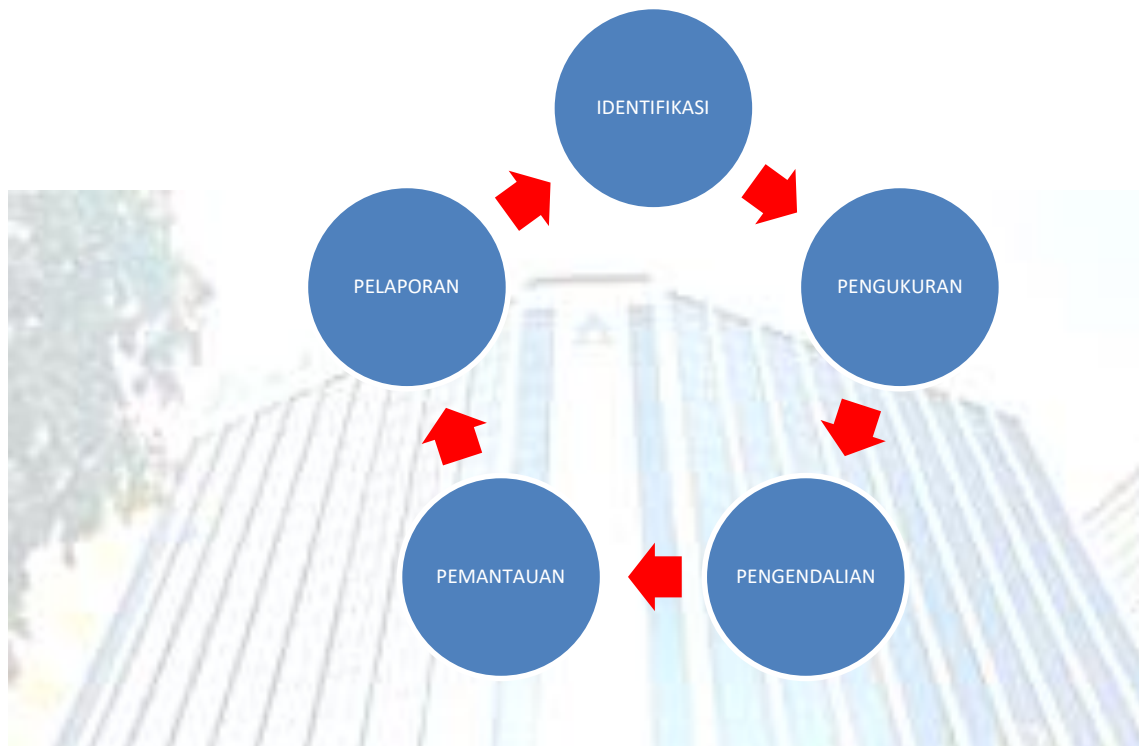
Panin Bank terus mengembangkan infrastruktur dan budaya risiko yang kuat dengan tujuan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, serta melakukan pengelolaan modal secara komprehensif serta memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Penerapan manajemen risiko akan membantu manajemen dalam melakukan pemantauan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, kebijakan, rencana, ketentuan serta prosedur internal. Di samping itu, manajemen risiko juga dapat mengurangi risiko sistemik (*systemic risk*) yang dapat merugikan Bank baik secara material maupun immaterial.

Panin Bank senantiasa berupaya untuk melakukan pemantauan secara regular atas tingkat risiko yang dihadapi termasuk keseluruhan proses manajemen risiko yang dijalankan berdasarkan pada penerapan prinsip GCG. Penerapan manajemen risiko yang komprehensif menjadi salah satu aspek penting dan signifikan bagi keberhasilan Bank dalam mengelola berbagai risiko yang dihadapi secara efektif. Karena itu, Bank memberikan perhatian yang besar pada pelaksanaan manajemen risiko secara efektif dan efisien dalam aktivitas operasional perbankan sehari-hari.

Penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk melindungi Bank dari kerugian yang mungkin timbul diakibatkan dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan strategi bisnis dan pertumbuhan bank. Dewan Komisaris, Komite

Audit dan Direksi menilai, penerapan manajemen risiko Bank di tahun 2021 telah cukup dan disesuaikan dengan kebutuhan Bank dalam rangka menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat agar menghasilkan pertumbuhan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham.

Bank telah menerapkan proses manajemen risiko yang terdiri dari 5 (lima) tahapan utama yang membentuk siklus yang berkelanjutan sebagai berikut:



Adapun tahapan-tahapan tersebut telah diimplementasikan oleh Bank antara lain sebagai berikut:

1) **Struktur Organisasi Manajemen Risiko**

Struktur tata kelola organisasi Bank yang memadai yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Asset & Kewajiban, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Selain itu, dalam hal pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi juga didukung oleh kinerja dari satuan kerja terintegrasi yaitu Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi serta Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. Struktur organisasi Bank sendiri senantiasa dilakukan pengkinian untuk mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi dan bisnis.

2) **Penerapan Prinsip *Three Lines of Defense***

Penerapan prinsip *three lines of defense* dan *four eyes principle* sebagai bagian dari komitmen Bank untuk mengidentifikasi, mengendalikan, memantau dan memitigasi risiko secara sistematis dan berkesinambungan.

3) **Infrastruktur dan tata kelola Manajemen Risiko**

Infrastruktur dan tata kelola Manajemen Risiko yang telah sesuai dengan kompleksitas

kegiatan bisnis, profil risiko, tingkat risiko yang akan diambil, serta peraturan yang ditetapkan oleh Regulator.

4) Risk Awareness

Meningkatkan kesadaran akan Manajemen Risiko melalui kampanye kesadaran risiko, pemasangan poster dan media publikasi internal lainnya, serta pelatihan pelatihan terkait yang dilakukan di kantor pusat, kantor cabang dan Anak Perusahaan.

5) Kesesuaian dan efektivitas atas Control

Kesesuaian dan efektivitas atas *Control* perlu ditetapkan untuk mengatur eksposur risiko dan memastikan keterpaduan dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan. *Risk appetite* menyelaraskan kebutuhan dari seluruh stakeholder dengan berperan sebagai pengelola risiko dan pemacu aktivitas bisnis pada saat ini dan dikemudian hari. Risk appetite yang efektif dapat menjadi sarana pendorong yang kuat untuk penerapan budaya risiko di Bank.

6) Disaster Recovery Plan dan Business Continuity Plan (DRP & BCP)

Disaster Recovery Plan dan Business Plan (DRP & BCP) disusun dan diimplementasikan untuk membantu memperkuat ketahanan dalam menghadapi risiko yang berdampak serius terhadap kegiatan operasional, termasuk rencana-rencana untuk memastikan keberlanjutan fungsi bisnis yang kritikal dalam jangka waktu tertentu selama proses recovery berjalan. Rencana Aksi (*Recovery Plan*) menyediakan pendekatan sistematis dalam menangani potensi gangguan permodalan, likuiditas atau pendanaan yang mempengaruhi kesehatan likuiditas dan solvabilitas keuangan

b. Review atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan

Bank Melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi Bank dalam mencapai sasarannya. Bentuk evaluasi pada kebijakan manajemen risiko adalah evaluasi tahunan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur. Dewan Komisaris berperan aktif dalam pelaksanaan evaluasi sistem manajemen risiko dengan mereview hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko.

Secara berkala, komite-komite tersebut mengadakan pertemuan untuk membahas dan memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Evaluasi dan pengkinian kebijakan, prosedur dan metodologi dilakukan secara berkala untuk menjaga kesesuaiannya dengan regulasi dan kondisi operasional. Evaluasi terhadap efektivitas manajemen risiko juga dilakukan melalui laporan berkala yang dikirimkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain Laporan Profil Risiko, *Risk Appetite & Risk Tolerance*, *Recovery Plan* dan laporan terkait lainnya.

c. Komitmen Manajemen terhadap sistem manajemen risiko

Dengan perkembangan aktivitas perbankan yang semakin beragam dan kompleks serta diiringi oleh potensi risiko yang semakin meningkat, Bank senantiasa menyempurnakan pengelolaan risiko baik dari segi struktur organisasi dan sumber daya manusia, kebijakan dan prosedur, sistem pendukung, hingga metodologi.

Sistem Manajemen Risiko memerlukan komitmen dari setiap manajemen jajaran organisasi untuk mengembangkan sistem dan teknologi agar dapat mendukung komponen inti dalam pengendalian risiko. Sistem Manajemen Risiko minimal harus mampu menilai posisi, menghitung risiko dari seluruh instrumen finansial dalam masing-masing valuta utama dimana bank menjalankan usaha, baik secara transaksi individual maupun secara agregat. Selanjutnya pelaporan disampaikan kepada Direksi serta semua unit yang terkait terhadap materi laporan dimaksud. Unit operasional harus memegang peran dalam mengakses dan mereview secara berkelanjutan kebutuhan minimum pengembangan dari sistem dan teknologi yang diperlukan aktivitas bank, untuk kemudian disetujui oleh Dewan Direksi

d. Hubungan kerja dengan pemantau risiko

KPR (Komite Pemantau Risiko) bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pedoman kebijakan manajemen risiko Bank (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi).

Komite Pemantau Risiko telah membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris

e. Sosialisasi manajemen risiko

Dilaksanakan secara berkelanjutan dalam setiap kesempatan untuk semakin meningkatkan risk awareness seluruh lini di Bank, baik pada tingkat rapat Direksi maupun pada tingkat pelaksanaan arahan Direksi melalui pelaksanaan proses bisnis sesuai kebijakan, sistem dan prosedur yang ada. Beberapa upaya peningkatan risk awareness antara lain:

- Pemantauan yang dilakukan secara berkala pada tingkat Direksi dan tingkat Komisaris; antara lain, evaluasi perkembangan kinerja bulanan, potensi risiko dan sebagainya.
- Penyempurnaan dan penyampaian materi terkait manajemen risiko dalam berbagai agenda workshop, pendidikan dan pelatihan internal sejak awal menjadi karyawan.
- Meningkatkan *risk awareness* SDM pada seluruh level organisasi melalui sosialisasi dan pelatihan/*training* yang terkait dengan implementasi *Operational Risk Management* yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal.

2. Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko adalah komite eksekutif yang dibentuk oleh Direksi Bank sebagai wadah pengambilan keputusan dan pengevaluasian pelaksanaan, pengelolaan melalui perumusan kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Manajemen Risiko.

Kualifikasi anggota komite manajemen risiko terdiri atas Direktur dan pejabat eksekutif

yang membawahi manajemen risiko, penyaluran kredit, treasury, penghimpunan dana, keuangan, dan pengelolaan asset.

Komite Manajemen Risiko beranggotakan mayoritas anggota Direksi Bank.

Anggota Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur
- Wakil Presiden Direktur
- Direktur *Risk Management, Digital & Liability Development*
- Direktur *Commercial Banking & Mortgage*
- Direktur *Corporate Banking*
- Direktur *Treasury*
- Direktur *Operational & IT*
- Direktur *Compliance, Legal Affairs & AML*

3. Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Struktur manajemen risiko terdiri dari beberapa komite, antara lain Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan berbagai tingkat tanggung jawab.

Komite Pemantau Risiko

Merupakan otoritas pengelola risiko yang berada pada tingkat Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai dewan pengawas untuk memantau pelaksanaan strategis dan kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dalam mengelola eksposur risiko.

Komite Manajemen Risiko

Di tingkat Direksi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko secara keseluruhan di Bank yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan strategi, kebijakan dan mengevaluasi permasalahan risiko yang signifikan.

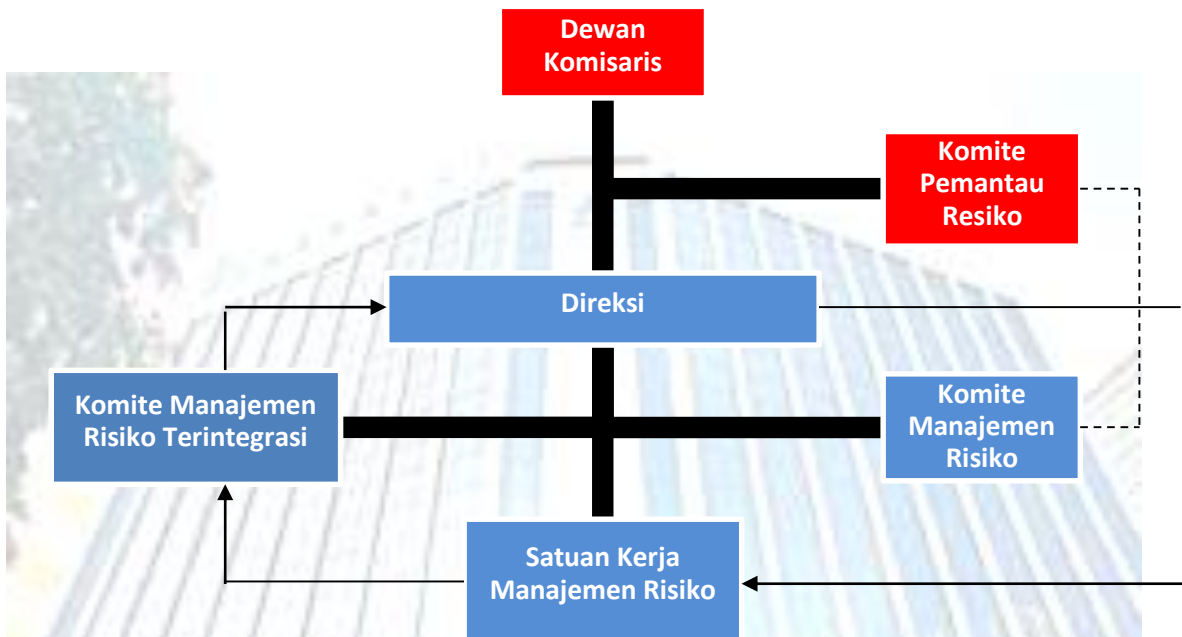
Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Sejalan dengan adanya kebijakan dari OJK terkait Manajemen Risiko untuk Konglomerasi Keuangan, maka Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang diketuai oleh Direktur yang membawahi Manajemen Risiko di Entitas Utama dengan anggota Direktur yang ditunjuk dari setiap perusahaan anggota konglomerasi (Lembaga Jasa Keuangan/ LJK) dan Kepala-kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko Lembaga Jasa Keuangan/ LJK. Tugas utama dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi ini adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama terkait dengan penyusunan, perbaikan atau penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan kerja Manajemen Risiko mencakup satuan kerja yang melakukan pemantauan risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional dan risiko informasi dalam satu kesatuan

organisasi. Dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi, telah dilakukan penyesuaian Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan menambahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi untuk memastikan bahwa proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara terintegrasi dapat dilakukan dan dilaporkan sesuai dengan kerangka kerja manajemen risiko dan peraturan regulator. Satuan kerja ini beranggotakan para profesional dan senior dalam bidang manajemen risiko. Fungsi ini adalah fungsi yang independen sebagai *second line of defense*. Satuan kerja Manajemen Risiko Terintegrasi mengembangkan secara keseluruhan strategi manajemen risiko yang mencakup kebijakan, metodologi, kerangka kerja, limit dan prosedur.



4. Profil Kepala Biro Manajemen Risiko

Berikut adalah informasi mengenai Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko:

1. Nama pejabat : Antoni
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta
4. Riwayat Pendidikan : Sarjana Teknik Kimia – Universitas Parahyangan
5. Riwayat jabatan : - Kepala Bagian Market & Liquidity Risk (2010-2011)
- Kepala Biro Manajemen Risiko (2011-sekarang)
6. Dasar hukum penunjukan : Surat Penunjukan No. 019/DIR/BMR/SJ/11 tanggal 13 September 2011
7. Kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki:
 - Sertifikasi Manajemen Risiko – Level 4 (2011)
 - Financial Risk Manager (2008)

5. Penerapan Basel

Dalam rangka memberikan nilai tambah kepada para *stakeholders* serta sebagai bentuk kepatuhan Panin Bank dalam memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang telah

ditetapkan oleh regulator, Panin Bank senantiasa menjamin serta memastikan bahwa struktur permodalan telah cukup kuat untuk mendukung strategi pengembangan usaha bisnis saat ini dan mempertahankan keberlangsungan usaha di masa mendatang.

Pengelolaan risiko pada aspek permodalan di Bank Panin meliputi kebijakan diversifikasi sumber permodalan sesuai dengan rencana strategis jangka panjang dan kebijakan alokasi modal secara efisien pada segmen bisnis yang memiliki profil *risk-return* yang optimal (termasuk penempatan pada Entitas Anak). Hal ini bertujuan untuk memenuhi ekspektasi *stakeholder* termasuk investor dan regulator.

PaninBank memastikan telah memiliki kecukupan modal untuk meng-*cover* risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, baik berdasarkan ketentuan/regulasi (*regulatory capital*) maupun kebutuhan internal (*economic capital*). Panin Bank mengacu kepada regulasi Bank Indonesia dan OJK (Basel II dan Basel III), khususnya Pilar 1 dalam melakukan perhitungan kecukupan modal untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

PaninBank berpartisipasi dalam *Bottom Up Stress Testing*, sebagai salah satu penerapan *Supervisory Review & Evaluation Process* di lingkungan industri perbankan Indonesia. *Bottom Up Stress Testing* ditujukan untuk menguji ketahanan permodalan dan kecukupan likuiditas Bank dalam skenario *adverse*, sebagaimana dirumuskan oleh regulator. Hasil *Bottom Up Stress Testing* menunjukkan bahwa PaninBank masih mampu menjaga permodalannya di atas ketentuan yang berlaku, serta memiliki *contingency* dan kapasitas yang memadai untuk menjaga kecukupan likuiditas.

Untuk perhitungan kecukupan modal, PaninBank menggunakan Pendekatan Standar Basel II (*Standardized Approach*) untuk risiko kredit dan telah memasukkan komponen *External Rating*. Untuk risiko pasar, PaninBank menggunakan Metode Pengukuran Standar Basel II (*Standardised Measurement Method*), dan secara internal menggunakan *Value at Risk*. Untuk risiko operasional, PaninBank mengacu kepada Pendekatan Indikator Dasar Basel II (*Basic Indicator Approach*).

Dalam penerapan *framework Basel III* terkini (*Basel III reform*) pemenuhan modal minimum untuk risiko operasional, Bank wajib menggunakan pendekatan standar yang sederhana, yang dapat diperbandingkan dan sensitif terhadap risiko berdasarkan Komponen Indikator Bisnis (KIB) dan Faktor Pengali Kerugian Risiko Operasional. Saat ini Bank sedang melakukan uji coba dan akan diimplementasikan pada tahun 2023.

PaninBank telah mengimplementasikan penerapan Basel III mengacu kepada dokumentasi Basel serta regulasi dan inisiatif yang dikeluarkan oleh OJK. Sebagai bagian dari penerapan Basel III di Indonesia, Panin Bank telah melaporkan pemenuhan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) secara bulanan dan triwulanan, pemenuhan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan pemenuhan Rasio Pengungkit (*Leverage Ratio*) secara triwulanan.

Dalam kerangka penerapan Basel III, Panin Bank telah menerapkan manajemen risiko suku bunga dalam *Banking Book* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2018 mengenai Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko

Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in The Banking Book)* bagi Bank Umum. Hasil pengukuran IRRBB sesuai dengan ketentuan telah dilaporkan secara triwulanan kepada OJK.

6. Risiko yang dihadapi dan dikelola Bank

Risiko-risiko yang melekat pada PaninBank secara individual meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan. Sedangkan risiko-risiko yang melekat dalam manajemen risiko secara terintegrasi mencakup pula Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

No	Jenis Risiko	Penjelasan
1	Risiko Kredit	Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank dan/atau Perusahaan Anak, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk dan settlement risk. Risiko kredit dikelola melalui penetapan kebijakan dan prosedur yang meliputi kriteria pemberian kredit, origination dan persetujuan kredit, penetapan harga, pemantauan, pengelolaan kredit bermasalah dan manajemen portofolio.
2	Risiko Pasar	Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar timbul akibat pergerakan faktor pasar seperti suku bunga dan nilai tukar pada portofolio yang dimiliki Danamon baik dari sisi aset, maupun dari sisi liabilitas, pada posisi trading book maupun posisi banking book, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank.
3	Risiko Likuiditas	Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
4	Risiko Operasional	risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/ atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional. Pengelolaan risiko operasional dilakukan untuk meminimalisasi dampak yang dapat menimbulkan kerugian keuangan maupun merusak reputasi, Pengelolaan risiko operasional mencakup juga pengelolaan risiko keamanan informasi (termasuk risiko keamanan siber), risiko teknologi dan kelangsungan bisnis.
5	Risiko Hukum	Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain yang disebabkan rendahnya pengetahuan/pemahaman atas hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
6	Risiko Reputasi	Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan <i>stakeholder</i> yang bersumber dari persepsi negatif. Pengelolaan Risiko Reputasi dilakukan melalui pengelolaan keluhan nasabah, menjalankan fungsi kehumasan, merespon pemberitaan negatif serta mengkomunikasikan informasi yang diperlukan kepada <i>stakeholder</i> .
7	Risiko Strategik	Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pengelolaan risiko strategik antara lain dilakukan melalui analisis kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan bisnis. Risiko strategik terkait dengan beberapa bidang: rencana bisnis, teknologi informasi, dan sumber daya manusia.
8	Risiko Kepatuhan	Risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan dikelola oleh satuan kerja independen yang melakukan fungsi kepatuhan.
9	Risiko Transaksi Intragrup	Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana. Pengelolaan risiko transaksi intra-grup dilakukan oleh Bank bersama dengan Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi.
10	Risiko Asuransi	Risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (<i>underwriting</i>), penetapan premi (<i>pricing</i>), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

Risk Appetite & Risk Tolerance

Risk Appetite dan *Risk Tolerance* merupakan tingkat risiko yang siap untuk diambil/ditoleransi dalam mencapai tujuan bisnis. Penetapan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* bukan untuk membatasi pengambilan risiko, namun bertujuan untuk memberikan transparansi dan memastikan kesesuaian profil risiko dengan strategi bisnis. Panin Bank telah menetapkan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi, dan Bank juga telah melakukan kaji ulang atas parameter dan ambang batas *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*, guna memastikan kesesuaian dengan perubahan kondisi internal dan eksternal, ekspektasi manajemen, serta peraturan yang berlaku. Penetapan berbagai parameter *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* didasarkan pada risiko-risiko yang dinilai utama bagi PaninBank yang mencakup Tingkat Kesehatan, Permodalan, Rentabilitas, Likuiditas, Kredit, Pasar, Kepatuhan, Operasional, Hukum, Reputasi, dan Strategik.

Stress Test

PaninBank telah melakukan *stress test* secara berkala sebagaimana telah ditentukan oleh regulator. *Stress test* dilakukan guna mengetahui ketahanan bank terhadap dampak perubahan-perubahan faktor eksternal makro ekonomi yang dapat berpengaruh pada kondisi permodalan, likuiditas, kualitas aset, dan laba Bank. Beberapa faktor makro ekonomi yang menjadi pertimbangan dalam *stress test* termasuk diantaranya PDB, nilai tukar, tingkat inflasi, perubahan suku bunga dan imbal hasil obligasi pemerintah. *Stress test* dilakukan berdasarkan skenario yang dikategorikan dalam skenario buruk dan terburuk (Adverse 1 & 2). Metode yang digunakan dalam melakukan *stress test*, menggunakan gabungan dari metode statistik, historical dan expert judgement.

PaninBank juga melakukan *stress test* secara terintegrasi dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara berkala. *Stress test* secara terintegrasi dilakukan oleh masing-masing LJK menggunakan skenario makro ekonomi yang telah diberikan oleh PaninBank (Entitas Utama). Setiap LJK menggunakan metode perhitungan *stress test* yang disesuaikan berdasarkan bisnis yang dijalani oleh masing-masing LJK

Penilaian Profil Risiko

Profil Risiko mencakup penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko (*Risk Control System*), baik secara individual maupun konsolidasi. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Sedangkan, dalam Manajemen Risiko Terintegrasi, risiko yang dikelola juga mencakup Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi. Dalam melakukan penilaian Profil Risiko, Bank wajib mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum. Tanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyusunan laporan Profil Risiko adalah Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

Profil Risiko Perseroan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Bank melakukan pemantauan atas masing-masing kelompok risiko utama yang dihitung oleh Bank pada tahun 2021, peringkat komposit untuk profil risiko Individual secara keseluruhan per 31 Desember 2021 berada pada peringkat 2 (*Low to Moderate*). Peringkat Profil Risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren "*Low to Moderate*" dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko "*Satisfactory*".

Profil Risiko Konsolidasi

Mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/SEOJK.03/2017 tentang Prinsip kehati-hatian dan Laporan dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak. Bank melakukan pemantauan atas masing-masing kelompok risiko utama yang dihitung oleh Bank, peringkat komposit untuk Profil Risiko Konsolidasi dengan Entitas Anak secara keseluruhan per 31 Desember 2021 berada pada peringkat 2 (*Low to Moderate*). Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren "*Low to Moderate*" dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko "*Satisfactory*".

Profil Risiko Terintegrasi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Bank sebagai Entitas Utama melakukan Profil Risiko secara Terintegrasi bersama dengan 5 (lima) Lembaga Jasa Keuangan Panin Grup. Hasil penilaian secara Terintegrasi, pada semester II 2021 peringkat Profil Risiko secara terintegrasi adalah 2 (*Low to Moderate*). Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren "*Low to Moderate*" dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko "*Satisfactory*".

Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Bank melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi Bank dalam mencapai sasarannya.

Bentuk evaluasi pada kebijakan manajemen risiko adalah evaluasi tahunan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur. Dewan Komisaris berperan aktif dalam pelaksanaan evaluasi sistem manajemen risiko dengan mereview hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko.

Evaluasi dan pengkinian kebijakan, prosedur dan metodologi dilakukan secara berkala untuk menjaga kesesuaiannya dengan regulasi dan kondisi operasional. Evaluasi terhadap

efektivitas manajemen risiko juga dilakukan melalui laporan berkala yang dikirimkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain Laporan Profil Risiko, *Risk Update* dan laporan terkait lainnya.

Komitmen Manajemen PaninBank terhadap Sistem Manajemen Risiko

Dengan perkembangan aktivitas perbankan yang semakin beragam dan kompleks serta diiringi oleh potensi risiko yang semakin meningkat, Bank senantiasa menyempurnakan pengelolaan risiko baik dari segi struktur organisasi dan sumber daya manusia, kebijakan dan prosedur, sistem pendukung, hingga metodologi.

Sistem Manajemen Risiko memerlukan komitmen dari setiap manajemen jajaran organisasi untuk mengembangkan sistem dan teknologi agar dapat mendukung komponen inti dalam pengendalian risiko. Sistem Manajemen Risiko minimal harus mampu menilai posisi, menghitung risiko dari seluruh instrumen finansial dalam masing-masing valuta utama dimana bank menjalankan usaha, baik secara transaksi individual maupun secara agregat. Selanjutnya pelaporan disampaikan kepada Direksi serta semua unit yang terkait terhadap materi laporan dimaksud. Unit operasional harus memegang peran dalam mengakses dan mereview secara berkelanjutan kebutuhan minimum pengembangan dari sistem dan teknologi yang diperlukan aktivitas bank, untuk kemudian disetujui oleh Dewan Direksi.

Hubungan Kerja dengan Komite Pemantau Risiko

KPR (Komite Pemantau Risiko) bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pedoman kebijakan manajemen risiko Bank (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi).

Komite Pemantau Risiko telah membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Sosialisasi Manajemen Risiko

Dilaksanakan secara berkelanjutan dalam setiap kesempatan untuk semakin meningkatkan risk awareness seluruh lini di Bank, baik pada tingkat rapat Direksi maupun pada tingkat pelaksanaan arahan Direksi melalui pelaksanaan proses bisnis sesuai kebijakan, sistem dan prosedur yang ada. Beberapa upaya peningkatan risk awareness antara lain:

- Pemantauan yang dilakukan secara berkala pada tingkat Direksi dan tingkat Komisaris; antara lain, evaluasi perkembangan kinerja bulanan, potensi risiko dan sebagainya.
- Penyempurnaan dan penyampaian materi terkait manajemen risiko dalam berbagai agenda workshop, pendidikan dan pelatihan internal sejak awal menjadi karyawan.

- Meningkatkan *risk awareness* SDM pada seluruh level organisasi melalui sosialisasi dan pelatihan/*training* yang terkait dengan implementasi *Operational Risk Management* yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal..

Budaya Risiko

Budaya manajemen risiko yang kuat diciptakan jika seluruh karyawan dapat mengetahui dan mengerti risiko-risiko yang dihadapi dalam menjalankan berbagai aktivitas. Dalam kaitan ini Bank berketetapan untuk membangun suatu kombinasi nilai-nilai yang unik, kepercayaan, pelaksanaan dan pengawasan manajemen yang akan memastikan bahwa seluruh jajaran Bank menjalankan operasional Bank secara hati-hati (*prudent*) dan berdasarkan *best practices*.

Budaya risiko ditetapkan melalui :

- Pengarahan dan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi;
- Pengenalan manajemen risiko sebagai bagian yang utuh dari pelaksanaan bisnis;
- Kepatuhan terhadap semua kebijakan, prosedur, hukum dan peraturan yang berlaku;
- Manajemen risiko dan Infrastruktur, untuk membangun proses manajemen risiko dan kontrol yang efektif untuk mendukung strategi Bank.
- Program *risk culture campaign*, sarana yang dimiliki Bank Panin, antara lain melalui *screen* PC Desktop, *email address* dan / atau wa aplikasi, yang berisi isu risiko harus diwaspadai dan mekanisme penerapan control yang harus dilakukan secara disiplin oleh *risk owner*.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penerapan sistem pengendalian internal Bank mengacu pada SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum. Sistem pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*). Bank menerapkan konsep *three lines of defense* dalam sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko, yang melibatkan semua lini organisasi, dan dilakukan pengawasan (*oversight*) oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Penerapan konsep *three lines of defenses*, dijabarkan sebagai berikut:

- Seluruh unit bisnis dan unit operasional berfungsi sebagai *First Line of Defense* yang bertanggung jawab untuk mengelola pengendalian internal dan risiko terkait unit kerjanya (*risk owner*).
- Unit kerja terkait, antara lain Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berfungsi sebagai *Second Line of Defense* yang memantau penerapan kebijakan dan panduan manajemen risiko secara korporasi sesuai dengan ketentuan regulator.
- Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) berfungsi sebagai *Third Line of Defense* bertugas memberikan *independent assurance* terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola.

Sistem Pengendalian Intern mendukung pencapaian tujuan kinerja Bank, untuk meningkatkan nilai bagi *stakeholder*, meminimalisir risiko kerugian dan menjaga kepatuhan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Panin menerapkan Sistem

Pengendalian Intern sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Bank dan menjadi acuan kegiatan operasional Bank yang sehat dan terkendali.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Bank mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) – *Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern yang memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Seluruh manajemen dan karyawan Bank memiliki peran dan tanggung jawab untuk menerapkan dan mematuhi serta meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank yang handal dan efektif.

Pengendalian Keuangan Dan Operasional, serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Pelaksanaan Pengendalian Keuangan antara lain dilakukan melalui:

- a Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana strategik yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blue print* strategi bisnis 3 (tiga) tahunan, dan telah didistribusikan kepada pejabat Bank yang terkait dalam rangka implementasi.
- b Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak risiko strategik terhadap permodalan Bank, antara lain proyeksi permodalan dan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum).
- c Direksi secara aktif melakukan diskusi/ memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi strategi bisnis Bank.

Pelaksanaan Pengendalian Operasional antara lain dilakukan melalui:

- a Kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank.
- b Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan, prosedur dan limit.
- c Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari *business/supporting* unit kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
- d Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank.
- e Kaji ulang yang efektif, independen dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank.

Kepatuhan terhadap peraturan, perundang-undangan yang berlaku:

- a Bank memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
- b Telah dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen terhadap *risk taking unit* dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan Bank.
Bank telah melakukan pemantauan Kepatuhan Pelaporan kepada BI/OJK/Regulator lainnya.

Review atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Bank melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi Bank dalam mencapai sasarnya.

SKAI bertanggung jawab Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Bank. SKAI melakukan review dan pemeriksaan secara periodik terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja. Hasil evaluasi disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan SPI telah berjalan secara efektif.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pembentukan fungsi Sekretaris Perusahaan PaninBank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan BEI No. Kep-305/BEJ/07-2004.

Profil Sekretaris Perusahaan

Berikut adalah informasi mengenai Sekretaris Perusahaan:

1. Nama pejabat : Jasman Ginting Munthe
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta
4. Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 20 Agustus 1965
5. Riwayat Pendidikan : - Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran, Bandung
- Magister bidang Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
6. Riwayat jabatan : Memulai karirnya sebagai *Management Trainee (Officer Development Program)* di PT Bank Panin Tbk (PaninBank) tahun 1991 dan pernah menjabat sebagai *Marketing Treasury* Produk (tahun 1992–1993), ALCO Support Group (tahun 1993–1995), Bagian Kredit Kantor Cabang Jakarta (tahun 1995–1996) dan Divisi Treasury–ALCO Support Group (tahun 1996–2009). Komisaris PT. Bank Panin Dubai Syariah (2009 – 2017). Sejak tahun 1997 hingga saat ini, menjabat sebagai *Corporate Secretary* PaninBank.
7. Dasar hukum penunjukan : Memo Direksi PaninBank tanggal 23 Januari 1997

8. Kualifikasi dan Sertifikasi yang dimiliki :
- Pendidikan Corporate Secretary Angkatan II Tahun 1998
 - Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2

Program Pelatihan & Pengembangan Kompetensi

Program pelatihan dan pengembangan kompetensi diperlukan agar Sekretaris Perusahaan dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan. Sepanjang tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti training sebagai berikut:

Nama	Workshop/Training/ Seminar	Vendor	Waktu Pelaksanaan	Tempat
Jasman Ginting Munthe	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	RDS	5-Feb 2021	Jakarta
	Sosialisasi Pemberlakuan Nomor I-G Tentang Pencatatan Sukuk	BEI	12-Apr-2021	Jakarta
	Seminar Isu Strategis Sustainable Finance	IKBI	14-APR-2021	Jakarta
	Webinar “Memaknai Semangat Nasionalisme di Sektor Jasa Keuangan	OJK	17-Jun-2021	Jakarta
	Rencana Pembentukan Task Force Nasional Keuangan Berkelanjutan	OJK	5-Aug-2021	Jakarta
	FDG Sustainable Banking Assessment WWF Indonesia With Panin Bank	WWF	28-Sep-2021	Jakarta
	Penguatan Pengawasan Market Conduct pada Sektor Keuangan	CSE	8-Nov-2021	Jakarta
	Pengenalan Aspek ESG sebagai Salah Satu Penunjang Bisnis Berkelanjutan	ICSA	19-Nov-2021	Jakarta
	Diskusi Publik Draf Taksonomi Hijau	OJK	8-Dec-2021	Jakarta
	Recovery Plan	E&Y Indonesia	3-Nov-2021	Jakarta

	Corporate Strategy	Delloite	5-Nov-2021	Jakarta0
	Sosialisasi POJK No.22/POJK.04/2021 Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Oleh Emiten Dengan Inovasi Dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham	OJK	28-Des-2021	Jakarta

Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Sekretaris Perusahaan PaninBank:



Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, *Corporate Secretary* berperan sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas-tugas lain yang dilakukan adalah:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris terkait ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
2. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web;

- b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu
- c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
- d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Kegiatan yang dilakukan antara lain mencakup:

- **Bidang *Corporate Affairs***

Bertanggung jawab dalam semua kegiatan yang terkait dengan pemenuhan ketentuan sebagai perusahaan publik, antara lain:

- a. Mengikuti perkembangan pasar modal dan memahami semua peraturan yang berlaku dibidang pasar modal,
- b. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham,
- c. Memenuhi kewajiban Pelaporan Keterbukaan Informasi,
- d. Menyelenggarakan *public expose*,
- e. Mengkoordinir pelaksanaan *corporate actions*, *dividend payment*, dan lain-lain.
- f. Memonitor komposisi pemegang saham Perseroan dari waktu ke waktu
- g. Mengelola komunikasi dengan media massa (*media relations*)
- h. Menyusun dan mendistribusikan *press release*,
- i. Menyusun dan mendistribusikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan,
- j. Mengadakan *press conference*,
- k. Memaintain *website* Bank khususnya *content* yang terkait penyediaan informasi kepada investor, pelaksanaan GCG, dan kegiatan *Corporate Secretary*,
- l. Melakukan media monitoring dan/atau kliping atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama, Perusahaan Anak, maupun perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha Grup Panin, baik yang terbit di media cetak, media on-line, dan media elektronik lainnya.
- m. Merespon dan menangani secara cepat dan proporsional setiap pemberitaan negatif di mass media (cetak dan elektronik) baik yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama, Perusahaan Anak, maupun perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha PaninBank yang dapat berdampak negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap reputasi PaninBank.
- n. Berkoordinasi dengan *Customer Complain Handling Department* dalam memberikan tanggapan terhadap keluhan nasabah yang diterbitkan di mass media.
- o. Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan perkembangan terbaru perusahaan, publikasi penting dan kebijakan-kebijakan Manajemen yang penting untuk diketahui oleh seluruh pimpinan, staf dan karyawan Bank.
- p. Melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

- **Bidang Board Office Support**

Memastikan kegiatan Direksi dan Komite-komite Direksi berjalan secara efektif dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), antara lain:

- 1) Mengelola penyelenggaraan Rapat Direksi dan Komite-Komite Direksi,
- 2) Mengatur jadwal rapat,
- 3) Menyiapkan dan mengedarkan undangan rapat,
- 4) Menyusun agenda rapat,
- 5) Membuat risalah rapat, dan mengadministrasikan dokumen-dokumen rapat,
- 6) Memonitor dan menindaklanjuti keputusan rapat dan melakukan komunikasi internal bila diperlukan.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2021

Selama Tahun 2021, Sekretaris Perusahaan menjalankan berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam bidang Corporate Affair Sekretaris Perusahaan antara lain berhasil:
 - a. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, pada tanggal 9 Juni 2021, termasuk mempublikasi Pemberitahuan dan Pemanggilan RUPS di Media Cetak dan Website Bank, menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa dan KSEI sesuai ketentuan.
 - b. Menyelenggarakan Public Expose Tahunan Perseroan pada tanggal 17 Desember 2021, dan memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan Bursa.
 - c. Mengikuti perkembangan pasar modal termasuk menghadiri sosialisasi peraturan-peraturan baru dibidang Pasar Modal, serta memberikan update dan masukan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja terkait, antara lain:
 - POJK Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Oleh Emiten Dengan Inovasi Dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham
 - Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00031/BEI/03-2021 perihal Peraturan Nomor I-G Tentang Pencatatan Sukuk.
 - Surat Edaran OJK No. S-21/MS.12/2021 tentang Persiapan Pembentukan Task Force Keuangan Berkelanjutan.
 - d. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik melalui portal OJK e-Reporting/IDXNet.
 - e. Menyampaikan tanggapan atas pemberitaan di media masa sesuai permintaan Bursa Efek Indonesia.
 - f. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, termasuk laporan kepada Lembaga Pemeringkat, Wali Amanat dan lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Otoritas Perbankan.
 - g. Melakukan pengkinian tampilan dan melengkapi konten website Bank untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 8/POJK.04/2015 tentang

Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik

- h. Menyelenggarakan Press Conference dan menyusun serta mendistribusikan press release.
- i. Menyelesaikan penyusunan dan menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan kepada Regulator sesuai ketentuan dan mendistribusikan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan.
- j. Melakukan media monitoring dan/atau kliping atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan Bank, merespon secara cepat dan proporsional pemberitaan-pemberitaan negatif di media masa.
- k. Menyusun Laporan Keuangan Berkelanjutan (Sustainability Report) Bank Panin Tahun 2020 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2022 – 2025, dan menyampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

2. Dalam Bidang Board Office Support

Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan dan menghadiri 8 (delapan) Rapat Direksi, 4 (empat) Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi, 12 (dua belas) Rapat ALCO, dan 11 (sebelas) Rapat Komite-Komite Direksi, seperti Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, dan Rapat Komite Kebijakan Perkreditan.

Corporate Secretary juga bertanggung jawab.

- a. Membuat dan mengadministrasikan risalah rapat atas semua Rapat tersebut di atas
- b. Memonitor tindak lanjut keputusan Rapat
- c. Mengelola penyelenggaraan Workshop-workshop yang dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain : Workshop Corporate Strategy oleh Deloitte, Workshop Recovery Plan oleh Ernst & Young.

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya perusahaan merupakan nilai nilai yang menjadi panduan, tatanan dan pedoman tingkah laku seluruh karyawan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari. Perseroan menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki budaya kerja yang positif. Hal ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam I-CARE (*Integrity, Collaboration, Accountability, Respect dan Excellence*). Penerapan I-CARE dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi Perseroan untuk terus maju.

Nilai-nilai perusahaan ini disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan Pimpinan Perseroan melalui program pelatihan, Laporan Tahunan, Situs Web Perseroan dan berbagai kegiatan lainnya. I-CARE bertujuan untuk mendorong perhatian yang lebih besar kepada layanan dan kepuasan Pemangku Kepentingan melalui kerjasama yang berlandaskan kepercayaan dan visi bersama..

PERLINDUNGAN NASABAH

Ketentuan tentang perlindungan nasabah diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. PaninBank menerapkan kebijakan perlindungan nasabah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun ketentuan Bank Indonesia. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam melakukan transaksi, PaninBank diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada nasabah antara lain:

- a. Nama produk dan jenis produk
- b. Penerbit produk
- c. Manfaat dan risiko produk
- d. Persyaratan dan tata cara penggunaan produk
- e. Biaya-biaya yang melekat
- f. Perhitungan bunga/bagi hasil/margin keuntungan
- g. Jangka waktu berlakunya produk

Peraturan-peraturan tersebut tidak hanya mewajibkan PaninBank untuk menyampaikan informasi yang lengkap dan jelas kepada masyarakat, namun juga mewajibkan PaninBank untuk menjaga data nasabahnya. PaninBank diperkenankan memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis dari nasabah. Dimana, sebelum menyetujui datanya dapat diberikan kepada pihak lain, nasabah berhak mendapat penjelasan mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian data pribadi nasabah tersebut kepada pihak lain.

Pemberian informasi kepada nasabah disampaikan dengan sebaik-baiknya melalui brosur fitur produk, papan tarif, dan kurs mata uang di kantor Cabang PaninBank. Tenaga penjual/Marketing dibekali dengan pengetahuan dan produk perbankan yang memadai serta memiliki mutu standar pelayanan yang baik. Untuk pemasaran produk reksadana dan asuransi dimana PaninBank menjadi agen penjual dan tenaga penjual memiliki sertifikasi yang disyaratkan untuk agen penjual dari Otoritas Jasa Keuangan seperti AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) dan WAPERD (Wakil Agen Penjual Reksa Dana).

PaninBank juga senantiasa menyampaikan apakah dana nasabah yang disimpan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau tidak, serta menempelkan stiker keikutsertaan PaninBank dalam program penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), di seluruh kantor Cabang PaninBank.

KODE ETIK PERUSAHAAN (*CODE OF CONDUCT*)

Tujuan Kebijakan Kode Etik

Merupakan rambu-rambu bagi karyawan dalam melakukan aktivitasnya. Pedoman ini di selaraskan dengan nilai-nilai inti Perusahaan yang selama ini telah diterapkan dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Isi Kode Etik

Adapun yang diatur dalam kode etik perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan

2. Hubungan dengan Regulator dan Pemerintah

3. Hubungan dengan Pelaku Bisnis:

- a. Nasabah
- b. Vendor
- c. Investor

4. Hubungan Internal Bank

- a. Iklim kerja yang kondusif
- b. Perilaku Karyawan PaninBank
- c. Hubungan Keluarga di PaninBank
- d. Pengungkapan Informasi
- e. Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)

Karyawan PaninBank tidak diperbolehkan membicarakan atau membahas atau mendiskusikan baik secara lisan maupun tulisan mengenai hal-hal yang tidak menjadi informasi publik yang diutarakan oleh perwakilan resmi dari Bank atau Nasabah yang berpotensi mempengaruhi seseorang atau badan hukum untuk membeli atau menjual saham/valuta asing.

- f. Penggunaan dan Pemeliharaan Aset Bank

5. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan

PaninBank juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat luas melalui kegiatan program sosial yang dapat memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat (*Corporate Social Responsibilities*).

6. Benturan Kepentingan:

- a. Kepemilikan bisnis
- b. Bekerja di Luar Perseroan
- c. Penerimaan Hadiah atau Imbalan
- d. Pemberian Perjamuan atau Hiburan

7. Pelaporan dan Keandalan Pelaporan Keuangan

8. Anti Penyuapan dan Pencucian Uang

9. Sosialisasi, penerapan dan penegakan etika perusahaan.

PaninBank wajib mengkomunikasikan dan mensosialisasikan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku kepada seluruh tingkat dan jenjang organisasi PaninBank. Setiap Karyawan PaninBank yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku maupun Peraturan Perusahaan wajib melaporkan segala

informasi yang diketahuinya sesegera mungkin. Pelaporan ini dapat ditujukan kepada Komite GCG; *Fraud Management Team*; Atasan/ Atasan Langsung; atau menggunakan jalur *Whistleblowing* (kasihtau@panin.co.id).

10. Pernyataan kode etik berlaku di seluruh level organisasi perusahaan.

Sign off pada tanggal 5 Juni 2013 oleh Dewan Komisaris dan Direksi PaninBank. PaninBank mewajibkan seluruh Karyawan Perseroan untuk membaca, memahami dan menandatangani Lembar Pernyataan.

11. Budaya perusahaan.

Integrity, Collaboration Accountability, Respect and Excellence (I-CARE)

Upaya Peningkatan Pelaksanaan Kode Etik

Dalam meningkatkan pelaksanaan kode etik, PaninBank telah menerapkan beberapa upaya yaitu:

1. Sosialisasi, penerapan dan penegakan etika perusahaan, dimana PaninBank mengkomunikasikan dan mensosialisasikan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku kepada seluruh tingkat dan jenjang organisasi. Setiap Karyawan yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku maupun Peraturan Perusahaan wajib melaporkan segala informasi yang diketahuinya sesegera mungkin. Pelaporan ini dapat ditujukan kepada Komite GCG; *Fraud Management Team*; Atasan/ Atasan Langsung; atau menggunakan jalur *Whistleblowing*.
2. Pernyataan kode etik berlaku di seluruh level organisasi perusahaan. *Sign off* pada tanggal 5 Juni 2013 oleh Dewan Komisaris dan Direksi PaninBank, dimana PaninBank mewajibkan seluruh Karyawan PaninBank untuk membaca, memahami dan menandatangani Lembar Pernyataan.
3. Menerapkan budaya perusahaan sebagai bagian dari *Key Performance Indicator (KPI)*, yaitu *Integrity, Collaboration Accountability, Respect and Excellence (I-CARE)*.
4. Pelaksanaan Kode Etik PaninBank dilakukan sebagai berikut :
 - a Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan
 - b Hubungan dengan regulator dan pemerintah
 - c Hubungan dengan pelaku bisnis
 - d Hubungan dengan masyarakat dan lingkungan
 - e Hubungan internal
 - f Benturan kepentingan
 - g Pelaporan dan kehandalan pelaporan keuangan
 - h Anti penyuapan dan pencucian uang
 - i Disosialisasikan ke seluruh Karyawan dalam bentuk distribusi buku etika dan perilaku kepatuhan, *fraud awareness* dan *whistlesblowing system*
 - j Sanksi pelanggaran yang diatur dalam buku pemberian sanksi

PAKTA INTEGRITAS PERSEROAN

PaninBank mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan untuk memahami dan menandatangani Pakta Integritas. Pakta Integritas antara lain mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan senantiasa bertindak secara jujur, memiliki integritas serta profesionalisme yang tinggi. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan harus secara aktif ikut melindungi serta menjaga aset Perusahaan dan dana nasabah dengan mematuhi ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku.

KOMITMEN ANTI KORUPSI/ ANTI - CORRUPTION COMMITMENT

Pada PaninBank terdapat ketentuan tentang Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang antara lain menentukan bahwa:

1. Penerimaan Hadiah atau Imbalan

Setiap Karyawan Perseroan dilarang menerima sesuatu, baik dana tunai maupun non-tunai lainnya, dari pihak luar sebagai balas jasa untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Bank ataupun pemberian informasi tentang Bank yang sifatnya rahasia atau sebagai balas jasa atas fasilitas yang diterima nasabah dari Bank.

2. Anti Penyuapan

PaninBank dan Karyawan PaninBank tidak menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non-tunai lainnya, yang mengatasnamakan PaninBank atau pribadi kepada Pihak di luar PaninBank seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi apapun ataupun Nasabah dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun tidak diperkenankan untuk menggunakan pihak ketiga dalam menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset nontunai lainnya, yang mengatasnamakan PaninBank atau pribadi kepada Pihak di luar PaninBank.

PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN

PaninBank telah membentuk Unit Penanganan Pengaduan Nasabah. Unit ini bertanggungjawab mengelola dan menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai dengan standar dan ketentuan *Service Level Agreement (SLA)* yang terdapat dalam Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Dengan dibentuknya unit ini akan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan secara efektif dalam jangka waktu yang memadai. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat risiko reputasi PaninBank, karena apabila Pengaduan tidak segera ditanggulangi dalam jangka panjang dapat berpotensi menurunkan kepercayaan Nasabah.

Fungsi khusus penanganan dan penyelesaian Pengaduan adalah fungsi yang menangani dan menyelesaikan Pengaduan baik yang diajukan secara lisan atau secara tertulis yang ada di Kantor Pusat sebagai *Coordinator* ataupun yang terdapat di Kantor Cabang Utama (KCU)/ Kantor Cabang Pembantu (KCP)/unit kerja terkait di Kantor Pusat.

Dalam melakukan penyelesaian pengaduan nasabah, unit kerja Penanganan Pengaduan Nasabah berpedoman pada Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang senantiasa dikinikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengkinian Pedoman yang terakhir dilakukan untuk menyesuaikan dengan dua ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan oleh Bank Indonesia, sebagai berikut:

- a. POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
- c. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- d. POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perusahaan memiliki mekanisme penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) yang merupakan salah satu komponen Pilar Deteksi dalam Strategi Anti Fraud PaninBank. Seluruh pihak baik internal maupun eksternal dapat melaporkan indikasi pelanggaran kepada Bank melalui saluran yang sudah disediakan. Melalui fungsi deteksi dini yang efektif, Bank dapat mengetahui indikasi terjadinya *fraud* dengan lebih cepat, sehingga langkah mitigasi agar risiko tidak berlanjut dapat segera dilakukan. Pengaduan yang memiliki indikasi yang kuat ditindaklanjuti dengan proses investigasi untuk mengetahui penyebab, modus operandi, dan pelaku *fraud* guna menentukan tindak lanjut yang dapat dilakukan baik secara finansial maupun non-finansial bagi PaninBank.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Whistleblowing (pengaduan pelanggaran) merupakan upaya pengendalian dengan menyediakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi pada Perseroan. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme *Whistleblowing* ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga penerapan sanksi yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut. Penyampaian laporan pelanggaran dapat dilakukan dengan Surat Tertulis, media kotak pos 1771 JKT 10017. atau media surat elektronik: kasihtau@panin.co.id atau panin@panin.co.id.

Pelapor tidak diharuskan menyertakan identitas pelapor maupun bukti atas indikasi pelanggaran yang dilaporkan. Informasi dan hal-hal yang dapat dilaporkan antara lain apabila dalam lingkup perusahaan terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Penipuan
2. Pencurian
3. Penggelapan aset
4. Pembocoran informasi
5. Tindak Pidana Perbankan
6. Tindak Pidana Pencucian Uang
7. Pelanggaran Etika Perbankan
8. Tindakan/pelanggaran lainnya yang dilaporkan dengan itikad baik

Perlindungan bagi *Whistleblower*

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, PaninBank berkewajiban untuk memberikan apresiasi dan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan pelapor meliputi:

1. Fasilitas media pelaporan dan administrasinya yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan kasus yang dilaporkan.
2. Perlindungan/jaminan kerahasiaan identitas *whistleblower*/pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
3. Perlindungan dalam hal kasus pelanggaran tersebut masuk dalam sengketa di pengadilan.
4. Perlindungan dari tindakan balasan oleh terlapor
5. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor
6. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor

Demi memastikan kerahasiaan tersebut, bagi pelapor yang menyertakan identitasnya, maka nama pelapor hanya diketahui oleh *whistleblowing officer* yang ditunjuk, yang diberi wewenang untuk mengakses e-mail dimaksud.

Penanganan Pengaduan

Laporan kejadian/ dugaan *Fraud* yang disampaikan oleh pelapor/ *whistleblower* sedikitnya mencakup informasi pokok yaitu sebagai berikut:

1. Jenis *fraud*;
2. Tempat kejadian;
3. Pihak yang terlibat;
4. Modus operandi;
5. Indikasi kerugian.

Semua laporan yang diterima akan dianalisa oleh *whistleblowing officer* yang ditunjuk. Apabila informasi awal dianggap sudah cukup, *whistleblowing officer* selanjutnya menyampaikan hasil analisisnya kepada *Fraud Management Team*, yang melibatkan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), *Human Resources* ataupun unit lainnya yang terkait dengan materi yang dilaporkan, untuk dilakukan investigasi.

Perkembangan tindak lanjut Laporan akan diinformasikan kepada pelapor sampai dengan laporan selesai ditindak lanjuti. Apabila laporan yang diberikan tidak relevan dengan ruang lingkup dari program *whistleblowing*, maka *whistleblowing officer* akan memberikan tanggapan kepada pelapor bahwa laporan yang masuk tidak akan ditindaklanjuti, yang akan disertai dengan penjelasan dari unit yang terkait dengan laporan tersebut.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Penerima laporan adalah *Whistleblowing Officer* berada di bawah *Fraud Management Team* yang ditunjuk oleh Presiden Direktur, ini bertanggung jawab terutama untuk melakukan administrasi pelaporan, monitor penyelesaian laporan serta menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan Terlapor.

Hasil penanganan pengaduan

Setiap Laporan yang diterima wajib diadministrasikan dengan baik dan secara berkala dilaporkan kepada Direktur yang membidangi Kepatuhan dan Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia. Identitas pelapor tetap dijaga kerahasiaannya sepanjang proses penanganan dan pengawasan tersebut. Pihak yang Mengelola Pengaduan Sesuai kebijakan internal PaninBank saat ini adalah Satuan Kerja Manajemen Risiko yang memiliki wewenang untuk membuka *email* pengaduan dan melakukan pengelolaan atas program *whistleblowing* ini.

Hasil investigasi yang dilakukan oleh SKAI akan dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada *Fraud Management Team*. Apabila ada tindakan disiplin terhadap terlapor, maka PaninBank berpedoman kepada Pedoman penegakan disiplin dan sanksi yang berlaku. Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud*/pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel Pengaduan Tahun 2021

Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Perihal	Jumlah
1	Pengaduan Nasabah	621
2	Pengaduan Nasabah yang diselesaikan pada tahun yang sama	621

PERMASALAHAN HUKUM

Perkara Penting yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat perkara penting yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris & Direksi yang sedang menjabat pada PaninBank.

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi oleh Perusahaan

Dalam kegiatan usahanya, PaninBank menghadapi Risiko litigasi dan dapat tersangkut kasus hukum. Adapun Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi PaninBank selama periode tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kasus Hukum	Jumlah Kasus Perdata	Jumlah Kasus Pidana
Kasus yang Sudah Selesai	27	0
Kasus Yang Masih Dalam Penyelesaian	186	0
Jumlah Kasus Hukum	213	0

Tabel Perkara Penting yang Sedang Dihadapi oleh Perusahaan

No	Pokok Perkara	Putusan	Posisi Terakhir
1	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Sonny Sandra - Nama Tergugat: KCU Kediri - Nomor Perkara: PN. No. 3/Pdt.G/Pn. Kdr/2020 - Materi gugatan: Perbuatan Melawan Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - No. Perkara PN. No. 3/Pdt.G/Pn. Kdr/2020 - No. Perkara Banding No. 588/Pdt/2020/PT. Sby - Pada Tingkat Pertama Penggugat Menang. - Pada Tingkat Banding Penggugat Menang. - Pada Tingkat Kasasi Penggugat Menang 	Bank Panin mengajukan Peninjauan Kembali
2	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Yudiawan Tansari - Nama Tergugat: Dirjen Pajak, Tergugat II: Bank Panin dan Tergugat III: Bank Central Asia (BCA) - Nomor Perkara: 585/PDT.G/2015/PN.JKT.PST - Materi gugatan yaitu Pemblokiran Rekening Pajak Penggugat oleh KCU Bank Panin Pecenongan atas Perintah Dirjen Pajak, sita jaminan gedung Bank Panin KCU Pecenongan - Nilai Gugatan: Materiil: Rp. 21,000,000 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal Putusan Pengadilan Negeri pada 26 Juli 2016 - Menyatakan Kantor pajak melakukan PMH, Menyatakan SKP terhadap wajib pajak adalah. 	Proses Peninjauan Kembali
3	<ul style="list-style-type: none"> - Penggugat : Kang Taryo Honggo - Tergugat I: PT. Bank Panin Surabaya Coklat - Tergugat II: KPKNL Surabaya - Tergugat III: PT. Duta Balai Lelang - Tergugat IV: Hary Tjahjono - Nomor Perkara: 32/Pdt.G/2012/Pn.Sby - Materi gugatan yaitu penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terkait jaminan telah terjual dan debitur tidak bersedia mengosongkannya - Nilai gugatan: Materil & Imateriil Rp.14.525.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal putusan Pengadilan Tinggi tanggal 27 April 2016 - Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri 	Proses Kasasi
4	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Bank BNI - Nama Tergugat I: Dedi Rovianto. - Nama Tergugat II: Bank Panin Materi Gugatan: 	<ul style="list-style-type: none"> - 197/PDT.G/2016/PN.JK T.TIM - Putusan Pengadilan (Banding & Kasasi) tidak mempermasalahkan tindakan yang dilakukan 	Proses Peninjauan Kembali

		Bank Panin	
5	<ul style="list-style-type: none">- Nama Penggugat: PT Berlian Laju Tanker- Nama Tergugat 1: Bank Panin- Materi Gugatan: Perbuatan Melawan Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Proses Mediasi di Pengadilan Negeri	Proses Mediasi di Pengadilan Negeri

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

KETERBUKAAN INFORMASI

Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan peraturan regulator.

Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan POJK Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Tanggal 31 Maret 2015 beserta perubahannya dan salinan Surat Edaran OJK No.43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional".

Dengan berpedoman pada POJK di atas, bank menyampaikan Laporan ke regulator dan para *stakeholder*. Laporan tersebut antara lain :

- Laporan Publikasi Bulanan
- Laporan Publikasi Triwulanan
- Kewajiban Pengungkapan Permodalan
- Laporan Publikasi Tahunan
- Laporan Publikasi Lain

Laporan tersebut juga terdapat pada Situs Web Bank Panin sesuai jangka waktu, beserta dengan informasi lainnya yang dapat diakses oleh publik dengan mudah.

HUBUNGAN DENGAN INVESTOR DAN MEDIA

Dalam penyampaian informasi dan komunikasi dengan pihak eksternal, PaninBank mengutamakan prinsip-prinsip komunikasi yang terbuka, aktif dan bertanggungjawab. *Investor Relation* memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua informasi yang dibutuhkan oleh Pemegang Saham dan Investor dapat terpenuhi dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan dan perundang undangan yang berlaku dan memperhatikan regulasi Otoritas Pengawas Modal dan Bursa Efek tanpa mengurangi kewajiban untuk melakukan *full disclosure* dan prinsip-prinsip *equitable treatment*.

Investor Relation harus memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah valid dan telah diverifikasi oleh fungsi-fungsi lain di dalam Perusahaan yang berkaitan dengan informasi tersebut sebelum disampaikan kepada para investor.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam mendokumentasikan pengelolaan hubungan media, baik media elektronik maupun cetak, sehingga integritas dan kredibilitas atas informasi Perusahaan kepada masyarakat dapat dijaga.

Bentuk komunikasi dengan media massa bisa berupa konferensi pers, pengumuman, press release maupun wawancara. Setiap pertanyaan, kritik maupun saran dari masyarakat baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui berbagai sarana komunikasi harus dapat ditanggapi dengan sebaik-baiknya. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tanggapan yang akan disampaikan oleh Perseroan dengan memperhatikan masukan yang diberikan oleh Divisi/Biro terkait.

Pada tahun 2021, PaninBank mengadakan berbagai acara secara reguler atau secara khusus agar masyarakat investor bisa mendapatkan informasi tentang Bank Panin, antara lain melalui *press conference*, pendistribusian siaran pers, media *interview*, *analyst meeting*, *analyst visit*, dan lain-lain.

PROMOSI DI MEDIA MASSA

PaninBank melakukan promosi di media massa untuk memperkenalkan dan memasarkan produk PaninBank agar lebih dikenal dan diminati luas oleh masyarakat. Promosi yang dilakukan melalui media massa (cetak maupun elektronik), melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur pemasangan iklan (advertising) dan jalur pemberitaan (liputan oleh media). Kegiatan promosi melalui media massa diselenggarakan oleh Divisi Branding & Communications, baik yang bersifat *Above the line* (ATL), seperti TV, Radio, Majalah, Koran, dan *Billboard*, maupun yang bersifat *Below the Line* (BTL), berupa event, spanduk, poster, flyer dan lain-lain.

WEBSITE PANINBANK

PaninBank senantiasa memelihara *website* Perusahaan (www.panin.co.id) dengan baik, yang ditujukan untuk pemberian informasi dan juga kepentingan *stake holders*. Publik dapat dengan mudah mengakses *website* PaninBank untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait PaninBank, baik itu informasi keuangan maupun non-keuangan Bank, mulai dari produk/fasilitas, laporan-laporan yang wajib dicantumkan pada *website* Bank Panin, sampai pada kesempatan untuk berkarir pada PaninBank. Publik juga dapat memanfaatkan *website* Bank Panin untuk menghubungi PaninBank apabila terdapat hal yang ingin disampaikan. Selain itu, *website* Bank Panin juga dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan transaksi *internet banking*.

SIARAN PERS

PaninBank merespon dan menyediakan informasi bagi media massa dalam bentuk wawancara langsung, jumpa pers, maupun mengeluarkan rilis untuk pers (press release). Pada tahun 2021 PaninBank menyelenggarakan 1 (satu) Konferensi Pers dan mengeluarkan 4 (empat) Siaran Pers sebagai berikut:

A. Konferensi Pers

No	Agenda	Tanggal	Tempat
1	Public Expose PaninBank	17 Desember 2021	Jakarta

B. Press Release

No.	Tanggal	Agenda
1	31 Maret 2021	Kinerja Tahun 2020
2	10 Mei 2021	Kinerja Kuartal I Tahun 2021
3	10 Agustus 2021	Kinerja Semester I Tahun 2021
4	28 Oktober 2021	Kinerja Kuartal III Tahun 2021

KORESPONDENSI

Selama tahun 2021 Perusahaan mengirimkan surat/melakukan korespondensi dengan pihak eksternal yaitu Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

Korespondensi ke Otoritas Jasa Keuangan

No.	Tanggal	No. Surat	Perihal
1	19 Januari 2021	003/DIR/OJK/21	Laporan Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Market Conduct PT Bank Panin Tbk
2	28 Januari 2021	005/DIR/OJK/21	Laporan Audit Semester II Tahun 2020
3	28 Januari 2021	007/DIR/OJK/21	Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank
4	29 Januari 2021	008/DIR/OJK/21	Laporan Rincian Pihak Terkait Posisi Desember 2020
5	29 Januari 2021	011/DIR/OJK/21	Laporan Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan
6	3 Februari 2021	013/DIR/OJK/21	Laporan RBBR PT Bank Panin Tbk Desember 2020
7	3 Februari 2021	014/DIR/OJK/21	Laporan Penilaian KPMM Bank (ICAAP) 2020
8	3 Februari 2021	015/DIR/OJK/21	Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak
9	19 Februari 2021	019/DIR/OJK/21	Laporan RBBR Konsolidasi
10	19 Februari 2021	020/DIR/OJK/21	Laporan Penilaian KPMM Konsolidasi (ICAAP) 2020
11	19 Februari 2021	021/DIR/OJK/21	Laporan Self Assessment GCG Semester II 2020
12	8 Maret 2021	028/DIR/OJK/21	Laporan Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
13	31 Maret 2021	031/DIR/OJK/21	Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasi
14		032/DIR/OJK/21	
15		032/DIR/OJK/21	
16	5 April 2021	036/DIR/OJK/21	Hasil Pemeringkatan Tahunan Efek Bersifat Utang
17	9 April 2021	040/DIR/OJK/21	Laporan Awal Bottom Up Stress Test (BUST)
18	13 April 2021	042/DIR/OJK/21	Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak
19	19 April 2021	044/DIR/OJK/21	Jatuh Tempo Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap IV Tahun 2018
20	26 April 2021	046/DIR/OJK/21	Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan
21	27 April 2021	047/DIR/OJK/21	Laporan Hasil Audit Aplikasi Loan System
22	28 April 2021	048/DIR/OJK/21	Laporan Profil Risiko PT Bank Panin Tbk

Together, Building Sustainable Growth

23			Laporan Profil Risiko Konsolidasi
24	29 April 2021	049/DIR/OJK/21	Laporan Rencana Bisnis Bank PT Bank Panin Tbk
25	29 April 2021	050/DIR/OJK/21	Penyampaian Laporan PelaksanaanTata Kelola/GCG PT Bank Panin Tbk Tahun 2020
26	3 Mei 2021	055/DIR/OJK/21	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPS
27	7 Mei 2021	062/DIR/OJK/21	Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak
28	17 Mei 2021	064/DIR/OJK/21	Penjelasan Atas Rencana RUPS Tahunan
29	18 Mei 2021	065/DIR/OJK/21	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS
30	18 Mei 2021	067/DIR/OJK/21	Penyampaian Laporan Tahunan 2020
31	24 Mei 2021	070/DIR/OJK/21	Calon Pengurus Entitas Anak
32	31 Mei 2021	071/DIR/OJK/21	Penyampaian Laporan Keberlanjutan PT Bank Panin Tbk Tahun 2020
33	10 Juni 2021	079/DIR/OJK/21	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Tahunan
34	11 Juni 2021	080/DIR/OJK/21	Penyampaian Laporan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Bank Panin Tbk
35	16 Juni 2021	081/DIR/OJK/21	Penyampaian Laporan Tahunan 2020
36	28 Juni 2021	083/DIR/OJK/21	Jatuh Tempo Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016
37	6 Juli 2021	090/DIR/OJK/21	Pembentukan Kelompok Usaha Bank
38	7 Juli 2020	092/DIR/OJK/21	Penyampaian Risalah RUPS Tahunan
39	30 Juli 2021	096/DIR/OJK/21	Laporan Keuangan Konsolidasi
40		097/DIR/OJK/21	
41		098/DIR/OJK/21	
42	2 Agustus 2021	100/DIR/OJK/21	Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank PT Bank Panin Tbk
43	4 Agustus 2021	103/DIR/OJK/21	Laporan Audit Semester I Tahun 2021
44	6 Agustus 2021	107/DIR/OJK/21	Laporan ICAAP Bank Posisi Juni 2021
45	6 Agustus 2021	108/DIR/OJK/21	Laporan RBBR Bank Posisi Juni 2021
46	6 Agustus 2021	109/DIR/OJK/21	Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak
47	20 Agustus 2021	112/DIR/OJK/21	Laporan RBBR Konsolidasi Posisi Juni 2021
48	20 Agustus 2021	113/DIR/OJK/21	Laporan ICAAP Konsolidasi Posisi Juni 2021
49	23 Agustus 2021	114/DIR/OJK/21	Laporan Self Assessment GCG Terintegrasi
50	1 September 2021	118/DIR/OJK/21	Laporan Keberlanjutan PT Bank Panin Tbk Tahun 2020
51	2 September 2021	119/DIR/OJK/21	Penjelasan Atas Laporan Keuangan PT Bank Panin Tbk Tahun 2020
52	16 September 2021	124/DIR/OJK/21	Permintaan Nama IKBI Dalam Rangka Persiapan Pembentukan Task Force Keuangan Keberlanjutan
53	17 September 2021	125/DIR/OJK/21	Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI
54	23 September 2021	126/DIR/OJK/21	Transaksi Afiliasi dengan Perusahaan Terkendali PT Bank Panin Tbk
55	7 Oktober 2021	131/DIR/OJK/21	Permintaan Informasi Pengendali Perusahaan Terbuka
56	8 Oktober 2021	133/DIR/OJK/21	Calon Pengurus Entitas Anak
57	27 Oktober 2021	142/DIR/OJK/21	Jatuh Tempo Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2016

58	28 Oktober 2021	146/DIR/OJK/21	Laporan Profil Risiko Bank Panin
59	28 Oktober 2021	147/DIR/OJK/21	Laporan Profil Risiko Konsolidasi
60	28 Oktober 2021	148/DIR/OJK/21	Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank
61	5 November 2021	152/DIR/OJK/21	Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak
62	29 November 2021	162/DIR/OJK/21	Laporan Rencana Korporasi Bank Panin Tahun 2021-2022
63	30 November 2021	165/DIR/OJK/21	Tata Kelola Perpajakan
64	3 Desember 2020	166/DIR/OJK/21	Penyampaian RBB Bank Panin Tahun 2022-2024
65	6 Desember 2021	167/DIR/OJK/21	Penyampaian RAKB Bank Panin Tahun 2022-2025
66	6 Desember 2021	178/DIR/OJK/21	Perubahan Direksi Pemegang Saham Votrait No. 1103 PTY LTD

FUNGSI INVESTOR RELATION

Unit Kerja Hubungan Investor bertanggungjawab dalam menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu kepada pihak eksternal antara lain pemegang saham, calon investor, analis pasar modal, bank koresponden, lembaga pemeringkat, dan kreditur PaninBank.

Secara berkala *Investor Relations* melakukan paparan kinerja, pertemuan analis, pertemuan dengan investor, dan pertemuan-pertemuan lain dengan tujuan menyampaikan pembaruan kinerja, strategi Bank, serta *review* terhadap kondisi makro ekonomi Indonesia.

Investor Relations memiliki tanggungjawab utama untuk mewakili Direksi dalam hubungannya dengan investor, analis pasar modal dan *fund-manager*, serta pemegang saham, termasuk untuk:

1. Merespon permintaan data/informasi yang dibutuhkan oleh *analyst/fund Manager*
2. Menyiapkan materi presentasi untuk *analyst meeting/conference*
3. Menghadiri forum-forum/*analyst meeting*
4. Mereview, mengoreksi dan melengkapi draft '*research report*' dari analis pasar modal dan lembaga pemeringkat lainnya
5. Menyelenggarakan *public expose* tahunan sesuai ketentuan
6. Mengikuti *analyst meeting* sesuai penugasan Direksi

KOMUNIKASI INTERNAL

PaninBank mempertahankan komunikasi dua arah yang efektif dengan para karyawan. Komunikasi juga dilakukan melalui Organisasi Ikatan Karyawan PaninBank (IKBP), terutama yang terkait dengan pengelolaan hubungan yang harmonis dengan seluruh karyawan. PaninBank juga memberikan informasi mengenai perkembangan bisnis, kemajuan bisnis, aturan dan peraturan Perusahaan, dan promosi pekerjaan intern, berupa pendistribusian "President Director's Note" secara reguler.

Komunikasi internal dilaksanakan berdasarkan pada prinsip keterbukaan transparansi, dua arah, tanggung jawab, tepat waktu, akurat dan sederhana. Untuk membina komunikasi yang

baik dengan para karyawan, PaninBank selain mengadakan berbagai acara pertemuan antar karyawan, juga aktif memanfaatkan media komunikasi seperti:

- Majalah *Internal in Actions*
- Majalah *Internal Best Lifestyle*
- *Smartnews*
- Surat Edaran Dicitak dan E-mail
- Rapat Kerja Tahunan
- Kunjungan Direksi
- Perayaan Ulang Tahun Perusahaan
- Acara Olahraga Karyawan

RENCANA STRATEGIS PERSEROAN

Target Jangka Pendek dan Menengah

Perseroan menetapkan target jangka pendek yang ingin dicapai dalam setahun ke depan dan target jangka menengah untuk tiga tahun mendatang dengan memperhitungkan visi-misi, berpusat pada nasabah, produk, dan distribusi yang diterjemahkan ke dalam penguatan tiga aspek, yaitu *organizational flexibility*, *customer centric*, dan *profit optimization*.

Adapun target jangka pendek dan menengah Perseroan adalah sebagai berikut:

TARGET JANGKA PENDEK & MENENGAH

JANGKA PENDEK

Perseroan menetapkan target jangka pendek yang ingin dicapai dalam setahun ke depan dan target jangka menengah untuk tiga tahun mendatang. Sejalan dengan rencana korporasi, langkah-langkah strategis diarahkan pada penguatan tata kelola dan infrastruktur digital.

1. Mengoptimalkan Fungsi Intermediasi

Kinerja intermediasi perbankan pada tahun ini secara umum menunjukkan perbaikan meski masih terbatas. Bank Panin berkomitmen untuk menjalankan fungsi intermediasi secara optimal pada tahun depan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Penyaluran kredit diproyeksikan tumbuh 6%-8% sementara penghimpunan DPK tumbuh 5%-7%. Perbaikan struktur CASA terus dilakukan dimana CASA diproyeksikan bisa mencapai sekitar 49% pada tahun depan. Dalam upaya mencapai target tersebut, rencana penanaman dana disusun dengan tetap memperhatikan kebutuhan cadangan primer dan sekunder yang sehat sesuai ketentuan. Penyaluran kredit dilakukan dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam kerangka *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Bank.

2. Memperkuat Tatakelola

Bank berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan. Tata kelola lembaga keuangan, terutama sektor perbankan merupakan salah satu pilar reformasi yang telah dan terus dilaksanakan. Manajemen risiko merupakan inti dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Untuk itu, strategi penguatan tata kelola

Bank diarahkan pada penguatan manajemen risiko, terutama terkait prosedur standar operasi dan kepatuhan.

3. Memperkuat Infrastruktur Digital

Peningkatan adopsi teknologi digital selama pandemi telah mengubah lanskap industri keuangan. Ditengah persaingan dalam industri perbankan yang semakin ketat, Bank berupaya untuk mempercepat penguatan kapabilitas teknologi dan digitalisasi untuk merangkul perubahan. Penerapan program otomasi proses bisnis mulai dilakukan untuk mendukung digital banking. Bank memproyeksikan Peluncuran Digital Banking Fase I akan dilaksanakan pada triwulan III-2022

JANGKA MENENGAH

1. Memperluas Basis Nasabah Loyal

Nasabah loyal merupakan aset penting dan keunggulan kompetitif Bank Panin. Namun Bank Panin menyadari perlunya akselerasi regenerasi. Sinergi seluruh satuan kerja dan kelompok usaha Panin yang didukung dengan penguatan tata kelola dan infrastruktur digital diharapkan bisa meningkatkan jumlah rekening hingga dua kali lipat dari yang ada saat ini

2. Memperkuat Pasar Kredit Komersial dan Ritel

Penetrasi segmen komersial yang kuat, terutama pada usaha kecil-menengah merupakan kekuatan Bank Panin. Porsi total kredit komersial dan ritel terhadap kredit lainnya diproyeksikan bisa mencapai 55:45 pada tiga tahun mendatang. Dengan begitu, peringkat Bank Panin dalam segmen perbankan komersial dan ritel diharapkan bisa naik ke posisi 4

3. Memperbesar Fee-Based Income

Bank berkomitmen untuk terus mengembangkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, salah satunya melalui peningkatan fee-based income. Perluasan basis nasabah dan digital banking diharapkan bisa mendorong layanan transaction banking serta berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan dari fee-based

TARGET JANGKA PANJANG

Dalam rangka mewujudkan visi ‘Menjadi Bank pilihan utama bagi nasabah individu dan bisnis dengan kearifan lokal’, Bank Panin telah menyerap dan menetapkan aspirasi-aspirasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sebagai berikut:

- 1) Memperkuat praktik tata kelola yang baik dengan mewujudkan tingkat kesehatan yang baik sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 2) Memperkuat infrastruktur digital yang unggul dengan menyelesaikan transformasi digital banking
- 3) Menuju bank komersial dan ritel terkemuka, dengan :
 - Mendorong market share kredit komersial dan komersial di Indonesia
 - Meningkatkan porsi kredit komersial dan ritel terhadap kredit lainnya
 - Memperluas basis nasabah loyal

Untuk mencapai aspirasi tersebut, PaninBank menetapkan tujuan-tujuan strategis. Tujuan strategis terangkum dalam tema ONE PANIN yang bisa dimaknai sebagai sebuah sinergi menjadi SATU PANIN demi mewujudkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

O	<i>Organizational strengthening – Memperkuat organisasi</i> Memperkuat organisasi untuk dapat merangkul dan beradaptasi dengan perubahan
N	<i>Network (branch) optimizing – Mengoptimalkan jaringan cabang</i> Mengoptimalkan jaringan cabang untuk bisa flexibel dan agile serta selaras dengan pengembangan digital banking
E	<i>Ecosystem building – Membangun ekosistem</i> Membangun ekosistem kelompok usaha untuk menciptakan layanan omnichannel dengan dukungan digital banking
P	<i>People maintaining – Mempertahankan karyawan</i> Mempertahankan karyawan top talent untuk mewujudkan stabilitas operasional
A	<i>A governance aligning – Menyelaraskan tata kelola</i> Menyelaraskan tata kelola untuk penguatan risk management
N	<i>New segments and products exploring – Mengeksplorasi segmen nasabah dan produk baru</i> Meningkatkan segmen nasabah dan produk baru untuk menjawab kebutuhan nasabah dan meningkatkan customer experience
I	<i>Infrastructure of digital banking developing – Mengembangkan infrastruktur digital banking</i> Mengembangkan infrastruktur digital banking yang mengarah pada bank dengan digital enabled (human led)
N	<i>New loyal customer seizing – Merebut nasabah loyal baru</i> Merebut nasabah loyal baru ke segmen millennial dan iGeneration untuk membentuk <i>engagement</i> yang berkelanjutan

Selama tahun 2021 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait BankPanin. Berikut merupakan rincian penyediaan dana kepada pihak terkait Bank dan juga terhadap debitur inti Bank (tidak terkait) per 31 Desember 2021:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
Kepada Pihak Terkait	133	2,535,494
Kepada Debitur Inti^(*):		

- Individual	7	7,526,705
- Grup	18	34,860,215

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Selama tahun 2021 Bank Panin tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan Politik. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dilakukan dalam 5 bidang, yaitu bidang Kesehatan, Kesjahteraan sosial dan Penanggulangan Bencana, Pemeliharaan lingkungan, serta bidang Pendidikan, Seni dan Olahraga. Jumlah dana yang disalurkan untuk kegiatan sosial dan CSR pada tahun 2021 sebesar Rp. 5.720.561.624 ,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) yang terdistribusi ke kegiatan sebagai berikut:

SHARES OPTION

Saat ini PaninBank belum memiliki program *share option* baik kepada Manajemen (MSOP) maupun kepada karyawan (ESOP).

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan perorangan, anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun karyawan Perseroan yang menyebabkannya tidak dapat bertindak secara independen dan obyektif.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tiap individu PaninBank harus senantiasa mendahulukan kepentingan Bank diatas kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lainnya. Di samping itu, setiap individu yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan harus membuat pernyataan bahwa individu yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya.

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam RUPS sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
2. Karyawan yang memiliki atau berpotensi memiliki benturan kepentingan harus segera mengungkapkannya kepada atasan langsung, sesuai jenjang struktur organisasi.
3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan PaninBank atau mengurangi keuntungan PaninBank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
4. Direksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan PaninBank tidak berwenang mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan yang berhak mewakili Perusahaan adalah Direksi/Dewan Komisaris/pihak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Dewan Komisaris dan Direksi wajib untuk membuat pernyataan, secara tahunan, mengenai ada atau tidak adanya benturan kepentingan dan tidak terdapat intervensi pemilik Perusahaan pada setiap keputusan yang telah diambil dan seluruh proses telah

sesuai dengan peraturan dan kebijakan Perusahaan. Apabila Dewan Komisaris dan Direksi memiliki benturan kepentingan, Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyatakan bahwa seluruh keputusan yang pernah diambilnya tetap obyektif, independen, dan tidak merugikan Perseroan.

Selama tahun 2021 **tidak terdapat** transaksi yang mengandung benturan kepentingan oleh Direksi dan/atau karyawan lainnya.

TATAKELOLA TERINTEGRASI DAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Tatakelola Terintegrasi

Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan Tatakelola Terintegrasi Perusahaan

Kebijakan tata kelola terintegrasi merupakan seperangkat aturan dalam mengimplementasikan tata kelola terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Grup Panin. Adapun kebijakan pokok terkait tata kelola terintegrasi antara lain:

1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Revisi II yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 2 November 2021.
2. Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi Revisi I yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris pada bulan Oktober 2021.
3. Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi yang disahkan dengan ketetapan Dewan Komisaris tanggal 27 Januari 2016.
4. Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris pada bulan Oktober 2021.
5. Pedoman Audit Internal Terintegrasi Revisi I yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 30 Oktober 2017.
6. Pedoman Kepatuhan Terintegrasi Revisi II yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 2 November 2021.

PENILAIAN TATA KELOLA TERINTEGRASI (*Self Assessment* Penerapan Tata Kelola Terintegrasi)

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2021

Entitas Utama : PT Bank Panin Tbk

Posisi Laporan : **Juni 2021 (semester I 2021)**

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	<p>Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.</p>
Analisis	
<p>Secara umum, Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menerapkan dan mengimplementasikan Tata Kelola Terintegrasi pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 /POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Menunjuk Surat Bank Panin selaku Entitas Utama No. 011/DIR/OJK/21 tanggal 29 Januari 2021 tentang Laporan Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan maka Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Bank Panin Tbk, sebagai Entitas Utama; • PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, sebagai LJK anggota; • PT Clipan Finance Indonesia Tbk, sebagai LJK anggota; • PT Panin Sekuritas Tbk, sebagai LJK anggota; • PT Panin Aset Manajemen, sebagai LJK anggota; • PT Panin Dai-Ichi Life, sebagai LJK anggota. <p>Ruang lingkup penerapan Tata Kelola Terintegrasi mencakup Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin yang secara komprehensif dan terstruktur mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) • Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) • Hasil Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) <p>Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:</p> <p>A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:</p>	

- Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menyusun Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
 - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
 - Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Pedoman Audit Internal Terintegrasi
 - Pedoman Kepatuhan Terintegrasi
 - Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menetapkan organ pendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi
 - Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
- Perbedaan jenis bidang usaha dan struktur konglomerasi yang bersifat horizontal, merupakan kendala yang dihadapi dalam melakukan koordinasi dan sinergi diantara LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Namun demikian kendala tersebut secara bertahap dapat dimitigasi seiring dengan dukungan dan komitmen penuh dari PT Bank Panin Tbk selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
 - Fungsi-fungsi terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup fungsi Manajemen Risiko, fungsi Internal Audit, dan fungsi Kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin masih sangat terbatas. Hal ini akan menjadi perhatian dan terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
- Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi telah disosialisasikan kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
 - Komitmen dan dukungan dari Entitas Utama untuk terus memantau dan memastikan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
 - Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama senantiasa melakukan penyempurnaan dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui sejumlah rapat, workshop, dan sosialisasi bersama dengan seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
- Efektivitas evaluasi atas Buku Pedoman belum dilakukan secara sempurna. Hal ini senantiasa menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses evaluasi Buku Pedoman.
 - Standar indikator tata kelola dan manajemen risiko yang berbeda untuk masing-masing sektor industri keuangan, sehingga membutuhkan waktu untuk menyelaraskan penerapan indikator tata kelola dan manajemen risiko secara *group-wide*.

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku saat ini tentang Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Selama semester I tahun 2021 telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 1 (satu) kali.
- Adapun pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yaitu mengenai evaluasi pembahasan hasil Implementasi Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing LJK selama semester I 2021, Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan dan hal-hal lain/*current issue*.
- Pada Semester I 2021 Entitas Utama telah menerima kewajiban pelaporan terkait penerapan Pengawasan Terintegrasi sebagai bagian *monitoring* Entitas Utama terhadap anggota Konglomerasi Keuangan, Laporan tersebut meliputi :
 - Laporan Profil Risiko masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
 - Laporan Tata Kelola Terintegrasi masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
 - Laporan Kepatuhan Masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
 - Laporan Audit Intern Terintegrasi
- Sejalan dengan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama telah menyusun kewajiban pelaporan dimaksud untuk dilaporkan kepada OJK meliputi:
 - Laporan Profil Risiko Terintegrasi
 - Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
 - Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi`

2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Penilaian kecukupan pengendalian internal pada masing-masing LJK belum dilakukan secara efektif dan didokumentasikan secara sempurna.
- Implementasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup fungsi Manajemen Risiko, fungsi Internal Audit, dan fungsi Kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin masih sangat terbatas, hal ini akan menjadi perhatian dan terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2021

Entitas Utama : PT Bank Panin Tbk

Posisi Laporan : **Desember 2021 (Semester II 2021)**

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	<p>Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.</p>
Analisis	
<p>Secara umum, Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menerapkan dan mengimplementasikan Tata Kelola Terintegrasi pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 /POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Menunjuk Surat Bank Panin selaku Entitas Utama No. 011/DIR/OJK/21 tanggal 29 Januari 2021 tentang Laporan Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan maka Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Bank Panin Tbk, sebagai Entitas Utama; • PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, sebagai LJK anggota; • PT Clipan Finance Indonesia Tbk, sebagai LJK anggota; • PT Panin Sekuritas Tbk, sebagai LJK anggota; • PT Panin Asset Management, sebagai LJK anggota; • PT Panin Dai-Ichi Life, sebagai LJK anggota. <p>Ruang lingkup penerapan Tata Kelola Terintegrasi mencakup Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin yang secara komprehensif dan terstruktur mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) • Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) • Hasil Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) <p>Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:</p> <p>A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menyusun Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pedoman Tata Kelola Terintegrasi 	

- Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Pedoman Audit Internal Terintegrasi
 - Pedoman Kepatuhan Terintegrasi
 - Piagam Konglomerasi Grup Panin
 - Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menetapkan organ pendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi
 - Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
- Perbedaan jenis bidang usaha dan struktur konglomerasi yang bersifat horizontal, merupakan kendala yang dihadapi dalam melakukan koordinasi dan sinergi diantara LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Namun demikian kendala tersebut secara bertahap dapat dimitigasi seiring dengan dukungan dan komitmen penuh dari PT Bank Panin Tbk selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
 - Fungsi – fungsi terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup fungsi Manajemen Risiko, fungsi Internal Audit, dan fungsi Kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin masih sangat terbatas. Hal ini akan menjadi perhatian dan terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

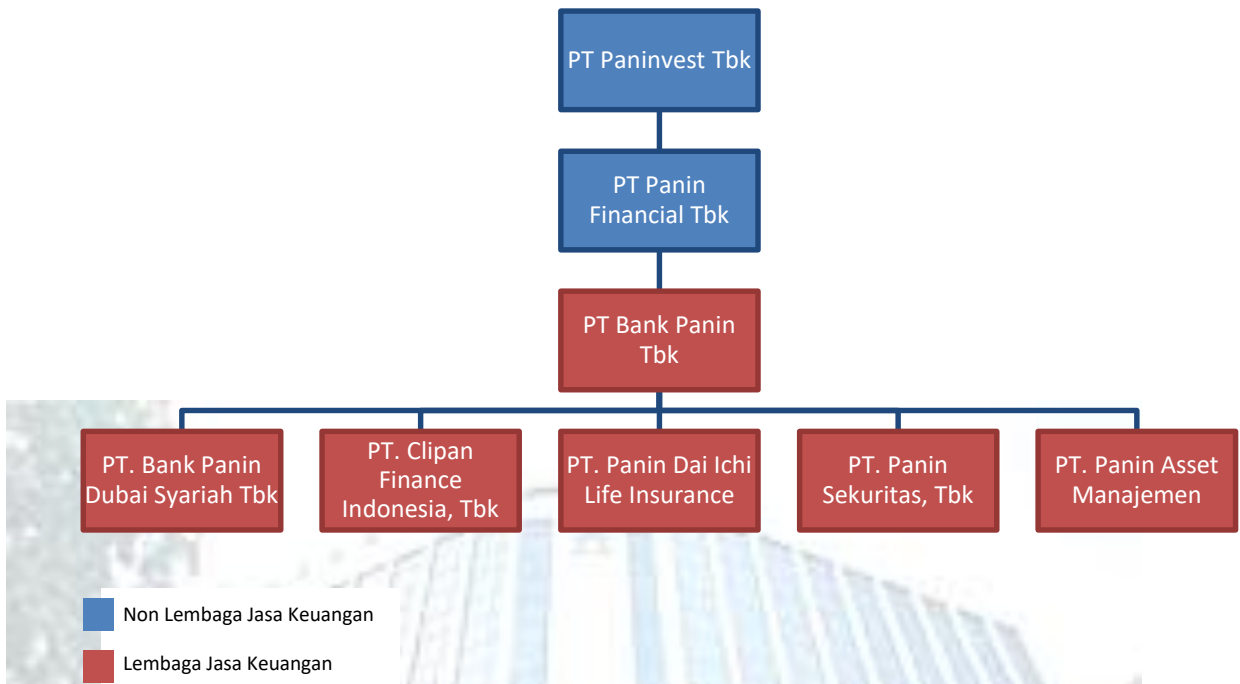
1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
- Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi telah disosialisasikan kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin
 - Komitmen dan dukungan dari Entitas Utama untuk terus memantau dan memastikan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
 - Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama senantiasa melakukan penyempurnaan dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui sejumlah rapat, workshop, dan sosialisasi bersama dengan seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
- Efektivitas evaluasi atas Buku Pedoman belum dilakukan secara sempurna. Hal ini senantiasa menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses evaluasi Buku Pedoman.
 - Standar indikator tata kelola dan manajemen risiko yang berbeda untuk masing-masing sektor industri keuangan, sehingga membutuhkan waktu untuk menyelaraskan penerapan indikator tata kelola dan manajemen risiko secara *group-wide*.

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan ketentuan yang berlaku saat ini tentang Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Selama Semester II tahun 2021 telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 1 (satu) kali.
 - Adapun pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yaitu mengenai evaluasi pembahasan hasil Implementasi Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing LJK selama Semester II 2021, Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan hal-hal lain/*current issue*.
 - Pada Semester II 2021 Entitas Utama telah menerima kewajiban pelaporan terkait penerapan Pengawasan Terintegrasi sebagai bagian *monitoring* Entitas Utama terhadap anggota Konglomerasi Keuangan, Laporan tersebut meliputi :
 - Laporan Profil Risiko masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
 - Laporan Tata Kelola Terintegrasi masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
 - Laporan Kepatuhan Masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
 - Laporan Audit Intern Terintegrasi
 - Sejalan dengan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama telah menyusun kewajiban pelaporan dimaksud untuk dilaporkan kepada OJK meliputi:
 - Laporan Profil Risiko Terintegrasi
 - Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
 - Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
- Penilaian kecukupan pengendalian internal pada masing-masing LJK belum dilakukan secara efektif dan didokumentasikan secara sempurna.
 - Implementasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup fungsi Manajemen Risiko, fungsi Internal Audit, dan fungsi Kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin masih terbatas, hal ini akan menjadi perhatian dan terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

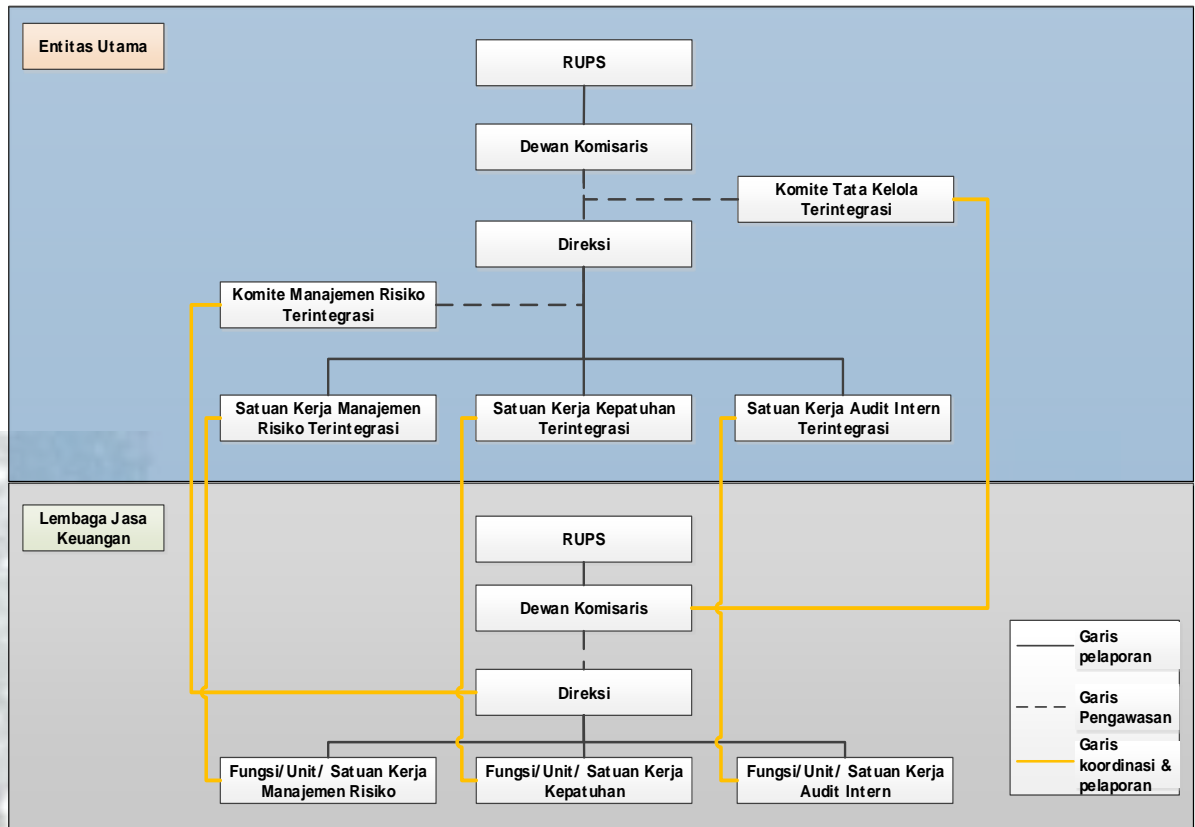
Struktur Konglomerasi Keuangan Panin Grup



Tata Kelola Terintegrasi diimplementasikan pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin, dengan struktur konglomerasi sebagai berikut:

- Entitas Utama** : PT. Bank Panin, Tbk
- Anggota LJK** :
1. PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
 2. PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk
 3. PT. Panin Dai Ichi Life Insurance
 4. PT. Panin Sekuritas, Tbk
 5. PT. Panin Aset Manajemen

Struktur Organisasi Tata Kelola Terintegrasi



A. Direksi Entitas Utama

PT. Bank Panin Tbk. telah mendapat pengesahan/persetujuan dari OJK sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Panin berdasarkan Surat OJK No. S-41/PB.33/2015. Direksi Entitas Utama telah memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memenuhi persyaratan OJK. Direksi Entitas Utama berjumlah 11 (sebelas) orang, dan seluruhnya telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang dipersyaratkan oleh OJK, serta telah dinyatakan lulus Fit dan Proper Test dari OJK.

1. Persyaratan

Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, yang setidaknya mencakup:
 - Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- b. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit

Intern Terintegrasi (SKAIT), auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

B. Dewan Komisaris Entitas Utama

Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama merupakan individu profesional yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Disamping itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama tidak memiliki catatan kriminal, tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan Perusahaan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan. Seluruh Dewan Komisaris Entitas Utama juga adalah orang-orang yang sangat berkompeten dibidangnya, mempunyai pengalaman dibidang keuangan dan perekonomian.

1. Persyaratan

Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang setidaknya mencakup:

- a. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
- c. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

Komposisi Dewan Komisaris Entitas Utama adalah:

No	Nama	Jabatan
1	Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris (Independen)
2	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen)

C. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) merupakan Komite yang memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam peningkatan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

1. Persyaratan

- a. Susunan keanggotaan KMRT setidaknya terdiri dari:
 - Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama sebagai ketua merangkap anggota KMRT;
 - Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari LJK Anak dalam Konglomerasi Keuangan Panin; dan
 - Pejabat eksekutif.

- b. Jumlah dan komposisi direktur yang menjadi anggota KMRT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Panin serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari KMRT dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan LJK Anak.
- c. Jumlah dan sifat keanggotaan pejabat eksekutif dalam KMRT dengan kebutuhan masing-masing Konglomerasi Keuangan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama, yang setidaknya mencakup:

- a. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
- b. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi.

Dalam rangka menunjang Direksi Entitas Utama terkait Manajemen Risiko Terintegrasi, Entitas Utama telah membentuk KMRT yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi. Anggota KMRT telah ditunjuk dengan memperhatikan keterwakilan LJK masing-masing dalam Konglomerasi Keuangan Panin. Adapun anggota KMRT Entitas Utama periode tahun 2021 adalah:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Ken Ng Yik	Direktur	Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk)
2	Jahja Anwar	Direktur	Clipan Finance
3	Tjiang Jefry	Direktur	Panin Sekuritas
4	Naohide Noguchi	Direktur	Panin Dai-Ichi Life
5	Budi Prakoso	Direktur	Bank Panin Dubai Syariah
6	Rudiyanto	Direktur	Panin Asset Manajemen

Hingga periode semester II tahun 2021, Direktur Entitas Utama dengan Direksi LJK yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko masing-masing LJK telah melakukan rapat dengan agenda pembahasan fundamental atas penerapan manajemen risiko terintegrasi dan tata cara pelaksanaan, koordinasi, kajian atas jenis-jenis risiko-risiko yang menjadi ketetapan penilaian masing-masing LJK. Hasil penilaian profil risiko tersebut juga telah disampaikan oleh SKMRT secara berkala.

D. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dengan mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, dan pengalaman anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi beranggotakan personel dari Biro Compliance dari Entitas Utama dan perwakilan masing-masing LJK yang membawahi fungsi kepatuhan dan diketuai oleh Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Setiap anggota yang telah ditetapkan dipilih berdasarkan pertimbangan objektif dilihat dari sisi kompetensi,

pengalaman kerja, latar belakang pendidikan dan keahlian/spesialisasi.

Penetapan susunan keanggotaan SKKT telah ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mampu diemban dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

1. Persyaratan

SKKT merupakan satuan kerja independen yang dimiliki Entitas Utama

2. Tugas dan Tanggungjawab

- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan
- Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama (selaku Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin)

Sesuai dengan Pedoman Kepatuhan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah Satuan Kerja Entitas Utama yang independen dan tidak merangkap sebagai unit kerja/bisnis ataupun operasional (tidak terdapat rangkap jabatan), dimana anggotanya tidak terlibat dalam kegiatan operasional. Anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi diambil dari personil dari Biro Compliance (BCO)/ Satuan Kerja Kepatuhan di Entitas Utama dan juga perwakilan dari LJK yang membawahi fungsi kepatuhan di LJK masing-masing.

Struktur anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi antara lain:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Wahyu Wardhanakusuma	Kepala Biro Kepatuhan	Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk)

Selain itu, untuk mempermudah Entitas Utama dalam melakukan koordinasi terkait kepatuhan dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, masing-masing LJK telah menunjuk penanggungjawab terkait kepatuhan terintegrasi, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Intan Rahmawati	Kepala Biro Kepatuhan	Bank Panin Dubai Syariah
2	John Barni Manik	Kepala Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Panin Dai-ichi Life
3	Febry Pratama	Satuan Kerja Kepatuhan	Panin Sekuritas
4	Manahara Silaen	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Panin Asset Management
5	Meyli Rita	Satuan Kerja Kepatuhan	Clipan Finance

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) telah melaksanakan Rapat SKKT untuk posisi Desember 2021. Hasil Rapat SKKT tersebut telah dibawa kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai bahan evaluasi.

Berikut adalah alur penyampaian Laporan Penilaian Sendiri Tata Kelola Terintegrasi Panin Group:



E. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Sesuai dengan Pedoman Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin, diatur bahwa Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi adalah Satuan Kerja Entitas Utama yang independen dan tidak merangkap sebagai unit kerja/bisnis ataupun operasional (tidak terdapat rangkap jabatan). Koordinator dan anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi secara struktural juga tidak merangkap dengan jabatan lain sebagai unit kerja.

1. Persyaratan

SKAIT merupakan satuan kerja independen yang wajib dimiliki Entitas Utama

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan
- Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama (selaku Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin) dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi diambil dari Satuan Kerja Audit Intern Bank Panin selaku Entitas Utama dan juga dari Fungsi Audit Intern yang terdapat pada masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan Panin. Setiap anggota yang telah ditetapkan dipilih berdasarkan pertimbangan objektif dilihat dari sisi kompetensi, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, sertifikasi, dan keahlian/spesialisasi. Penetapan jumlah anggota SKAIT telah ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mampu diemban dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi melakukan fungsi pemantauan pelaksanaan audit intern pada LJK dengan memonitor pelaksanaan *audit plan* dan realisasi *audit plan*, temuan signifikan dan monitoring tindak lanjut yang disampaikan internal audit LJK kepada SKAI Entitas Utama berupa laporan semesteran. Laporan semesteran tersebut disampaikan masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin sesuai dengan format laporan yang telah ditetapkan Entitas Utama. Pembahasan atas laporan semesteran tersebut dibahas pada rapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan bersama oleh SKAI Entitas Utama dan seluruh internal audit LJK pada setiap semester di bulan selanjutnya.

F. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Entitas Utama telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan juga Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam upaya mendukung penerapan manajemen risiko pada Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko pada Entitas Utama (cq. BMR) yang bertindak sebagai koordinator seluruh Fungsi/Unit/Satuan Kerja Manajemen Risiko LJK pada Konglomerasi Keuangan Panin, sedangkan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) merupakan Komite yang memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam peningkatan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

1. Persyaratan

- a. SKMRT merupakan satuan kerja independen yang dimiliki Entitas Utama
- b. SKMRT bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- b. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
- c. Melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan Panin berdasarkan hasil penilaian:
 - Profil Risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan,
 - Tingkat Risiko masing-masing Risiko secara terintegrasi,

- Profil Risiko secara terintegrasi;
- d. Melakukan *stress testing*;
- e. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
 - Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko
- f. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan Panin;
- g. Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- h. Memberikan masukan kepada KMRT, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama dan KMRT.

Berdasarkan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang dimiliki oleh Konglomerasi Keuangan Panin, Entitas Utama membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi terdiri dari atas beberapa personil yang diambil dari Biro Manajemen Risiko (BMR) Bank Panin selaku Entitas Utama dan juga perwakilan dari LJK yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi beranggotakan:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Antoni	Kepala Biro Manajemen Risiko	Entitas Utama
2	Wardiyanto Tarius Putra	Kepala Departemen Loan Portofolio & Integrated Risk	Entitas Utama

Selain itu, untuk mempermudah Entitas Utama dalam melakukan koordinasi terkait manajemen risiko terintegrasi dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, masing-masing LJK telah menunjuk penanggung jawab terkait manajemen risiko terintegrasi, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Agus Buntoro	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Clipan Finance
3	Sandy Kusyadi	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Panin Sekuritas
4	John Barni Manik	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Panin Dai-ichi Life
5	Gamma Mufti Jauhari	Pjs. Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Bank Panin Dubai Syariah
6	Manahara Silaen	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Panin Aset Manajemen

SKMRT telah melakukan rapat dengan masing-masing LJK pada bulan Januari 2021 dengan data yang bersumber pada Laporan Profil Risiko. Rapat tersebut antara lain beragendakan pembahasan dan penilaian aggregate risiko dari berbagai LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Panin.

Manajemen Risiko Terintegrasi

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Bank telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan Grup Panin. Hal ini juga merupakan salah satu inisiatif strategik Satuan Kerja Manajemen Risiko dan menjadi fokus perhatian khusus dari manajemen Bank. Hal tersebut dianggap penting karena eksposur risiko yang timbul pada Panin Grup dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Proses integrasi manajemen risiko dilakukan dengan tetap memperhatikan perbedaan karakteristik usaha pada masing-masing Panin Grup. Implementasi proses integrasi manajemen risiko antara lain melalui proses pendampingan dan penyelarasan praktik manajemen risiko dalam hal tata kelola risiko, kebijakan dan prosedur manajemen risiko, pelaporan manajemen risiko, dan peningkatan budaya sadar risiko. Secara terintegrasi, Bank mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategik, risiko reputasi, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko asuransi dan risiko transaksi intragrup.

Manajemen Risiko terintegrasi berujung pada penetapan besaran *risk appetite* atau batas toleransi yang bisa diambil oleh Bank dalam menetapkan portofolio sesuai dengan *price risk* yang telah dipertimbangkan dengan matang dan dicerminkan pada besaran modal yang dikelola untuk menghadapi risiko, sekaligus mendukung pengembangan usaha. Mengingat pentingnya pengelolaan risiko dalam bisnis perbankan, Bank berupaya menerapkan kerangka kerja pengelolaan risiko yang adaptif, mudah dimengerti dan dijalankan oleh seluruh jajaran. Untuk mendukung efektivitas pengelolaan risiko Bank juga berupaya menumbuhkan kembangkan budaya risiko pada seluruh jajarannya, sehingga timbul kesadaran bahwa pengelolaan risiko pada hakikatnya adalah tanggung jawab seluruh jajaran.

Proses pemantauan atas penerapan manajemen risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko masing-masing Entitas untuk dilaporkan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko di Entitas Utama. Proses pemantauan serta evaluasi atas eksposur risiko anggota Konglomerasi Keuangan Panin Grup, akan dilaporkan juga melalui Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT). KMRT beranggotakan perwakilan dari masing-masing entitas anggota dalam Konglomerasi Keuangan. Pada proses pemantauan dan evaluasi ini, Komite menyampaikan fokus utama atas eksposur risiko anggota Konglomerasi Keuangan untuk perbaikan proses manajemen risiko di masa datang.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah dilakukan oleh Konglomerasi Keuangan Grup Panin mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dari Entitas Utama terhadap Konglomerasi Keuangan Grup Panin;
2. Adanya kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Adanya kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Dalam hal penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Bank telah melakukan:

1. Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko menjadi Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Entitas Utama dan Entitas lainnya secara terintegrasi.
3. Penyesuaian struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan menambahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.
4. Identifikasi Entitas Utama dan Entitas lainnya yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
5. Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
6. Penyusunan dan penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi.
7. Kaji ulang atas pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi.
8. Penyusunan dan penyampaian Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi.

Laporan Profil Risiko Terintegrasi

Konglomerasi Keuangan Bank secara terintegrasi mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko yang terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko yang sudah terdapat pada Penerapan Manajemen Risiko Bank ditambah dengan Risiko Transaksi Intra Grup (TIG) dan Risiko Asuransi.

Kebijakan Transaksi Intra-Grup

Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi menjelaskan Risiko Intra Group adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan Panin dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan / atau tidak diikuti perpindahan dana.

Risiko Transaksi Intra Grup

Konglomerasi Keuangan Panin Grup melakukan pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup untuk memastikan bahwa Transaksi Intra-Grup yang dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran, kelaziman usaha dan ketentuan yang berlaku serta telah didokumentasikan dengan baik. Berdasarkan hasil penilaian, Risiko Transaksi Intra-Grup memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap kinerja Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.

Risiko Asuransi

Konglomerasi Keuangan Panin Grup juga melakukan pengelolaan Risiko Asuransi karena adanya Anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang bergerak di bidang perasuransian. Risiko Asuransi Konglomerasi Keuangan Panin Grup tergolong *Low to Moderat*, yang merupakan hasil penilaian dari Risiko Inheren *Low* dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Satisfactory*.

Entitas Utama melakukan identifikasi risiko yang melekat pada bisnis Konglomerasi Keuangan Panin. Hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko antara lain:

1. Entitas Utama melakukan identifikasi risiko secara berkala baik terhadap risiko yang melekat pada bisnis entitas utama dan risiko dari LJK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan Panin.
2. Entitas Utama memiliki metodologi dalam pelaksanaan identifikasi risiko.
3. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Konglomerasi Keuangan Panin antara lain berdasarkan pengalaman kerugian yang pernah terjadi.

Pengukuran risiko transaksi intra-group paling sedikit dilakukan dengan menggunakan parameter dibawah ini:

1. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan Panin
2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi
3. Informasi lainnya.
4. Pemenuhan prinsip *arm's length* dalam perjanjian transaksi intra-grup secara keseluruhan
5. Dampak transaksi intra-grup kepada kinerja keuangan LJK.
6. Materialitas transaksi intra-grup yang dapat mempengaruhi kondisi LJK maupun kondisi Konglomerasi Keuangan.

Konglomerasi Keuangan Panin merumuskan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk Tolerance*). Dalam menentukan *Risk Appetite*, Direksi memastikan bahwa *risk appetite* yang diambil telah sesuai dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan Panin. *Risk Appetite* yang telah ditentukan oleh Direksi selalu dipantau dan jika terdapat profil risiko aktual melewati *Risk Appetite* yang telah ditetapkan, Direksi harus mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk membawa profil risiko agar berada dalam *Risk Appetite* Konglomerasi Keuangan Panin.

Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Konglomerasi Keuangan sebagai penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) setelah mempertimbangkan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan secara terintegrasi serta kemampuan Konglomerasi Keuangan Panin dalam mengambil Risiko (*Risk Bearing Capacity*). Toleransi risiko ditetapkan per jenis risiko dan risiko Konglomerasi Keuangan Panin secara keseluruhan sebagaimana halnya *Risk Appetite*, melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Melakukan pengukuran posisi berbagai parameter jenis risiko dalam portfolio Konglomerasi Keuangan Panin saat ini ("*as is*" position) dan posisi proyeksi yang akan dicapai ("*to be*" position) di masa depan (satu tahun ke depan), untuk Risiko Nilai Tukar, Suku Bunga, Likuiditas, Kredit, Operasional, dan Risiko Lainnya, serta Sistem Pemingkatan Kredit internal dengan metode "*quick dan dirty*" untuk Risiko Kredit.
2. Setelah eksposur risiko bagi Konglomerasi Keuangan Panin diukur dan dikuantifikasi dengan model pengukuran dan formula tertentu, hasil akhir pengukuran dan penghitungan tersebut harus dikaji kembali.
3. Bila Direksi menyetujui besarnya risiko yang diambil dan direncanakan saat ini harus diaplikasikan atau diproyeksikan untuk tahun mendatang, maka Konglomerasi Keuangan Panin dapat menggunakan "jumlah kerugian potensial", dan kerugian aktual yang diderita menentukan kerugian maksimum yang dapat diterima Konglomerasi Keuangan Panin.
4. Bila hasil dari pengukuran dan penghitungan eksposur risiko yang menggunakan model dan formula tertentu dirasa terlalu rendah atau terlalu tinggi, besarnya toleransi risiko yang akan diambil oleh Konglomerasi Keuangan Panin dapat dinaikkan atau dikurangi dengan mengurangi eksposur yang relevan pada risiko Konglomerasi Keuangan Panin. Hasil penghitungan dan pengukuran dapat disesuaikan menurut pendapatan atau ekuitas Konglomerasi Keuangan Panin.

Berdasarkan posisi Desember 2021, Perseroan telah melakukan *Self Assessment* profil risiko secara terintegrasi dengan kesimpulan bahwa profil risiko konglomerasi keuangan berada pada peringkat 2 (*Low to Moderat Risk*) dan memiliki kualitas manajemen risiko yang memadai sesuai dengan kompleksitas bisnis yang dihadapi.

Proses penilaian Profil Risiko Terintegrasi merupakan penilaian terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko berdasarkan Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. Kesepuluh jenis risiko tersebut adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Transaksi Intragrup dan Risiko Asuransi. Dari penilaian Risiko Inheren dan penilaian KPMR Terintegrasi akan diperoleh Peringkat Tingkat Risiko Profil Risiko Terintegrasi.

Profil Risiko	Posisi Desember 2021		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Pasar	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>	<i>Strong</i>	<i>Low</i>
Risiko Operasional	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Hukum	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Reputasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Strategik	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Intra- Grup	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Asuransi	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Peringkat Komposit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>

Uraian Singkat mengenai Pelaksanaan Penilaian Risiko Teintegrasi oleh Biro Manajemen Risiko (SKMRT)

Penilaian Profil Risiko pada masing-masing anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menggunakan metode perhitungan kuantitatif dan penilaian kualitatif dengan perhitungan dan penilaian secara terintegrasi oleh PT Bank Panin Tbk selaku Entitas Utama namun beberapa Sasaran Penilaian telah disesuaikan dengan kondisi masing-masing anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Analisis

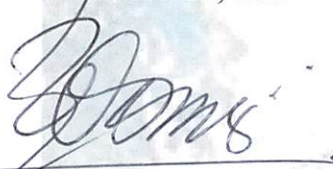
Secara umum Konglomerasi Keuangan Panin Grup telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Demikian kami sampaikan Penyusunan Laporan Tahunan Tata Kelola PT Bank Panin, Tbk dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Panin, Tbk tahun 2021. Seluruh Manajemen PaninBank menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Pada dasarnya PaninBank senantiasa melakukan kegiatan usaha berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan. Laporan ini bersifat tidak mengikat namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk mendukung peraturan perundangan yang ada. Apabila dipandang perlu laporan ini dapat direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.

Jakarta, 26 April 2022

PT. Bank Panin, Tbk



Nelson Tampubolon
Presiden Komisaris



Herwidayatmo
Presiden Direktur

